

LAPORAN KINERJA 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
HIGHLIGHT KINERJA	6
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 LATAR BELAKANG	12
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	14
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	15
1.4 ISU STRATEGIS	16
1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	16
1.4.2 PERMASALAHAN UTAMA.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	24
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	37
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)	40
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA.....	44
2.5. METODE PENGUKURAN	48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	50
3.1.1. Sasaran Strategis I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di masing-masing wilayah kerja UPT.....	57
3.1.2. Sasaran Strategis II– Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing- masing wilayah kerja UPT	77
3.1.3. Sasaran Strategis III – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	113

3.1.4 Sasaran Strategis IV – Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	127
3.1.5. Sasaran Strategis V – Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	134
3.1.6. Sasaran Strategis VI – Memperkuatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	139
3.1.7 Sasaran Strategis VII - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	147
3.1.8. Sasaran Strategis VIII – Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	151
3.1.9. Sasaran Strategis IX – Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	163
3.1.10. Sasaran Kegiatan X – Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal.....	181
3.1.11. Sasaran Kegiatan XI– Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel.....	185
3.2 EVALUASI AKHIR PERIODE RENSTRA (TAHUN KE-5)	200
3.3 EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS.....	214
3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA ..	224
3.5 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA.....	235
3.6 REALISASI ANGGARAN	242
BAB IV PENUTUP.....	252
4.1. KESIMPULAN.....	252
4.2. SARAN.....	253

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Periode 2020-2024.....	35
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024.....	37
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024	40
Tabel 2.4 Perubahan Target pada Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024.....	42
Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024	45
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis	52
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Balai dalam Klaster 5.....	54
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	55
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024	57
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024	58
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024	58
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024.....	62
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024.....	67
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu Tahun 2024 dengan target Renstra Tahun 2024.....	Err
or! Bookmark not defined.	
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024.....	71
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat.....	74

Tabel 3.13 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II	
Tahun 2024	77
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2024	80
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2024	83
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024	87
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024	91
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024	95
Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	99
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2024	103
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Tahun 2024	109
Tabel 3.22 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Tahun 2024	113
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024	114
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024	117
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman Tahun 2024	120
Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	124
Tabel 3.27 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024	127

Tabel 3.28 Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024	128
Tabel 3.29 Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024	131
Tabel 3.30 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024	134
Tabel 3.31 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2024.....	135
Tabel 3.32 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2024	140
Tabel 3.33 Capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2024.....	140
Tabel 3.34 Capaian Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.....	145
Tabel 3.35 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2024	148
Tabel 3.36 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Tahun 2024	149
Tabel 3.37 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2024	152
Tabel 3.38 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024.....	153
Tabel 3.39 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024	157
Tabel 3.40 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024	161
Tabel 3.41 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis IX Tahun 2024.....	164
Tabel 3.42 Capaian Kinerja Indikator Indeks RB UPT Tahun 2024.....	165
Tabel 3.43 Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP UPT Tahun 2024.....	171

Tabel 3.44 Capaian Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024.....	178
Tabel 3.45 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis X Tahun 2024	182
Tabel 3.46 Capaian Kinerja Indikator Nilai Profesionalitas ASN UPT Tahun 2024	182
Tabel 3.47 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2024.....	186
Tabel 3.48 Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2024	187
Tabel 3.49 Capaian Kinerja Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024	191
Tabel 3.50 Capaian Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024	195
Tabel 3.51 Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Tahun 2024.....	198
Tabel 3.52 Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2024.....	244
Tabel 3.53 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Sasaran Kegiatan.....	245
Tabel 3.54 Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun 2024	246
Tabel 3.55 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024	248

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jayapura	16
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura.....	18
Gambar 1.3 Catchment Area BBPOM di Jayapura, Loka POM di Kab. Mimika dan Loka POM di Kab. Merauke	19
Gambar 1.4 Peta Provinsi Baru Pemekaran dari Provinsi di Papua	20
Gambar 2.1. Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura	25
Gambar 3.1 Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2024	50
Gambar 3.2 Perbandingan NPSS BBPOM Jayapura Tahun 2023 dan 2024 ...	51
Gambar 3.3 Perbandingan Sasaran Strategis BBPOM Jayapura Tahun 2023 dan 2024	53
Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dengan Balai yang setara Tahun 2024	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sampling dan pengujian Obat	233
Lampiran 2	Sampling dan pengujian Makanan.	234
Lampiran 3	keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	234
Lampiran 4	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	235
Lampiran 5	Sertifikasi	236
Lampiran 7	Sarana Distribusi	237
Lampiran 8	Sarana Produksi	238
Lampiran 9	UMKM	239
Lampiran 10	PJAS	239
Lampiran 11	DESA	239
Lampiran 12	PASAR	240
Lampiran 13	Sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	240
Lampiran 14	Sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	240
Lampiran 15	Perkara	240
Lampiran 16	Pengukuran kinerja program/kegiatan	241
Lampiran 17	Pengukuran Tingkat efisiensi indikator kinerja	243

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan tenaga dan kesehatan sehingga dapat melakukan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan sampai dengan Tahun 2024 dengan memberikan kinerja yang terbaik dan secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Balai Besar di Jayapura, hadir dan melayani di tanah Papua untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Obat dan Makanan, agar aman bermutu dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Seluruh tugas fungsi pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dengan upaya yang sistematis meningkatkan kapasitas kinerja institusi dari waktu ke waktu. Kinerja organisasi diukur berdasarkan capaian realisasi setiap target indikator yang telah ditetapkan pada Renstra 2020 - 2024 BBPOM di Jayapura.

Tahun 2024 merupakan tahun akhir dari masa Renstra 2020 - 2024, secara umum kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 dan masa akhir Renstra telah dilaksanakan dengan tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hambatan/kendala untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan. Keseluruhan pencapaian yang tergambar dalam laporan kinerja ini tidak terlepas dari peran seluruh pegawai dan pemangku kepentingan dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat.

Akhir kata, kami susun laporan ini sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja Balai Besar POM di Jayapura sesuai dengan amanat Perundangan undangan dan besar harapan kami dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jayapura, 26 Februari 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Jayapura



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai perwujudan visi Badan POM, yakni “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” telah ditetapkan Rencana Kerja yang berpedoman pada Renstra BBPOM di Jayapura 2020-2024, selanjutnya rencana kerja tersebut dituangkan dalam kontrak kinerja yang ditetapkan dalam tiga perspektif yaitu perspektif *Stakeholder*, *Internal Process*, dan *Learning and Growth*.

Masing-masing perspektif memiliki Sasaran Strategis yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), kemudian pencapaian atas IKU dimonitor dan dievaluasi secara berkala.

Terdapat 11 Sasaran Strategis pada tahun 2024 dengan 34 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU kemudian dilakukan penghitungan secara periodik setiap tiga bulan (triwulan) dan tahunan menghasilkan nilai Sasaran Strategis, dimana masing-masing Sasaran Strategis akan dihitung kembali untuk menjadi Predikat Kinerja Organisasi yaitu kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS, dimana nilai >100 dengan predikat Istimewa dan untuk **Tahun 2024 BBPOM di Jayapura memperoleh Predikat Istimewa**.

Dari 11 Sasaran Strategis diperoleh 4 (Empat) sasaran strategis dengan predikat sangat Baik, 1(satu) sasaran kegiatan dengan predikat Baik, dan 6 (enam) sasaran strategis dengan predikat cukup. Pernyataan keberhasilan setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT dengan nilai NPS sebesar 99.42 dengan kriteria Cukup.
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT dengan nilai NPS sebesar 99.47 dengan kriteria Cukup.
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke wilayah kerja UPT dengan nilai NPS 100.43 dengan kriteria Sangat Baik.

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah wilayah kerja UPT dengan nilai NPS sebesar 100 dengan kriteria Baik.
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT dengan nilai NPS sebesar 95.35 dengan kriteria Cukup.
6. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan nilai NPS sebesar 101.72 dengan kriteria Sangat Baik.
7. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan nilai NPS 99.24 dengan kriteria Cukup.
8. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan dengan nilai NPSS 109.76 dengan kriteria Sangat Baik.
9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal Nilai NPS 98.29 dengan kriteria Cukup.
10. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal dengan Nilai NPS 95.39 dengan kriteria Cukup
11. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel Nilai NPS 114.49 dengan kriteria Sangat Baik.

Dari 11 Sasaran Strategis terdapat 34 indikator, capaian indikator terendah dengan realisasi belum mencapai target yaitu indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota. BBPOM di Jayapura telah melakukan kegiatan Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditandai dengan adanya SK pembentukan TKPPOM, Kegiatan koordinasi dan pengawasan terpadu bersama Organisasi Perangkat Daerah di 11 Kabupaten Kota. Pengawasan terpadu yang dilakukan berupa pemeriksaan bersama ke sarana distribusi dan sarana produksi, Pembentukan Tim Percepatan Pengendalian Stunting (TPPS) Provinsi Papua ditandai dengan ditandatanganinya SK TPPS, Kegiatan koordinasi terkait stunting dengan pemerintah daerah kabupaten Jayapura sebagai langkah awal pengendalian stunting di Kabupaten Jayapura sebelum TPPS terbentuk, serta Kegiatan koordinasi lintas sektor berupa pendataan lokus stunting provinsi papua dalam rangka pelaksanaan program GKPD 2024 di Kota Jayapura.

Permasalahan yang dihadapi antara lain koordinasi yang sulit dilakukan di daerah pedalaman Papua/daerah Provinsi Papua Pegunungan/wilayah rawan konflik/chaos, kurangnya koordinasi keterlibatan BBPOM Jayapura dalam pelaksanaan Tim Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM), pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di sebagian besar Kabupaten, kurangnya sumber daya dalam pelaksanaan koordinasi, Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memahami peran BBPOM Jayapura untuk di daerah.

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens kepada pemerintah daerah melalui lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan serta pengelolaan kegiatan dengan anggaran DAK BOK POM.

Dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, BBPOM di Jayapura mengelola anggaran yang bersumber dari APBN TA 2024 sebesar Rp32.006.163.000,- sebagai pagu awal. Dari alokasi anggaran ini dilakukan revisi *Automatic Adjustment* (blokir anggaran) sebesar Rp.3.374.941.000 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah). Pada tanggal 9 Agustus 2024 dilakukan revisi dalam rangka penyesuaian belanja pegawai sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga pagu anggaran menjadi Rp.27.331.222.000 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh dua rupiah) terhadap pagu anggaran awal menjadi Rp30.706.163.000 (tiga puluh milyar tujuh ratus enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) . Dengan adanya beberapa kebijakan terhadap pemenuhan anggaran kegiatan maka dilakukan revisi antara lain pada tanggal 21 Agustus 2024 dilakukan revisi buka blokir dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran dan target sebesar Rp.138.888.000 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Pada tanggal 18 November 2024, BBPOM Jayapura melakukan revisi *self blocking* Perjalanan Dinas sebesar Rp.355.888.000 (tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah) sesuai arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 sehingga pagu anggaran akhir BBPOM Jayapura sebesar Rp.27.114.222.000 (dua puluh tujuh milyar seratus empat belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran Tahun 2024 sebagai berikut :

Pagu Awal (Rp)	Pagu setelah AA dan Blokir Perjadin (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi terhadap Pagu Awal	% Realisasi terhadap Pagu AA dan Blokir Perjadin
30.706.163.000	27,114,222,000	27,006,395,014	87.95	99.60

Berdasarkan Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis terdapat 8 sasaran strategis yang efisien, dan 3 Sasaran strategis tidak efisien. Pencapaian sasaran

strategis didukung oleh 34 kegiatan dengan capaian tingkat efisiensi berkisar antara -1,00 sampai dengan 0.36. Dari 34 kegiatan sebanyak 27 kegiatan dengan capaian Efisien dan 7 kegiatan tidak efisien sehingga untuk kedepannya perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang tercapainya sasaran strategis dan berfokus pada kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis.

Jayapura, 26 Februari 2025
Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM.
NIP.19710319 199903 1 002

HIGHLIGHT KINERJA

JANUARI



BBPOM di Jayapura Kawal Distribusi Obat Lewat Sertifikasi CDOB Untuk Menjamin Keamanan, Mutu dan Khasiat Obat Bagi Masyarakat

FEBRUARI



Optimalkan Keamanan Pangan, BBPOM di Jayapura Lakukan Survei di Pasar Sentral Mararena Sarmi dan Pasar Rakyat Bonggo

MARET



Komitmen Dalam Aksi: Advokasi Balai Besar POM Jayapura untuk Keamanan Pangan di Kota Jayapura

APRIL



Advokasi dan Tata Hubungan Kerja, Balai Besar POM di Jayapura Jalin Kerjasama dengan Tim Bea Cukai dan Tim Perbatasan Terpadu PLBN Skouw

MEI



Kepala Balai Besar POM di Jayapura dan BKKBN Kabupaten Jayapura Berkoordinasi untuk Penurunan Stunting dan Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi



Sinergitas dengan Lintas Sektor Tingkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Jayapura



Kolaborasi dengan Ombudsman Provinsi Papua dalam Peningkatan Kualitas Layanan Publik BBPOM di Jayapura

JUNI



BBPOM di Jayapura Hadir dalam peresmian Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tepung Sagu di Distrik Sentani

JULI



Kolaborasi Pentahelix dalam Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM Lokal di Provinsi Papua



Penyidik Balai Besar POM di Jayapura Menjadi yang Terbaik pada Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Penyidik Polri dan PPNS di Polda Papua



Kolaborasi BBPOM Jayapura dan Dinas Kesehatan Kota Jayapura Tingkatkan Kapasitas Industri Rumah Tangga Pangan Kota Jayapura

AGUSTUS



Penyidik BPOM lakukan Koordinasi guna Perwujudan Sinergitas Penyidik PNS dan Korwas PPNS Polda Papua



Press Release Hasil Kegiatan
Tahap Jangka Pendek
Kolaborasi Pentaheliks
Peningkatan Kepatuhan
IRTP di Provinsi Papua

SEPTEMBER



Antusiasme Tinggi dalam
Kegiatan Sosialisasi Pangan
Jajanan Anak Sekolah
(PJAS) di Kabupaten
Tolikara

OKTOBER



Balai Besar POM di Jayapura
Bersama Dinas Kesehatan
Kab. Keerom tingkatkan
pengetahuan UMKM lewat
Pelatihan PKP di Kabupaten
Keerom



BBPOM di Jayapura Raih
Apresiasi The Best HR
Manager Pada Kategori
Balai Besar POM Sebagai
Terbaik Kedua

NOVEMBER



BBPOM di Jayapura Gelar
Monitoring dan Evaluasi
Program Prioritas Nasional
di Kota Jayapura



Bimtek Internal Identifikasi
Dapoksetin HCl secara KLT-
Spektrofotodensitometri
dan Penetapan Kadar
Glucosamin secara KCKT
dalam Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan



Kolaborasi BBPOM di
Jayapura dan Mahasiswa
Program Pangan Aman
Goes to Campus (PAGC)
Dampingi UMKM Tingkatkan
Mutu Produk Lokal

DESEMBER



Balai Besar POM di Jayapura
Menggandeng SAKA POM
Perketat Pengawasan
Pangan Jelang Natal dan
Tahun Baru 2025



Visitasi dalam Rangka
Persiapan Laboratorium
Regional Balai Besar POM di
Jayapura



Balai Besar POM di Jayapura
Gencarkan Intensifikasi
Pengawasan Pangan
Menjelang Natal dan Tahun
Baru 2025: Pastikan
Keamanan Pangan
Masyarakat Papua

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan Obat dan makanan yang beredar di Provinsi Papua aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat.

Tugas, fungsi, dan kewenangan UPT BPOM diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Besar POM di Jayapura hadir dan melayani agar masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Hal ini memiliki dampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. Cakupan wilayah yang harus diawasi oleh BBPOM di Jayapura dengan luas wilayah kurang lebih 420.540 km² yakni terdiri dari 20 kabupaten/kota (tahun 2020 - 2022), dan menjadi 17 Kabupaten/kota sejak tahun 2023 dengan adanya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dimana Provinsi Papua dipecah menjadi 3 (tiga) Provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2022; Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2022 ; dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2022

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Jayapura menghadapi tantangan dengan adanya kondisi demografi Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif, transportasi dan jaringan internet yang terbatas sehingga jangkauan KIE masih terbatas ke semua daerah/kabupaten namun telah dilakukan upaya semaksimal mungkin. Untuk merespon tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Jayapura berkolaborasi dengan lintas sektor seperti K/L, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, pelaku usaha dan masyarakat. Dengan adanya tantangan yang dihadapi menuntut Balai Besar POM di Jayapura untuk terus mencari solusi agar harapan masyarakat dapat terpenuhi serta melakukan

tugas dan fungsi pengawasan Obat dan makanan di seluruh Provinsi Papua.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan informasi kinerja yang jelas dan terukur, pemangku kepentingan (stakeholders) dapat memahami bagaimana sumber daya digunakan dan bagaimana keputusan diambil. Dengan demikian diharapkan laporan kinerja dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jayapura

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Besar POM di Jayapura (BBPOM di Jayapura) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berada di Provinsi Papua. Badan POM merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK). Tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

Melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan.

Dengan adanya Organisasi dan Tata Kerja (OTK), maka Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM dan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Papua. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua, Balai Besar POM di Jayapura semula menjadi Balai koordinator untuk Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di

Kabupaten Mimika. Namun, terhitung sejak Januari 2021 Loka POM di Kabupaten Mimika telah menjadi Loka mandiri sedangkan Loka POM di Kabupaten Merauke terhitung sejak Januari 2022.

Pada tahun 2022, terbentuk tiga provinsi baru yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua. Tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tersebut terdiri dari :

1. Provinsi Papua Selatan dengan ibukota Merauke terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. (terdapat UPT BPOM yaitu Loka POM di Merauke)
2. Provinsi Papua Tengah dengan ibukota Nabire terdiri dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai. (terdapat UPT BPOM yaitu Loka POM di Mimika)
3. Provinsi Papua Pegunungan dengan ibukota Jayawijaya terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga. (terdapat UPT BPOM yaitu Balai Besar POM di Jayapura)

Penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga kegiatan intelijen dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Area yang pengawasan BBPOM di Jayapura dengan luas wilayah kurang lebih 420.540 km² yakni semula terdiri dari 20 kabupaten/kota dengan adanya penambahan DOB baru menjadi 17 kabupaten/kota dimana Provinsi Papua Pegunungan masih masuk dalam wilayah pengawasan BBPOM di Jayapura.

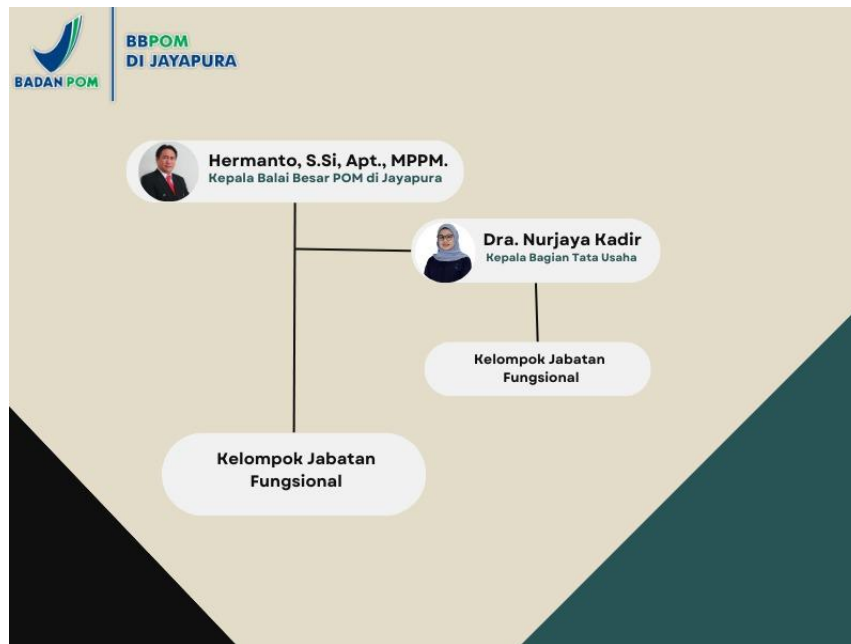
1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Melalui Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya melalui peraturan tersebut, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang

di lingkungan Badan POM, dimana unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 16 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Jayapura yang mengawal pencapaian 34 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

Adapun struktur organisasi Balai Besar POM di Jayapura sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jayapura

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan produk baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh BBPOM di Jayapura sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia

Obat (BKO) pada Obat Tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya (BB) pada produk makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan gempuran produk-produk dari luar ke dalam negeri semakin menuntut kesiapan masyarakat untuk bijak dalam memilih produk-produk yang aman untuk di konsumsi. Untuk itu BBPOM di Jayapura perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat secara intensif melalui penyebaran informasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang aman bagi kesehatan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, jalur distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut perlu diawasi oleh BBPOM di Jayapura.

Dalam mendukung program kerja Badan POM RI, BBPOM di Jayapura melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja BBPOM di Jayapura. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peredaran produk yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat juga turut membantu program kerja BBPOM di Jayapura.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura dipengaruhi oleh 2 faktor lingkungan strategis yaitu :

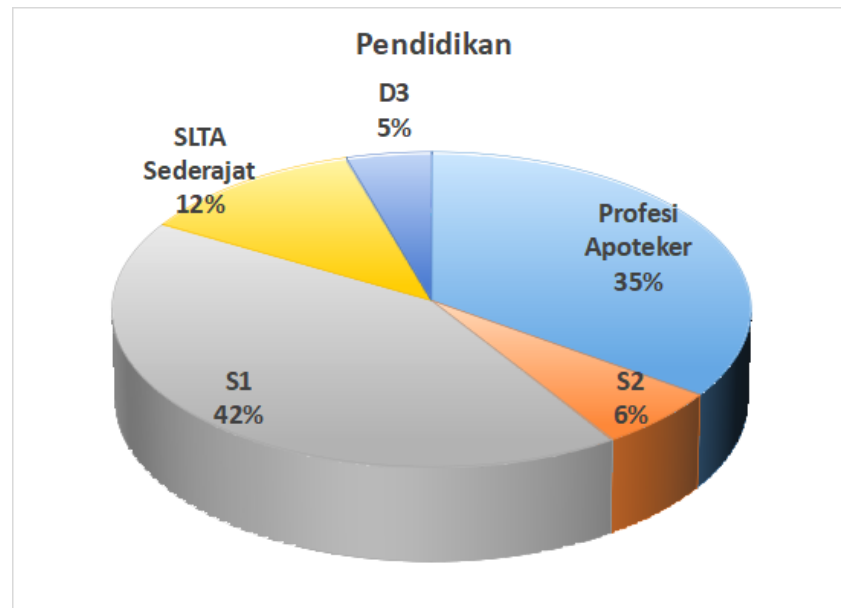
a. Lingkungan Internal

Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Jayapura bersumber dari APBN sesuai DIPA Petikan tahun 2024 No. SP DIPA-063.01.2.432985/2024 yang diterbitkan pada tanggal 25 Nopember 2023 sebesar Rp32.006.163.000 (tiga puluh dua milyar enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura telah didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten hanya saja masih kurang memadai dalam hal jumlah personil mengingat *catchment area* terdiri dari 17 Kabupaten/Kota hanya didukung oleh 66 orang personil (70% perempuan, 30% laki-laki) dengan komposisi sebagai berikut :



Gambar 1.2 Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura

Jumlah SDM Balai Besar POM di Jayapura tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN di lingkungan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2020-2024, Data SIASN Per 30 Desember 2024 kebutuhan SDM sebanyak 104 orang dengan jumlah pegawai eksisting saat ini 66 (enam puluh enam) orang. Persentase pemenuhan SDM BPOM sampai dengan saat ini 63.46%, masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 38 orang.

Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang kegiatan BBPOM di Jayapura. Saat ini gedung kantor BBPOM di Jayapura yang beralamat di Jalan Otonom Kotaraja Jayapura berdiri di lahan seluas 3960 m² dan bangunan dengan luas 3040 m². Seluruh fungsi baik layanan publik, laboratorium dan perkantoran di lakukan di gedung ini. Selain itu, BBPOM di Jayapura dilengkapi dengan fasilitas mobil keliling sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) unit mobil penyidikan.

b. Lingkungan eksternal

Kondisi Geografis

Balai Besar POM di Jayapura hadir dan melayani agar masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Hal ini memiliki dampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. Cakupan wilayah yang harus diawasi oleh BBPOM di Jayapura dengan luas wilayah kurang lebih 420.540 km² yakni terdiri dari 20 kabupaten/kota (tahun 2020 - 2022), dan menjadi 17 Kabupaten/kota sejak tahun

2023 dengan adanya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dimana Provinsi Papua dipecah menjadi 3 (tiga) Provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2022; Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2022 ; dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2022 . Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Jayapura menghadapi tantangan dengan adanya kondisi demografi Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif, transportasi dan jaringan internet yang terbatas.

Dari 17 kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah kerja BBPOM di Jayapura, hanya 4 kabupaten/kota yang mampu dijangkau melalui transportasi darat sedangkan sisanya hanya dapat ditempuh melalui transportasi udara.



Gambar 1.3 Catchment Area BBPOM di Jayapura, Loka POM di Kab. Mimika dan Loka POM di Kab. Merauke



Gambar 1.4 Peta Provinsi Baru Pemekaran dari Provinsi di Papua

1.4.2 PERMASALAHAN UTAMA

Balai Besar POM di Jayapura sebagai salah satu UPT BPOM yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Pada periode Renstra 2020-2024 pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jayapura telah diupayakan semaksimal mungkin. Namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua antara lain :

1. Masih ditemukan produk-produk yang Tidak Memenuhi Syarat antara lain produk Tanpa Ijin Edar (TIE), produk kedaluwarsa dan Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan.
2. Kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta hasil pengawasan belum terpublikasi kepada semua pemangku kepentingan, sehingga tingkat pemahaman masyarakat kepada Balai Besar POM di Jayapura belum optimal.
3. Penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, terdapat beberapa perkara yang berkaitan dengan distribusi obat seperti adanya sarana pelayanan obat yang tidak mempunyai penanggung jawab. Telah dilakukan beberapa kali pembinaan namun tidak dilakukan perbaikan sehingga dilanjutkan ke *pro justitia*. Serta adanya peredaran obat Psikotropika/Obat-obat Tertentu secara *online* semakin meningkatkan potensi penyalahgunaan obat dan penyebaran obat ilegal di wilayah Papua. Penjualan obat secara *online* ini biasanya menggunakan media seperti website mandiri, *e-commerce* dan media

sosial (*facebook, instagram*, dan jejaring sosial lainnya). Terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan obat – obatan secara *online* ini, antara lain sulitnya mengidentifikasi atau menelusuri pelaku pelanggaran karena menggunakan data fiktif atau identitas/alamat penjual dan pembeli tidak lengkap serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilih obat yang sesuai ketentuan.

4. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum dapat diperoleh dikarenakan masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, yaitu tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang belum sesuai saran walaupun sudah di tindak lanjuti, sehingga belum dapat diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN).

Isu Strategis:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Papua masih rendah (sumber BPS)
Berdasarkan rilis data BPS provinsi Papua Indeks Pembangunan Manusia untuk Provinsi Papua tahun 2024 adalah 73,83, hal ini terus membaik dari tahun sebelumnya yaitu 73,23 meski masih dibawah target nasional yaitu 75,02. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Masih rendahnya nilai IPM secara langsung akan berdampak pada upaya yang harus lebih optimal, lebih komperenshif dan secara kontiniu dalam mengedukasi dan menggerakkan masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya tentang Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Angka stunting yang tinggi
Berdasarkan data BKKN Penderita stunting di Provinsi Papua pada tahun 2023 masih tinggi, yakni di kisaran angka 34,6%. Salah satu penyebab utamanya adalah sangat kurangnya informasi tentang bagaimana pemberian asupan gizi dan pola hidup yang berkualitas bagi ibu hamil dan bayi. “Angka stunting di Papua masih tinggi dari target nasional di bawah 10 persen. *Stunting* merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa
3. Kondisi keamanan yang kurang kondusif pada beberapa kabupaten
Terjadinya gangguan keamanan pada beberapa kabupaten menyebabkan pengawasan langsung tidak dapat dilakukan di daerah tersebut. Terbatasnya jaringan internet membuat

jangkauan pengawasan secara *online* pun tidak dapat dilaksanakan serta informasi yang disebarluaskan melalui *online* tidak bisa dijangkau oleh masyarakat.

4. Daya saing UMKM yang masih rendah.

Produk pertanian, perikanan, hasil hutan yang melimpah seperti buah merah, ikan tuna, kopi, madu, sagu dan lain-lain memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan pangan, obat tradisional dan kosmetik. Hal ini mendorong BBPOM di Jayapura meluncurkan inovasi SAGU Papua (Siap dAmpinGi UMKM Papua) untuk membantu pelaku usaha dalam mendapatkan izin edar produk. Program ini juga untuk mensinkronisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Terbatasnya jumlah tenaga kefarmasian di Papua sebagai penanggung jawab pada industri Obat Tradisional, Kosmetik, menjadi kendala dalam pengurusan perizinan usaha. Masalah lain adalah masih rendahnya tingkat kesadaran karyawan dalam penerapan Cara Produksi yang Baik, baik dalam produksi pangan, kosmetik dan obat tradisional, membutuhkan upaya pendampingan dan pembinaan yang lebih intens.

5. Pengawasan Keamanan Obat

Dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat dari obat yang berisiko terhadap kesehatan, BBPOM di Jayapura melakukan pengawasan secara komprehensif sampai ke pelosok daerah. Pengawasan dilakukan terhadap sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, yang berfokus pada intensifikasi dan intervensi/pendampingan pengelolaan vaksin COVID-19 serta pengawasan *Anti Microbial Resistance* (AMR) di sarana pelayanan kefarmasian. Luasnya wilayah Provinsi Papua dan terbatasnya akses transportasi menyebabkan tidak semua sarana penyimpanan vaksin dan pelayanan vaksinasi, khususnya Puskesmas tidak dapat dijangkau. Terbatasnya suplai listrik pada beberapa daerah juga berpotensi mempengaruhi mutu vaksin yang beredar.

6. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi potensi dampak yang berisiko kepada kesehatan dan merugikan masyarakat yang mungkin timbul apabila obat JKN tidak terjamin mutunya, dimana kebutuhan obat yang sangat besar harus disuplai oleh fasilitas pelayanan kefarmasian tertentu, Balai Besar POM di Jayapura meningkatkan pengawasan berupa sampling dan pengujian obat JKN, serta pemeriksaan rutin pada sarana penyedia obat JKN. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa obat JKN yang beredar aman, bermutu dan bermanfaat.

7. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan merupakan dana yang diampu oleh Badan POM untuk dialokasikan ke daerah guna membiayai operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah. DAK Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan telah menjadi kebijakan dalam alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sejak

tahun 2020. DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan diberikan kepada Kabupaten/Kota sebagai stimulus untuk peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah pada pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada tahun 2024, 4 (empat) kabupaten/kota di Provinsi Papua menerima alokasi dana DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan yaitu Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 412.901.000,- Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 391.631.000,- Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar Rp. 414.021.000 dan Kota Jayapura sebesar Rp. 397.901.000,-

8. Cemarkan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dalam Sirup Obat

Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang diduga akibat senyawa Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dalam obat sirup telah menelan korban anak – anak yang meninggal dunia. Menanggapi isu tersebut, BPOM melakukan penelusuran berbasis risiko, sampling, dan pengujian secara bertahap terhadap produk obat sirup yang berpotensi mengandung cemarkan EG dan DEG. BBPOM di Jayapura sebagai salah satu UPT BPOM turut serta dalam melakukan sampling dan pengujian berupa pengembangan/verifikasi metode untuk pengujian EG dan DEG dalam sediaan sirup dan melakukan KIE terhadap tenaga kesehatan dan masyarakat untuk melaporkan efek samping obat kepada tenaga kesehatan terdekat atau melalui aplikasi layanan BPOM Mobile dan e-MESO Mobile, agar lebih waspada dan menggunakan produk obat yang terdaftar di BPOM yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian atau sumber resmi serta selalu ingat Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakan obat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

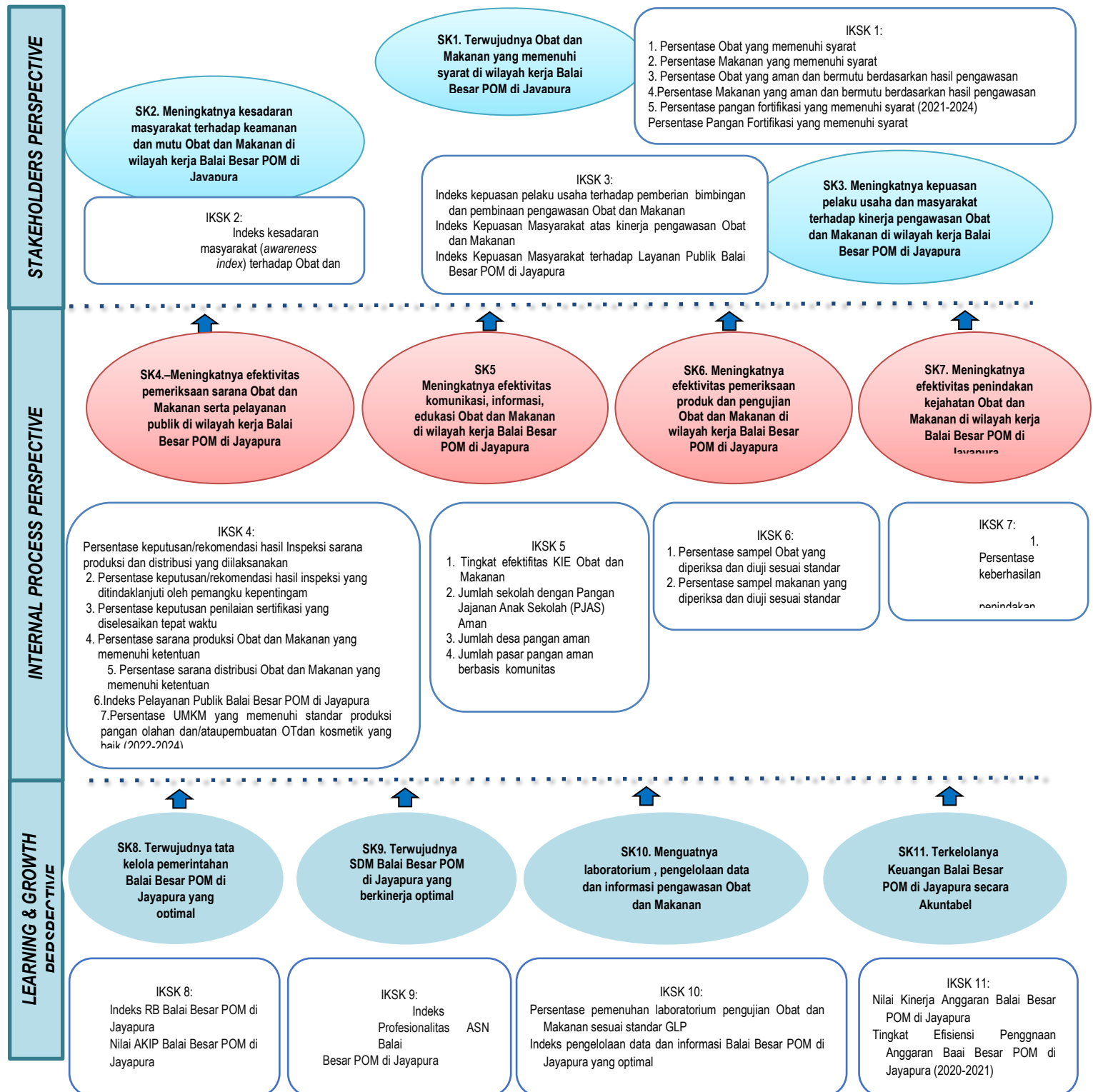
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka perlu didukung penguatan kelembagaan. Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis secara nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing produk dalam negeri. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan wujud nyata dari penguatan kelembagaan BPOM.

Bentuk penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh BPOM diawali dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM yang mengacu kepada Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Badan pengawas obat dan makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen SAKIP di tiap unit kerja dalam hal ini BBPOM di Jayapura utamanya terkait keselarasan antar dokumen SAKIP.

Sesuai tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan maka disusun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama agar tugas pengawasan dan pencapaiannya terukur secara jelas, akurat, faktual, dan prediktif. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai Balai Besar POM di Jayapura, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan diharapkan Balai Besar POM di Jayapura dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi Balai Besar POM di Jayapura, sebagai berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR POM DI JAYAPURA



Gambar 2.1. Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura

Adapun Sasaran Kegiatan yang disesuaikan dengan peta strategis OTK baru terdiri dari :

S.K.1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Balai Besar POM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertugas memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar di wilayah kerjanya memenuhi standar yang ditetapkan. Ini mencakup pengawasan terhadap obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target 93.5 di tahun 2024
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target 91 di tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 93.5 di tahun 2024
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 95.3 di tahun 2024
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target 97 di tahun 2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK1 yaitu :

- a) Evaluasi penandaan sampel yang dilakukan mengikuti petunjuk teknis evaluasi penandaan sampel;
- b) Peningkatan kompetensi petugas sampling dan penguji;
- c) Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman;
- d) Secepatnya melakukan pengadaan terkait ketersediaan reagen, media, suku cadang serta peralatan laboratorium;
- e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian secara berkala;
- f) Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) untuk melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha agar membuat produk obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan sesuai standar.

S.K.2

Meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan target 67.5 pada tahun 2024.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK2 yaitu :

- a) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan Aman melalui program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat maupun dalam program pemberdayaan masyarakat;
- b) Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik berupa perluasan cakupan wilayah dan target KIE maupun jenis media KIE;
- c) Peningkatan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan;
- d) Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

S.K.3

Meningkatkan Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 94.6 di tahun 2024
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target 73 di tahun 2024
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT dengan target 90.5 di tahun 2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK3 yaitu :

- a) Meningkatkan kompetensi petugas terkait materi bimbingan dan pembinaan yang diberikan;
- b) Pendampingan, bimbingan teknis, desk, dan sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha dijadwalkan secara rutin;
- c) Feedback yang cepat dan jelas dari petugas terhadap permintaan Informasi pelaku usaha;
- d) Melakukan publikasi kegiatan pengawasan dan KIE melalui media sosial dan subsite secara rutin;
- e) Membuat konten publikasi/edukasi bersama kader/komunitas yang diintervensi program keamanan pangan;
- f) Menambah ragam publikasi melalui media lain (videotron, talk show radio/televisi);
- g) Memberikan Sosialisasi standar layanan secara berkala melalui media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait layanan publik Balai Besar POM di Jayapura; h) Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik BBPOM di Jayapura.

S.K.4

Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jayapura mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 98 di tahun 2024
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 70 di tahun 2024
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 99.8 di tahun 2024
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 71.5 di tahun 2024
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 85 di tahun 2024
6. Indeks Pelayanan Publik dengan target sebesar 4.8 di tahun 2024
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik dengan target sebesar 81 di tahun 2024
8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan target sebesar 95 di tahun 2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK4 yaitu :

- a) Komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan lainnya;
- b) monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah dilakukan;
- c) Komunikasi dan koordinasi ke Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam memberikan respon, khususnya ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru secara berkala;
- d) komunikasi yang lebih intens dengan Dinas Kesehatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga (PIRT);
- e) Melakukan Pendampingan secara intens kepada pelaku usaha selama proses sertifikasi;
- f) Melakukan bimbingan teknis kepada pimpinan/penanggung jawab sarana yang akan disertifikasi sebelum pengajuan permohonan;
- g) Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi, pembinaan dan pengawasan secara berkala;
- h) Melakukan perbaikan dan peningkatan pada unit pelayanan publik seperti publikasi berbagai layanan yang dimiliki Balai Besar POM di Jayapura melalui media sosial, fasilitas pelayanan dan meningkatkan kompetensi petugas pelayanan;
- i) Melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan DAK non Fisik dan melaksanakan monev terhadap pelaksanaan DAK non Fisik.

S.K.5

Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Balai Besar POM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan berbagai upaya pengawasan obat dan makanan untuk memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan program pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, salah satunya kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 95.8 di tahun 2024
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target sebesar 88 di Tahun 2024
3. Jumlah desa pangan aman dengan target sebesar 22 di Tahun 2024
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan target sebesar 22 di Tahun 2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK5 yaitu :

- a) pemberian produk informasi keamanan pangan yang menarik dan khas BPOM;
- b) Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti antara lain workshop informasi dan komunikasi dan pelatihan teknis KIE;
- c) Melakukan pelaksanaan KIE melalui program KASBI dengan memberikan materi yang menarik dan mudah dipahami dan dibutuhkan masyarakat;
- d) Meminta komitmen pemda untuk mendukung keberlanjutan program PJAS aman, Desa pangan aman dan Pasar pangan aman berbasis komunitas;
- e) Membimbing Tim Keamanan Pangan Sekolah, perangkat desa, dan pengelola pasar dalam menyusun rencana aksi keberlanjutan program;
- f) meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, tim yang terlibat dalam mendukung program nasional.

S.K.6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan produk Obat dan Makanan dilakukan untuk menjamin keamanan mutu Obat dan Makanan. Obat yang dimaksud adalah obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen

kesehatan dan obat kuasi. Adapun sampel yang diperoleh yaitu sampel Obat dan Makanan meliputi sampel rutin, kasus dan sampel pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar dimana standar yang dimaksud yaitu standar pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 di tahun 2024
2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 di tahun 2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK6 yaitu :

- a) Koordinasi dengan Pusat terkait perubahan sampling, dimana sebagian sampel tidak ditemukan di sarana pada saat sampling; melakukan koordinasi secara internal terkait kepastian jumlah dan jenis sampel, dan ketersediaan reagen dan media pada laboratorium pengujian serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan UPT lain di lingkup regional V;
- b) secepatnya melakukan pengadaan terkait ketersediaan reagen, media, suku cadang serta peralatan laboratorium;
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam peningkatan efektivitas pemeriksaan dan pengujian sampel;
- d) Perbaikan dan peningkatan terhadap alat laboratorium yang rusak.

S.K.7

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jayapura melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK7 yaitu :

- a) Perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti:

1. FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor);
 2. Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan;
 3. Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BPOM;
- b) Peningkatan jejaring informasi dengan mengintensifkan peran informan perlu dioptimalkan sehingga dapat membantu meningkatkan potensi keberhasilan penindakan Obat dan Makanan

S.K.8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang Optimal

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Jayapura, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jayapura. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Indeks RB UPT dengan target sebesar 91.18 di tahun 2024
2. Nilai AKIP UPT dengan target sebesar 81.49 di tahun 2024
3. Nilai Pengelolaan kearsipan dengan target sebesar 92.79 di Tahun 2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK8 yaitu :

- a) Melaksanakan kegiatan rencana pembangunan ZI sesuai dengan rencana dan melakukan monev rencana aksi pembangunan ZI secara memadai dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan RATL per area perubahan serta menindaklanjuti hasil monev;
- b) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari Inspektorat Utama;
- c) Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan;
- d) Peningkatan kualitas SDM pengelola akuntabilitas.

S.K.9

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang Berkinerja Optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas UPT dengan target sebesar 91.08 di tahun 2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK9 yaitu :

- Melaksanakan pengembangan kompetensi baik pelatihan fungsional, pelatihan teknis, dan workshop/seminar yang diikuti oleh pegawai baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal (daring maupun luring), mandiri ataupun yang dikelola oleh PPSDM dan Balai Besar POM di Jayapura;
- Melakukan penilaian Sasaran Kinerja Program secara berkala dan tepat waktu;
- Melakukan komunikasi, koordinasi, dan pendampingan oleh Biro SDM Badan POM.

S.K.10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- Persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 83.7 di Tahun 2024
- Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dengan target sebesar 3 di tahun 2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK10 yaitu :

- pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan laboratorium, dan peningkatan kompetensi SDM sesuai rencana;
- monitoring evaluasi SKL secara berkala (triwulan) sehingga jika ada kendala pada pemenuhannya dapat segera ditangani;
- Percepatan pengisian SIPT baik pemeriksaan maupun pengujian, penggunaan email corporate dan upload berita-berita aktual secara konsisten serta pemeliharaan sarana dan prasarana IT;
- Meningkatkan kapasitas Alat Pengolah Data

S.K.11

Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Nilai Kinerja Anggaran UPT dengan Target sebesar 89.48 di Tahun 2024
2. Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa dengan target sebesar 70 di Tahun 2024
3. Nilai pengelolaan barang milik negara dengan target sebesar 85 di Tahun 2024
4. Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri dengan target sebesar 60 di Tahun 2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK11 yaitu :

- a) meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran
- b) Pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Periode 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (2021-2024)
	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura 7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik (2022-2024)
	Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman berbasis komunitas
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatkan kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang Optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura 2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura
			Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura
			Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
			Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel	- Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura - Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jayapura (2020-2021)

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang sesuai antara Renstra dan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran perlu dibuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024. RKT Tahun 2024 berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 disusun pada tanggal 31 Juli Tahun 2023.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.3
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.5
	Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	96
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88
	Jumlah desa pangan aman	22
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	22
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	75

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94.6
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70.01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura	92
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	90.8
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	87.2
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	85
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	95.3

Alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2024 sebesar **Rp. 32.006.163.000,-** akan tetapi pada Tahun 2024 terdapat blokir dan penarikan anggaran oleh Biro Perencanaan dan Keuangan serta blokir anggaran dalam rangka Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sesuai arahan Presiden RI sehingga pagu anggaran BBPOM di Jayapura menjadi **Rp.30.706.163.000,-**. Adapun anggaran kegiatan dalam DIPA berdasarkan sasaran strategis tahun 2024 yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT dengan DIPA sebesar Rp.778.332.000,-
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT dengan DIPA sebesar Rp.3.686.061.000,-
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke wilayah kerja UPT dengan DIPA sebesar Rp.2.213.316.000,-
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing -masing wilayah kerja UPT sebesar Rp.800.491.000,-
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT dengan DIPA sebesar Rp.820.367.000,-
6. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan DIPA sebesar Rp.16.598.443.000,-
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan dengan DIPA sebesar Rp.13.870.000,-

8. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan DIPA sebesar Rp.368.988.000,-
9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang Optimal dengan DIPA sebesar Rp.1.110.912.000,-
10. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal dengan DIPA sebesar Rp.311.336.000,-
11. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel dengan DIPA sebesar Rp.740.859.000,-

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2024 ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA BBPOM di Jayapura Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.32.006.163.000,- akan tetapi pada Tahun 2024 terdapat blokir dan penarikan anggaran oleh Biro Perencanaan dan keuangan serta blokir anggaran dalam rangka Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sesuai arahan Presiden RI, sehingga pagu anggaran BBPOM di Jayapura menjadi **Rp.30.706.163.000**. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2024 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Jayapura.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93.5
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.3
	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.8
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.5
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85
	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.8
	Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.8
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88
	Jumlah desa pangan aman	22
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	22
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83.7
	Indeks pengelolaan data dan informasi	3
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	67.5
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94.6
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	90.5
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB	91.18
	Nilai AKIP	81.49
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	92.79
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN	91.08
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	89.48
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	85
	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60

Pada Tahun 2024 indikator kinerja Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari 11 sasaran kegiatan dan 34 indikator kinerja yang terdapat di dalam perjanjian kinerja (PK) 2024.

Pada Tahun 2021 telah ditetapkan target indikator dalam Reviu Renstra yang terdiri dari 29 indikator kinerja. Kemudian pada bulan Juli Tahun 2023 dilakukan penyusunan RKT Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Target pada reviu Renstra, pada saat penyusunan RKT Tahun 2024 terdapat 3 target indikator yang mengalami perubahan yaitu Indeks Pelayanan Publik target pada Reviu renstra 4,6 berubah menjadi 4.5 di RKT, Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan target Reviu renstra 65 menjadi 82 di RKT, dan Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan target Reviu renstra 95 menjadi 94.6 di RKT. Pada Bulan Desember Tahun 2023 dilakukan penyusunan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2024 yang yang disusun berdasarkan data

yang ada di dalam RKT Tahun 2024, pada saat penyusunan PK Tahun 2024 beberapa indikator mengalami perubahan target setelah direviu oleh Biro Perencanaan dan keuangan, dan unit pengampu, adapun target yang mengalami perubahan yaitu:

Tabel 2.4 Perubahan Target pada Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Reviu Renstra	Target RKT Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Keterangan
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.3	92.3	93.5	Mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 dan berdasarkan perhitungan rata-rata realisasi tahun 2022 dan 2023, target 2024 direkomendasikan 93.5
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	86	91	Mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 maka target 2024 direkomendasikan 91
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.0	92	93.5	Mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 maka target 2024 direkomendasikan 93.5
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.0	88	95.3	Mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 dan hasil perhitungan rata-rata realisasi 2022 dan 2023, maka target 2024 direkomendasikan 95.3
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90	90	97	Target ditetapkan oleh unit pengampu
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	92	98	berdasarkan rata-rata realisasi dua tahun sebelumnya 98 maka target 2024 direkomendasikan sebesar 98
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61	61	70	Mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 maka target 2024 direkomendasikan 70
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97	97	99.8	Mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 maka target 2024 direkomendasikan 99.8
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	71.5	Mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 maka target 2024 direkomendasikan 71.5
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	85	85	
Indeks Pelayanan Publik	4.6	4.5	4.8	Target ditetapkan oleh unit pengampu
Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81	81	81	
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	95	
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	96	96	95.8	berdasarkan dari reviu target unit pengampu yang mengacu pada realisasi akhir tahun 2023 maka direkomendasikan untuk menggunakan target sesuai dengan target unit pengampu 95.8

Indikator Kinerja	Target Reviu Renstra	Target RKT Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Keterangan
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88	88	88	
Jumlah desa pangan aman	22	22	22	
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	22	22	22	
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	82	98	berdasarkan dari reviu target unit pengampu yang mengacu pada realisasi akhir tahun 2023 maka direkomendasikan untuk menggunakan target sesuai dengan target unit pengampu 98
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87	87	83.7	berdasarkan dari reviu target unit pengampu yang mengacu pada realisasi akhir tahun 2023 maka direkomendasikan untuk menggunakan target sesuai dengan target unit pengampu 83.70
Indeks pengelolaan data dan informasi	3	3	3	
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	75	75	67.5	Memepertimbangkan realisasi 2022 dan 2023 maka target akhir tahun 2024 direkomendasikan sebesar 67.5 sesuai dengan kenaikan realisasi tahun sebelumnya.
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	95	94.6	94.6	
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70.01	70.01	73	Mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 maka target 2024 direkomendasikan 73
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	92	92	90.5	Target ditetapkan oleh unit pengampu
Indeks RB Balai	90.8	90.8	91.18	Target ditetapkan oleh unit pengampu
Nilai AKIP	87.2	87.2	81.49	Target ditetapkan oleh unit pengampu
Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	92.79	
Indeks Profesionalitas ASN	85	85	91.08	berdasarkan dari reviu target unit pengampu yang mengacu pada realisasi akhir tahun 2023 maka direkomendasikan untuk menggunakan target sesuai dengan target unit pengampu 91.08
Nilai Kinerja Anggaran	95.3	95.3	89.48	Target ditetapkan oleh unit pengampu
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	70	
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	85	
Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	-	-	60	

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja per triwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian realisasi indikator kinerja BBPOM di Jayapura selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan/triwulan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Anggaran
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	0	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	391,975,000
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	0	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	99,252,000
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	103,500,000
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	116,388,000
	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	0	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	67,217,000
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	132,592,000
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1,020,000
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	7,650,000
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	125,179,000
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	506,560,000
	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	0	0	0	0	0	0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2,533,198,000
	Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4	10	12	20	30	45	52	60	70	80	90	81	81	81,892,000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Anggaran
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	22	22	22	22	30	40	40	75	76	77	95	297,970,000
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	0	0	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	94.1	95.8	95.8	214,081,000
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0	6	20	30	46	55	55	69	80	96	99.9	88	88	867,781,000
	Jumlah desa pangan aman	5	11	25	30	40	53.5	60	65	70	80	90	22	22	616,764,000
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1.5	9	25	48	60	63	70	76.5	83	90	90	22	22	514,690,000
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2.5	9.5	22	31	41.5	52.5	61	70.5	79	86.5	93.5	100	100	477,187,000
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	10	21.5	31.5	43	55.5	66.5	77	83.5	87.5	94.5	100	100	323,304,000
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	11.67	21.5	23	36	38.89	42	49	52.78	60.71	69.64	79.38	98	98	820,367,000
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.7	4,142,354,000
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12,456,089,000
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.5	13,870,000
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.6	179,564,000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Anggaran
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	23,988,000
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.5	165,436,000
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.18	873,311,000
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.49	40,943,000
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.79	196,658,000
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.08	311,336,000
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	0	5	40	50	60	70	70	72	75	75	80	89.48	89.48	13,246,000
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	11,181,000
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	26,086,---
	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	361,593,000

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan (target kinerja). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian perhitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja terdiri dari 2 macam tergantung pada angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Polarisasi *Maximize* yaitu apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Polarisasi *Minimize* Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{100 - \text{realisasi}}{100 - \text{target}} \times 100\%$$

Adapun status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

- a. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

- b. Predikat Capaian kinerja hasil perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	

- c. Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

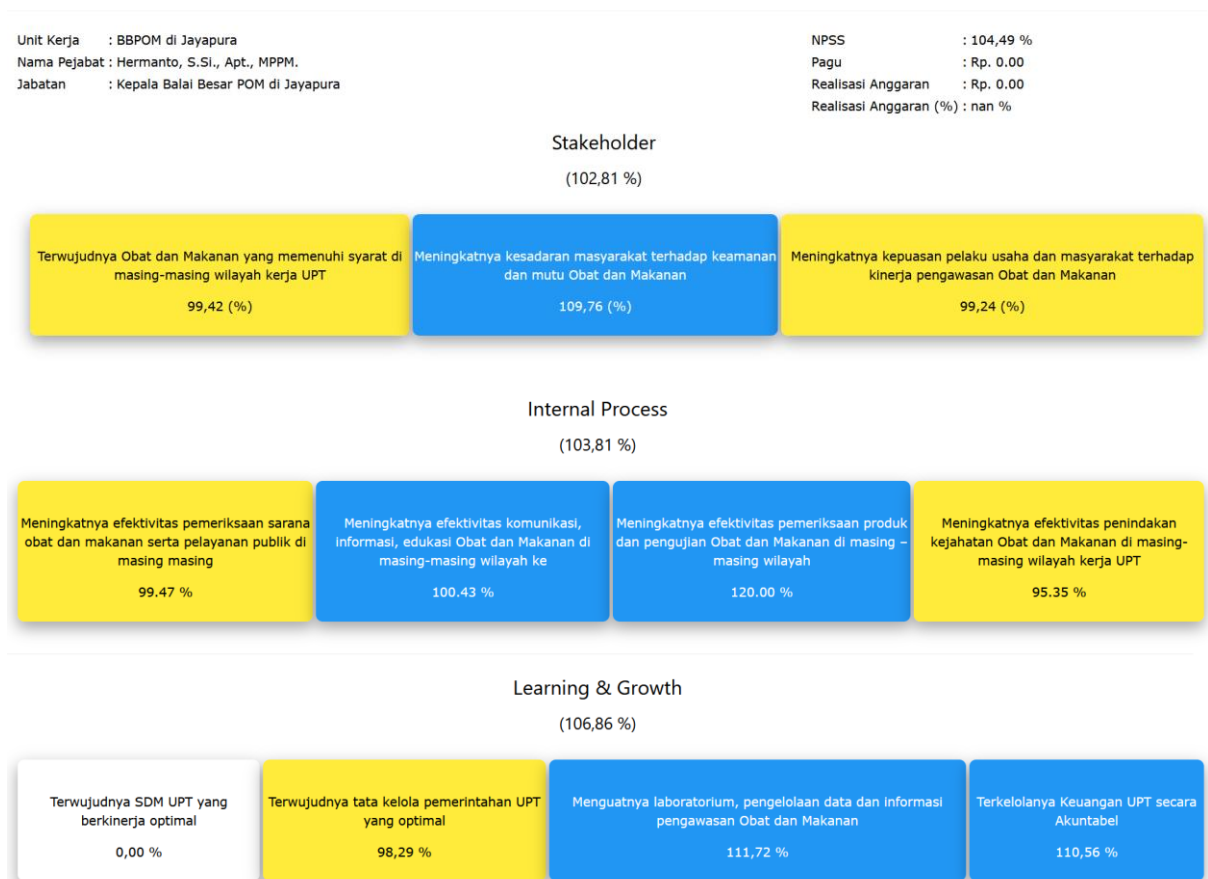
Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	<50	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja organisasi disajikan dari hasil pengukuran capaian kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar POM di Jayapura sebesar **104,49%** dengan predikat **"Istimewa"**.



Gambar 3.1 Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2024

Dari 11 sasaran kegiatan di atas dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) perspektif dari 3 perspektif yaitu perspektif *Stakeholder*, *Internal Process* dan *Learning and Growth* yang merupakan rata-rata persentase capaian dari masing-masing perspektif dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS

menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan, diperoleh NPS perspektif *Stakeholder* sebesar 102.81% dengan kriteria **Sangat Baik**, perspektif *Internal Process* sebesar 103.81% dengan kriteria **Sangat Baik** dan perspektif *Learning and Growth* sebesar 106.86% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor : PR.09.03.2.01.25.42 Hal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 dimana kedua indikator kinerja tersebut masuk dalam indikator kinerja yang dapat dikonversi yang mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM dimana realisasi yang diinput pada aplikasi Simetris (e-performance) adalah 120%. Indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dikonversi menjadi 120 yaitu persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal.

NPSS Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024 jika dibandingkan dengan NPSS Tahun 2023 ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3.2 Perbandingan NPSS BBPOM Jayapura Tahun 2023 dan 2024

NPSS Balai Besar POM di Jayapura tahun 2024 turun sebesar 0.80% jika dibandingkan NPSS tahun 2023. Dari 3 (tiga) NP, terdapat 2 (dua) NP mengalami kenaikan pada tahun 2024, yaitu NP Stakeholder naik sebesar 2,1% dan NP Learning & Growth naik sebesar 3,19%. Sedangkan untuk NP Internal Process turun sebesar 7,69%.

Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah berhasil mencapai target atas 11 sasaran strategis dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	99.42	Cukup
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	99.47	Cukup
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	100.43	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	100	Baik
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	95.35	Cukup
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	101.72	Sangat Baik
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	109.76	Sangat Baik
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	99.24	Cukup
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	98.29	Cukup
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	95.39	Cukup
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	114.48	Sangat Baik

Dari 11 sasaran strategis, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang mencapai kriteria Sangat baik, 1 (satu) sasaran strategis yang mencapai kriteria Baik dan 6 (enam) sasaran strategis dengan kriteria Cukup. Capaian sasaran strategis tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian sasaran strategis tahun 2023, diperoleh hasil seperti grafik di bawah ini:



Gambar 3.3 Perbandingan Sasaran Strategis BBPOM Jayapura Tahun 2023 dan 2024

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NSS 2023	106.53	105.05	100.93	120	120	116	93.75	101.86	97.12	106.96	94.28
NSS 2024	99.42	99.47	100.43	100	95.35	101.72	109.76	99.24	98.29	95.39	114.48

Terdapat 3 (tiga) NSS tahun 2024 yang naik dibandingkan tahun 2023, yaitu pada sasaran strategis:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan naik sebesar 16.01
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal naik sebesar 1.17
- Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara akuntabel naik sebesar 20.2

Terdapat 8 (delapan) NSS tahun 2024 yang turun dibandingkan tahun 2023, yaitu pada sasaran strategis:

- Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di masing-masing wilayah kerja UPT turun sebesar 7.11
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT turun sebesar 5.58
- Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT turun sebesar 0.5
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT turun sebesar 20
- Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT turun sebesar 24.65

- f) Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan turun sebesar 14.28
- g) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan turun sebesar 2.62
- h) Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal turun sebesar 11.57

Capaian kinerja Balai Besar POM di Jayapura dibandingkan dengan unit lain yang mempunyai beban kinerja setara yaitu Balai Besar POM di Palangkaraya, Balai Besar POM di Mataram, dan Balai Besar POM di Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Balai dalam Klaster 5

No	Sasaran Strategis	Capaian BBPOM Jayapura	Capaian BBPOM Palangkaraya	Capaian BBPOM Mataram	Capaian BBPOM Samarinda
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	99.42	96.42	103.89	101.80
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	99.47	102.48	103.59	101.47
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	100.43	100.07	102.80	100.77
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	100	100	100	100
5	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	99.24	101.47	99.97	100.77
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	109.76	105.83	101.40	100.20
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	95.35	100	100	100
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	98.29	97.59	98.93	99.54
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	95.84	95.83	95.39	95.72

10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	101.72	101.24	100.39	96.67
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	114.48	103.29	109.60	106

Dari tabel diatas, diperoleh perbandingan pencapaian kinerja sasaran strategis yaitu 1 (satu) sasaran strategis yang dicapai oleh Balai Besar POM di Jayapura dengan predikat “Baik”, 6 (enam) sasaran strategis dengan predikat “Cukup”, dan 4 (empat) sasaran strategis dengan predikat “Sangat Baik”. Balai Besar POM di Palangkaraya 2 (dua) sasaran strategis dengan predikat “Baik”, 3 (tiga) sasaran strategis dengan predikat “Cukup”, dan 6 (enam) sasaran strategis dengan predikat “Sangat Baik”. Balai Besar POM di Mataram memperoleh 2 (dua) sasaran strategis yang dicapai dengan predikat “Baik”, 6 (enam) sasaran strategis dengan predikat “Sangat Baik” dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan predikat “Cukup”. Balai Besar POM di Samarinda memperoleh 2 (dua) sasaran strategis dengan kriteria “Baik”, 6 (enam) sasaran strategis dengan predikat “Sangat Baik”, dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan predikat “Cukup”.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau kinerja organisasi terdapat 34 indikator kinerja dari 11 sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura, diantaranya 18 indikator dinyatakan “Sangat Baik” capaiannya berkisar antara 100.01%-115.52%, 6 (enam) indikator dinyatakan “Baik” capaiannya 100%, 8 (delapan) indikator dinyatakan “Cukup” capaiannya berkisar antara 79.44%-95.39%, dan 2 (dua) indikator dinyatakan “Tidak Dapat Disimpulkan” capaiannya 127.41%-135.71%.

Adapun capaian dari 34 indikator kinerja utama Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5	94.42	100.98
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	83.33	91.57
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93.5	93.51	100.01
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.3	96.67	101.44
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97	100	103.09
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	100	102.04
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	89.19	127.41
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.8	100	100.20

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.5	76	106.29
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	85.61	100.72
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.8	4.83	100.63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81	70	86.42
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	75.47	79.44
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.8	97.43	101.70
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88	88	100
		Jumlah desa pangan aman	22	22	100
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	22	22	100
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	93.44	95.35
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83.7	86.58	103.44
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	100
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	67.5	74.09	109.76
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94.6	96.49	102
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73	68.7	94.11
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura	90.5	91.96	101.61
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	91.18	86.9	95.31
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	81.49	76.95	94.43
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	92.79	97.56	105.14
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	91.08	86.88	95.39
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	89.48	90.31	100.93
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	95	135.71
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	85	98.19	115.52
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	63.48	105.8

3.1.1. Sasaran Strategis I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di masing-masing wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 5 (lima) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan pertama ini. Berdasarkan kelima indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran strategis I diperoleh rata-rata capaian sebesar 99.42% dengan kriteria **Cukup**. Capaian indikator di Sasaran Strategis I didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp. 778.332.000,-**

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024

Kode SS	Sasaran strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5	94.42	100.98	Sangat Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	83.33	91.57	Cukup
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93.5	93.51	100.01	Sangat Baik
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.3	96.67	101.44	Sangat Baik
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97	100	103.09	Sangat Baik

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang memenuhi syarat dibagi dengan sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017) dan obat Kuasi (UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT

penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi : 1) tidak memiliki Nomor Izin Edar /TIE termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar), 2) produk kedaluwarsa, 3) produk rusak, 4) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Penandaan, 5) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1) hingga poin 5). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1) akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2) dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5). Jika sampel merupakan sampel TIE, kedaluwarsa atau rusak maka pengujian tidak dilakukan. Sebaliknya apabila sampel memiliki izin edar, tidak kedaluwarsa atau tidak rusak namun TMK penandaan maka sampel tetap diuji. Jika sampel Obat TIE atau rusak atau kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung sebagai 1 (satu) sampel TMS.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5	94.42	100.98	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada Tahun 2024 adalah 94.42% dari target 93.5% dengan capaian 100.98% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Obat yang memenuhi syarat	2020	80.8	83.07	102.81
	2021	83.6	81.42	97.39
	2022	86.6	93.64	108.13
	2023	90.0	93.36	103.73
	2024	93.5	94.42	100.98

Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023, namun realisasi tersebut sudah mencapai target.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dengan Balai yang setara Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Samarinda. Sedangkan terhadap target nasional (94.75%) BBPOM di Jayapura dan BBPOM Samarinda belum mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Mataram dan BBPOM di Palangkaraya telah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Obat meliputi komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Perhitungan sampel Obat acak yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari aplikasi Simetris dimana aliran data dari SIPT berdasarkan data sampel yang diinput disertai dengan evaluasi penandaannya yang selanjutnya dilakukan pengujian dan dilaporkan melalui SIPT. Sampai dengan bulan Desember sebanyak 1003 sampel Obat yang disampling kemudian diperiksa dan diuji sesuai standar. Sampel Obat tersebut terdiri atas 336 sampel Obat, 434 sampel Kosmetik, 163 sampel Obat Tradisional, 14 sampel Obat Kuasi dan 56 sampel Suplemen Kesehatan. Jumlah sampel Obat acak/random yang selesai diperiksa dan diuji sesuai standar sebanyak 1003 sampel terdiri dari 947 sampel (94,43%) yang Memenuhi

Syarat. Sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 56 sampel (5,57%) terdiri dari 3 TMS komoditi Obat, 13 TMS komoditi Obat Tradisional, 1 TMS komoditi Obat Kuasi, 1 TMS komoditi Suplemen Kesehatan dan 38 TMS komoditi Kosmetik.

Sampel TMS terdiri dari TMK Penandaan dan TMS hasil uji. Dari 56 sampel Obat yang dinyatakan TMS, 46 sampel diantaranya disebabkan oleh TMK penandaan yang didominasi oleh sampel Kosmetik sebanyak 35 sampel. TMK Penandaan pada komoditi Kosmetik antara lain tidak mencantumkan nomor bets pada kemasan primer, produk mencantumkan klaim dilarang, mencantumkan klaim berlebihan, produk ternotifikasi namun tidak mencantumkan nomor notifikasi, produk mencantumkan logo BPOM, tidak mencantumkan nama dan alamat lengkap pemilik notifikasi, serta belum mencantumkan 2D barcode sedangkan pada komoditi Obat Tradisional, TMK Penandaan meliputi klaim khasiat yang tertera pada kemasan yang disampling tidak sesuai dengan klaim khasiat pada kemasan yang disetujui, belum mencantumkan peringatan/perhatian, dan komposisi pada kemasan yang disampling tidak sama dengan komposisi pada kemasan yang disetujui.

Sementara itu, TMS hasil uji disebabkan oleh TMS hasil uji mikrobiologi dan TMS hasil uji kimia. TMS hasil uji mikrobiologi berupa parameter Angka Lempeng Total (ALT) pada sampel Kosmetik dan Obat Tradisional sedangkan TMS hasil uji kimia meliputi TMS uji disolusi pada sampel obat, TMS Pewarna Merah K3 dan TMS Kimia Penetapan Kadar Metanol terhadap Etanol pada sampel Kosmetik.

Dalam hal sampel kosmetik memberikan jumlah sampel TMS paling besar yang disebabkan oleh TMK penandaan, hal ini dikarenakan pada proses notifikasi kosmetik tidak terdapat tahapan evaluasi label/penandaan untuk memastikan label/penandaan yang digunakan sesuai dengan ketentuan. Hal ini menyebabkan pelaku usaha kosmetik menggunakan label/penandaan sesuai dengan keinginan tanpa memperhatikan aturan dan ketentuan yang ada. Evaluasi penandaan label kosmetik dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk teknis dan Surat Edaran dari Direktorat Pengawasan Kosmetik. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dari direktorat pengawasan kosmetik dalam menindaklanjuti hasil pengawasan penandaan yang tidak memenuhi ketentuan.

Dalam pencapaian target ini, secara tidak langsung dipengaruhi juga oleh kelancaran proses pengujian itu sendiri mulai dari proses sampling, pengiriman ke Laboratorium, pengujian dan pelaporan hasil pengujian melalui SIPT. Terkait proses pengujian hal - hal seperti kerusakan alat *microwave* yang merupakan komponen dari instrumen Spektrofotometer Serapan Atom yang digunakan untuk pengujian parameter logam berat pada sampel kosmetik. Untuk mengatasi hal tersebut telah diupayakan untuk perbaikan alat dan pembelian suku cadang serta pengujian ke BBPOM di Makassar sehingga pengujian dapat dilakukan kembali dan

tidak terjadi *carry over*. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk melakukan pengujian sampel di UPT lain ketika terdapat kendala pada instrumen yang digunakan untuk melakukan pengujian di Balai Besar POM di Jayapura.

Tindak lanjut rekomendasi dari triwulan sebelumnya adalah telah dilakukan koordinasi dengan UPT dalam Region Makassar sehingga penginputan SIPT tidak melewati tahun berjalan, monitoring dan evaluasi sampling serta penginputan ke dalam SIPT telah dilakukan sesuai Pedoman Sampling dan *timeline*.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

1. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan sampling dan evaluasi penandaan sampel.
2. Berkoordinasi dengan balai region untuk dapat tepat waktu menginput data di SIPT dan selalu melakukan monitoring data di SIPT.
3. Melakukan pemeliharaan alat secara berkala.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Perencanaan yang telah disusun, pelaksanaan sampling dan pengujian serta monitoring evaluasi yang telah dilakukan sesuai Pedoman Sampling.
2. Melakukan evaluasi penandaan sampel Obat sesuai dengan Petunjuk Teknis, Surat Edaran terbaru serta hasil evaluasi pelaporan penandaan dari Direktorat terkait.
3. Penginputan dan pengiriman data sampel dan hasil uji dilakukan segera dan *real time*.
4. Ketersediaan alat, reagen dan suku cadang yang memadai. Perlu upaya perbaikan dan pembelian ketika terjadi kerusakan.
5. Berkoordinasi dengan BBPOM di Makassar untuk dapat melakukan pengujian parameter logam berat di Laboratorium Pengujian di BBPOM di Makassar.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5	94.42	100.98	391.975.000	390.736.158	99.68	0.01	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah 99.68% yaitu dari alokasi anggaran Rp391.975.000 telah direalisasikan sebesar Rp.390.736.158, selama tahun 2024

Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dengan capaian sangat Baik. Dari segi capaian kinerja telah mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran yang disediakan 99.68% telah direalisasikan artinya capaian output dan input (anggaran) telah efisien.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang memenuhi syarat dibagi dengan sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Adapun kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi: 1) tidak memiliki Nomor Izin Edar /TIE termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar), 2) produk kedaluwarsa, 3) produk rusak, 4) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) label, 5) Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1) hingga poin 5). Makanan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1) akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2) dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5).

Jika sampel merupakan sampel TIE, kedaluwarsa atau rusak maka pengujian tidak dilakukan. Sebaliknya apabila sampel memiliki izin edar, tidak kedaluwarsa atau tidak rusak namun TMK penandaan maka sampel tetap diuji. Jika sampel Makanan TIE atau rusak atau kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung sebagai 1 (satu) sampel TMS.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	83.33	91.57	Cukup

Realisasi indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada Tahun 2024 adalah 83.33 dari target 91 dengan capaian 91.57 dengan kriteria **Cukup**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	2020	78	78.49	100.63
	2021	78.5	85.17	108.29
	2022	82	82.19	100.23
	2023	84	89.12	106.10
	2024	91	83.33	91.57

Realisasi kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun sempat mengalami kenaikan di tahun 2023. Berbagai upaya tetap dilakukan dalam mempertahankan pencapaian indikator ini dengan melakukan pemeriksaan penandaan/label dan pengujian sampel.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (86%) BBPOM di Jayapura belum mencapai target nasional sedangkan BBPOM Mataram, BBPOM Samarinda, dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Perhitungan sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari aplikasi Simetris dimana aliran data dari SIPT berdasarkan data sampel yang diinput disertai dengan hasil evaluasi penandaannya yang selanjutnya dilakukan pengujian dan dilaporkan melalui SIPT. Sampai dengan bulan Desember sebanyak 420 sampel Makanan yang disampling kemudian diperiksa dan diuji sesuai standar. Dari 420 sampel tersebut terdapat 350 sampel yang Memenuhi Syarat (83,33%) dan 70 sampel Tidak Memenuhi Syarat (16,67%). Dari 70 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdapat 46 sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan penandaan dan 26 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat hasil pengujian laboratorium. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel yang Tidak Memenuhi Syarat sebagian besar disebabkan oleh TMK Penandaan. TMK Penandaan pada komoditi pangan disebabkan oleh ketidaksesuaian antara label yang digunakan pada produk dengan label yang disetujui pada saat pendaftaran. Ketidaksesuaian tersebut antara lain: tidak terdapat 2D barcode pada fisik produk, tidak mencantumkan nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, komposisi dan berat bersih yang berbeda. Sementara itu, TMS hasil uji disebabkan oleh TMS hasil uji mikrobiologi dan TMS hasil uji kimia. TMS hasil uji mikrobiologi berupa parameter Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka Kapang Khamir sedangkan TMS hasil uji kimia meliputi parameter HMF dan enzim Diastase pada produk madu.

Jumlah sampel makanan yang TMK penandaan lebih banyak dibandingkan dengan sampel yang TMS hasil pengujian mengindikasikan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memahami bahwa label/penandaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) atau Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang menentukan mutu dan keamanan produk secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pembinaan secara terus menerus untuk memastikan pelaku usaha menerapkan seluruh aspek CPPOB atau CPPB-IRT termasuk aspek label penandaan.

Pada proses registrasi makanan terdapat proses evaluasi label yang diajukan, sehingga pelaku usaha telah mengetahui label yang sesuai dan disetujui. Berdasarkan hal tersebut, idealnya tidak ada produk makanan dengan label yang TMK. Namun pada kenyataannya masih terdapat label penandaan yang TMK yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara label penandaan yang disetujui dengan label penandaan yang digunakan. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan pelaku usaha dalam menerapkan aturan dan ketentuan yang ada dalam hal ini terkait dengan label dan penandaan. Adapun TMS hasil uji disebabkan oleh proses produksi yang tidak sesuai dengan kaidah CPPOB atau CPPB-IRT. Hal ini

mengindikasikan rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB atau CPPB-IRT.

Diantara sampel yang TMS terdapat sampel yang diproduksi oleh pelaku usaha makanan yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura. Sampel TMS tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan. Sampel TMS tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan. Pembinaan dan pengawasan secara terus menerus perlu dilakukan untuk memastikan pelaku usaha memperbaiki penerapan CPPOB atau CPPB - IRT di sarana produksinya sehingga pelaku usaha dapat memproduksi produk yang bermutu dan aman.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

1. Melakukan evaluasi penandaan sampel makanan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan hasil evaluasi pelaporan penandaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sarana produksi makanan yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kaidah CPPOB atau CPPB-IRT sehingga produk yang dihasilkan adalah produk yang bermutu dan aman.
3. Melakukan monitoring evaluasi sampling dan input SIPT agar sesuai Pedoman Sampling dan timeline.
4. Melakukan koordinasi secara intens dengan Balai penguji regionalisasi.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Perencanaan yang telah disusun, pelaksanaan sampling dan pengujian serta monitoring evaluasi yang telah dilakukan sesuai Pedoman Sampling.
2. Melakukan evaluasi penandaan sampel pangan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan hasil evaluasi pelaporan penandaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
3. Melakukan koordinasi dengan UPT dalam Region Makassar terkait jadwal pengiriman sampel yang telah disepakati bersama
4. Penginputan dan pengiriman data sampel dan hasil uji dilakukan segera dan *real time*.

Namun kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini masih kurang maksimal sehingga target belum dapat dicapai. Oleh karena itu perlu adanya upaya peningkatan terutama terkait pengawasan dan pembinaan terhadap sarana produksi makanan yang ada di wilayah kerja

Balai Besar POM di Jayapura untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kaidah CPPOB atau CPPB-IRT.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	83.33	91.57	99.252.000	99.232.455	99.98	-0,08	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah 99.98 % yaitu dari alokasi anggaran Rp.99.252.000,- direalisasikan sebesar Rp.99.232.455. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan capaian Cukup. Dari segi capaian kinerja belum mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran yang disediakan hampir seluruhnya direalisasikan. Artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada Indikator ini belum efisien.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang memenuhi syarat dibagi dengan sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017) dan obat Kuasi (UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi : 1) tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar), 2) produk kedaluwarsa, 3) produk rusak, 4) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Penandaan, 5) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan pengujian.

Terhadap sampel yang tidak memiliki NIE atau kedaluwarsa atau rusak maka tidak dilakukan pengujian terhadap sampel tersebut. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan maka sampel tetap diuji.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93.5	93.51	100.01	Sangat Baik

Realisasi indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 adalah 93.51 dari target 93.5 dengan capaian 100.01 dengan kriteria Sangat Baik.

A. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2020	81	86.6	106.92
	2021	87	80.45	92.47
	2022	90	92.96	103.29
	2023	91	93.18	102.40
	2024	93.5	93.51	100.01

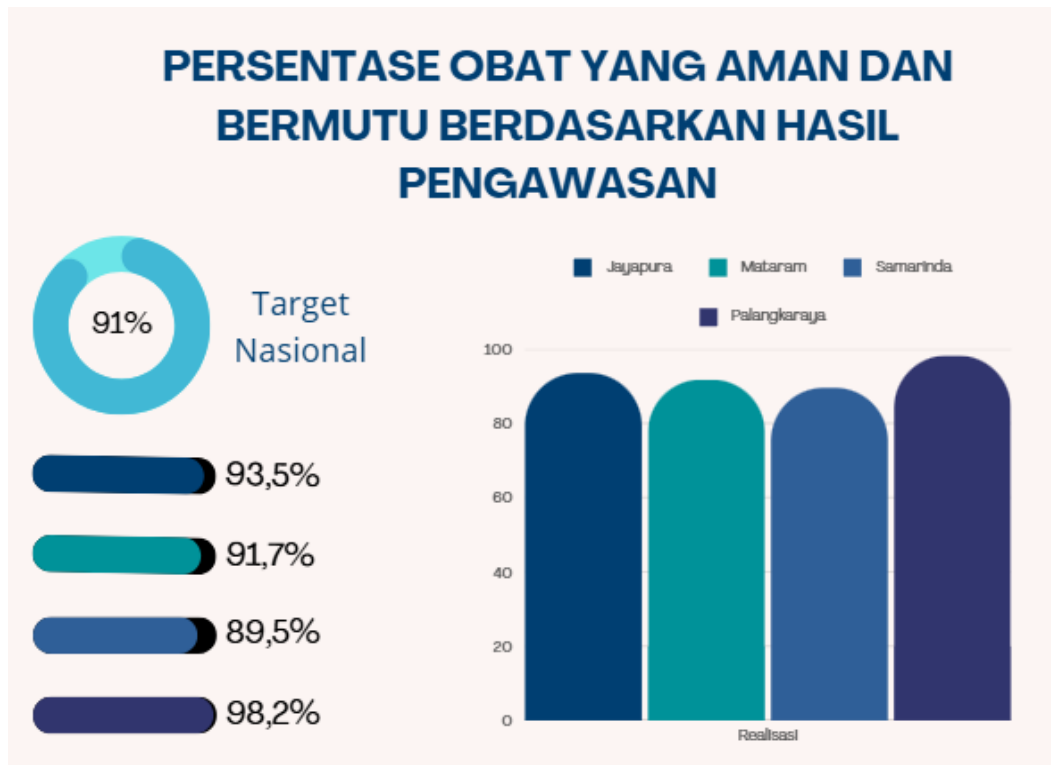
Capaian indikator pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, namun terhadap realisasi kinerja mengalami kenaikan dari tahun 2020.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93.5	93.51	100.01	Tercapai/Melampaui 

Realisasi indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 telah mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Terdapat kenaikan target tahun 2024 dari dokumen RKT yang sudah ditetapkan dibandingkan dengan PK 2024 yang telah direviu berdasarkan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 yaitu 92 menjadi 93.5.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Samarinda. Sedangkan terhadap target nasional (91%) BBPOM di Jayapura, BBPOM Mataram, dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional, sedangkan BBPOM di Samarinda belum mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Obat meliputi komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Perhitungan sampel Obat targeted yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari aplikasi Simetris dimana aliran data dari SIPT berdasarkan data sampel yang diinput disertai dengan evaluasi penandaanya yang selanjutnya dilakukan pengujian dan dilaporkan melalui SIPT. Sampai dengan bulan Desember sebanyak 370 sampel Obat yang disampling kemudian diperiksa dan diuji sesuai standar. 370 sampel Obat tersebut terdiri dari 80 sampel Obat, 186 sampel Kosmetik, 70 sampel Obat Tradisional, 6 sampel Obat Kuasi dan 24 sampel Suplemen Kesehatan. Jumlah Obat targeted yang selesai diperiksa dan diuji sebanyak 370 sampel terdiri dari 364 sampel (93,51%) yang Memenuhi Syarat. Sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 24 sampel (6,49%) terdiri dari 7 TMS komoditi Obat Tradisional, 1 TMS komoditi Suplemen Kesehatan dan 16 TMS komoditi Kosmetik.

Sampel TMS terdiri dari TMK Penandaan dan TMS hasil uji, dari 24 sampel TMS 21 sampel diantaranya adalah TMK penandaan dan 3 sampel TMS hasil uji. Hal ini menunjukkan TMK penandaan memberikan kontribusi yang sangat besar pada persentase sampel TMS dengan yang didominasi oleh sampel Kosmetik sebanyak 16 sampel dan Obat Tradisional sebanyak 7 sampel. TMK Penandaan pada sampel kosmetik antara lain kemasan primer tidak mencantumkan bets dan produk mencantumkan klaim dilarang sedang pada sampel obat tradisional, TMK penandaan seperti belum mencantumkan 2D barcode dan tidak mencantumkan cara penyimpanan. Untuk sampel TMS hasil uji yaitu TMS hasil uji mikrobiologi yaitu Angka Lempeng Total (ALT) dan angka *Enterobacteriaceae*

Dalam hal sampel kosmetik memberikan jumlah sampel TMS paling besar yang disebabkan oleh TMK penandaan, hal ini dikarenakan pada proses notifikasi kosmetik tidak terdapat tahapan evaluasi label/penandaan untuk memastikan label/penandaan yang digunakan sesuai dengan ketentuan. Hal ini menyebabkan pelaku usaha kosmetik menggunakan label/penandaan sesuai dengan keinginan tanpa memperhatikan aturan dan ketentuan yang ada. Evaluasi penandaan label kosmetik dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk teknis dan Surat Edaran dari Direktur Pengawasan Kosmetik. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dari direktorat pengawasan kosmetik dalam menindaklanjuti hasil pengawasan penandaan yang tidak memenuhi ketentuan.

Dalam pencapaian target ini secara tidak langsung dipengaruhi juga oleh kelancaran proses pengujian itu sendiri mulai dari proses sampling, pengiriman ke Laboratorium, pengujian dan pelaporan hasil pengujian melalui SIPT. Terkait proses pengujian hal - hal seperti kerusakan alat *microwave* yang merupakan komponen dari instrumen Spektrofotometer Serapan Atom yang digunakan untuk pengujian parameter logam berat pada sampel kosmetik. Untuk mengatasi hal tersebut telah diupayakan untuk perbaikan alat dan pembelian suku cadang serta pengujian ke BBPOM di Makassar sehingga pengujian dapat dilakukan kembali dan tidak terjadi *carry over*. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk melakukan pengujian sampel di UPT lain ketika terdapat kendala pada instrumen yang digunakan untuk melakukan pengujian di Balai Besar POM di Jayapura.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

1. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan sampling serta input SIPT evaluasi penandaan sampel
2. Melakukan pemeliharaan alat secara rutin

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Melakukan evaluasi penandaan sampel sesuai dengan Petunjuk Teknis, Surat Edaran terbaru serta hasil evaluasi pelaporan penandaan dari Direktorat terkait.
2. Memonitoring pelaksanaan pengujian baik di BBPOM di Jayapura maupun di Balai regional
3. Berkoordinasi dengan BBPOM di Makassar untuk dapat melakukan pengujian parameter logam berat di Laboratorium Pengujian di BBPOM di Makassar.
4. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan sampling serta input SIPT evaluasi penandaan sampel.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93.5	93.51	100.01	103,500,000	103.251.700	99.76	0.00	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah 99.76% yaitu dari alokasi anggaran Rp.103.5000.000 direalisasikan sebesar Rp.103.251.700. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja telah melebihi target dan dari sisi alokasi anggaran realisasi hampir terealisasi sepenuhnya. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran atau output lebih kecil dari input. Artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang memenuhi syarat dibagi dengan sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah

yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika pangan atau kemasan pangan yang diuji Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.3	96.67	101.44	Sangat Baik

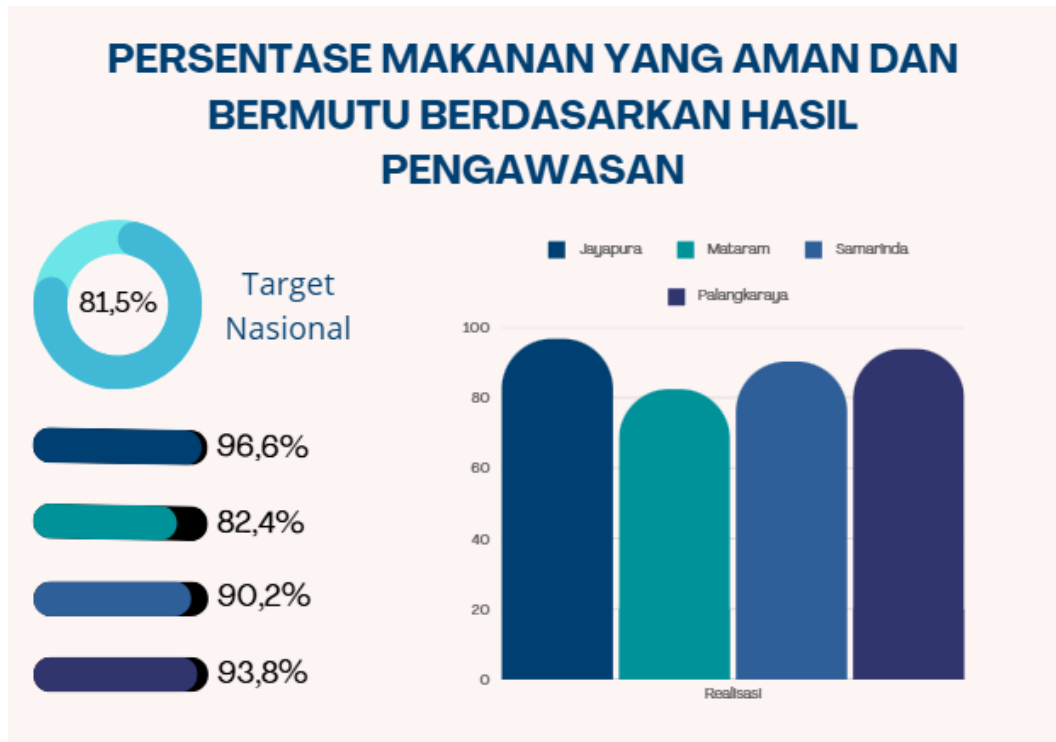
Realisasi indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Tahun 2024 adalah 96.67 dari target 95.3 dengan capaian 101.44 dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2020	66	79.23	120.04
	2021	85	89.34	105.11
	2022	86	92.96	108.09
	2023	87	95.12	109.33
	2024	95.3	96.67	101.44

Capaian indikator pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, namun terhadap realisasi kinerja mengalami kenaikan dari tahun 2020.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Jayapura dan yang terendah BBPOM di Mataram. Sedangkan terhadap target nasional (81.5%) BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Samarinda sudah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Perhitungan sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari aplikasi Simetris dimana aliran data dari SIPT berdasarkan data sampel yang diinput disertai dengan hasil evaluasi penandaannya yang selanjutnya dilakukan pengujian dan dilaporkan melalui SIPT. Sampai dengan triwulan IV, sebanyak 120 sampel Makanan yang disampling kemudian diperiksa dan diuji sesuai standar. Dari 120 sampel tersebut, sebanyak 116 sampel (96,67%) Memenuhi Syarat dan sebanyak 4 sampel Tidak Memenuhi Syarat (3,33%). Sampel yang Tidak Memenuhi Syarat disebabkan karena TMS Hasil Uji yaitu untuk hasil uji mikrobiologi untuk parameter Angka Kapang Khamir (AKK) dan Angka Lempeng Total (ALT). TMS hasil uji dapat disebabkan oleh proses produksi yang tidak sesuai dengan kaidah Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) atau Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dalam hal ini aspek higiene dan sanitasi. Hal ini

mengindikasikan rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB atau CPPB-IRT.

Sampel yang TMS terdapat sampel yang diproduksi oleh pelaku usaha makanan yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura. Sampel TMS tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan. Pembinaan dan pengawasan secara terus menerus perlu dilakukan untuk memastikan pelaku usaha memperbaiki penerapan CPPOB atau CPPB - IRT di sarana produksinya sehingga pelaku usaha dapat memproduksi produk yang bermutu dan aman.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Melakukan monitoring dan evaluasi oleh fungsi pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel yang sudah diinput ke dalam SIPT dan segera menyelesaikan entry data apabila terdapat sampel yang belum diinput atau dikirim agar sesuai Pedoman Sampling dan timeline.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain :

1. Melakukan evaluasi penandaan sampel makanan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan hasil evaluasi pelaporan penandaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sarana produksi makanan yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kaidah CPPOB atau CPPB-IRT sehingga produk yang dihasilkan adalah produk yang bermutu dan aman.
3. Perencanaan yang telah disusun, pelaksanaan sampling dan pengujian serta monitoring evaluasi yang telah dilakukan sesuai Pedoman Sampling
4. Penginputan dan pengiriman data sampel dan hasil uji dilakukan segera dan *real time* (sesuai timeline)

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.3	96.67	101.44	116.388.000	116.324.986	99.95	0.01	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah 99.95% yaitu dari alokasi anggaran Rp.116.388.000 direalisasikan sebesar Rp.116.324.986. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja telah melebihi target dan dari sisi alokasi anggaran telah sepenuhnya terealisasi. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran atau output lebih besar dari input. Artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan sebagian. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Cara perhitungan persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat adalah jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dibagi dengan jumlah total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97	100	103.09	Sangat Baik

Realisasi indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Tahun 2024 adalah 100 dari target 97 dengan capaian 103.09% dengan kriteria **Sangat Baik**.

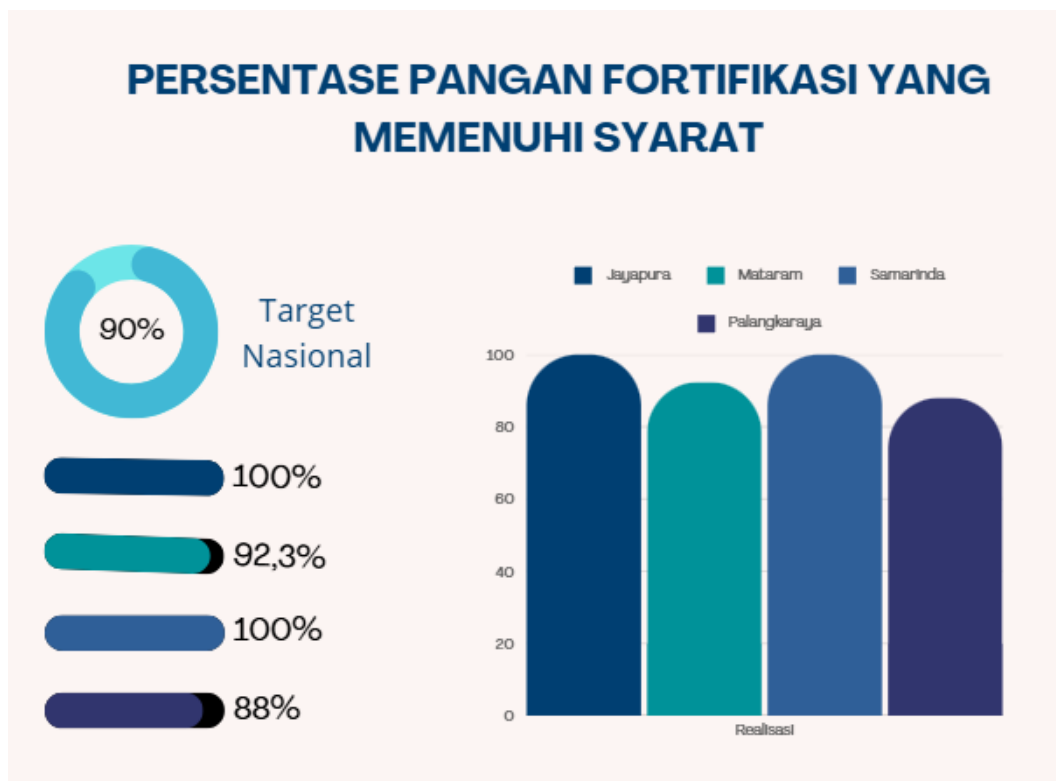
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
	2020	-	-	-

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	2021	88	94.17	107.01
	2022	89	86.40	97.08
	2023	90	100	111.11
	2024	97	100	103.09

Pada tahun 2020 belum terdapat indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat sehingga belum dapat dibandingkan. indikator ini ada pada saat reviu Renstra 2020-2024 yang dilaksanakan pada tahun 2021. Capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2021 dan 2023 tetapi mengalami kenaikan dari tahun 2022.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangkaraya adalah 100 dan BBPOM di Mataram dengan realisasi 92.3 telah mencapai target nasional (90). Sedangkan untuk BBPOM di Samarinda belum mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Perhitungan sampel Fortifikasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari aplikasi Simetris dimana aliran data dari SIPT berdasarkan data sampel yang diinput disertai dengan hasil evaluasi penandaannya yang selanjutnya dilakukan pengujian dan dilaporkan melalui

SIPT. Sampling fortifikasi garam dilakukan di bulan Maret (triwulan I tahun 2024) sebanyak 20 sampel, sampel minyak goreng sawit sebanyak 20 sampel disampling pada bulan April (triwulan II tahun 2024), sampel tepung terigu sebanyak 20 sampel pada bulan Agustus (triwulan III tahun 2024).

Keberhasilan pencapaian target ini dipengaruhi oleh kepatuhan pelaku usaha makanan untuk memastikan mutu produk dalam hal ini penambahan zat fortifikan ke dalam produk, pemilihan kemasan dan proses pengemasan yang mampu menjaga fortifikan dari kemungkinan kerusakan yang disebabkan oleh lingkungan selama proses distribusi dan penyimpanan serta memastikan kondisi penyimpanan di sarana distribusi mampu menjaga mutu produk sehingga kadar fortifikan yang ada dalam produk tetap sesuai persyaratan pada saat diterima konsumen. Hal ini tidak terlepas dari peran Badan POM dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha makanan baik ditingkat produksi maupun distribusi dan retail.

Mengingat tidak terdapat produsen pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura maka pengawasan dan pembinaan dilakukan kepada pelaku usaha makanan yang bergerak di bidang distribusi dan retail makanan agar memperhatikan kondisi penyimpanan produk untuk menjaga produk tetap bermutu hingga di tangan konsumen.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Melakukan monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian secara berkala serta terus memelihara komunikasi yang efektif antara fungsi pemeriksaan dan pengujian. Selain itu pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha juga tetap dilakukan untuk memastikan mutu produk tetap terjaga selama proses distribusi dan penyimpanan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat adalah

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sampel fortifikasi dilakukan sesuai perencanaan sampling dan pedoman pengujian sampel fortifikasi.
2. Pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam proses pendistribusian dan penyimpanan produk.
3. Komunikasi efektif yang dibangun antara fungsi pemeriksaan dan pengujian.
4. Monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian secara berkala termasuk penginputan data sampel melalui SIPT beserta evaluasi label/penandaan sampel fortifikasi.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97	100	103.09	67,217,000	66.940.496	99.59	0.04	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan adalah 99.59% yaitu dari alokasi anggaran Rp.67.217.000 direalisasikan sebesar Rp.66.940.496. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dengan capaian Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja telah melebihi target dan dari sisi alokasi anggaran telah sepenuhnya terealisasi. Capaian kinerja atau output lebih besar dari pada capaian input (anggaran) artinya pelaksanaan kegiatan pada indikator ini sudah efisien.

3.1.2. Sasaran Strategis II– Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 8 (delapan) indikator kerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua ini. Berdasarkan kedelapan indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran strategis II diperoleh rata-rata capaian sebesar 99.47% dengan kriteria **Cukup**. Capaian indikator di Sasaran Strategis II didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.3.686.061.000,-**, Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024

Kode SS	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	Persentase keputusan rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	100	102.04	Sangat Baik

pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase Keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	89.19	127.41	Tidak dapat disimpulkan
	Persentase penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.8	100	100.20	Sangat Baik
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.5	76	106.29	Sangat Baik
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	85.61	100.72	Sangat Baik
	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.8	4.83	100.63	Sangat Baik
	Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81	70	86.42	Cukup
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	75.47	79.44	Cukup

Adapun penjelasan tabel di atas sebagai berikut :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

- b) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- c) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- d) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan adalah $(a+b+c+d)$ dibagi 4 (empat). Adapun 4 komponen tersebut, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	100	102.04	Sangat Baik

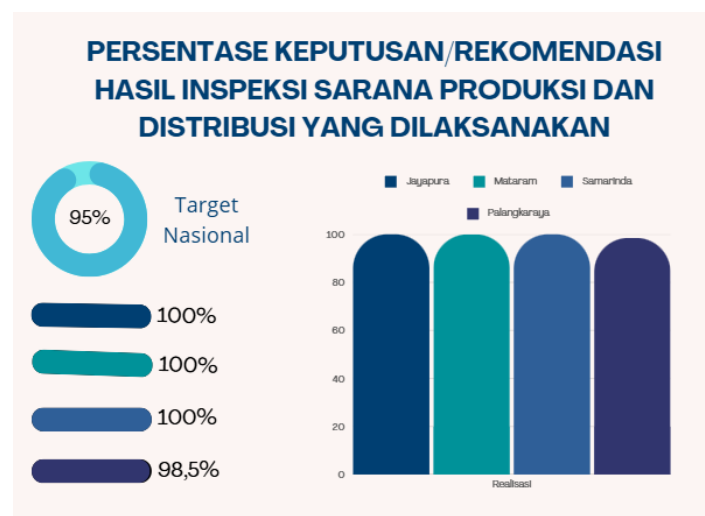
Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah 100 dari target 98 dengan capaian 102.04% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2020	87	89.73	103.14
	2021	89	95.77	107.61
	2022	90	98.08	108.98
	2023	91	97.83	107.51
	2024	98	100	102.04

Capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020-2023 namun realisasi naik dari tahun 2020-2023.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja balai lain yang setara dengan target nasional



Berdasarkan gambar diatas, BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, BBPOM di Samarinda, dan BBPOM di Palangkaraya telah mencapai target nasional (95%).

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 188 keputusan/ rekomendasi dari 188 keputusan/rekomendasi yang diterima yang terdiri dari:

1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT adalah tindak lanjut sebanyak 148 dari 148 (100%) rekomendasi terdiri dari komoditi obat, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan
2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT adalah tindak lanjut sebanyak 35 dari 35 (100%) rekomendasi terdiri dari komoditi Obat Tradisional, Kosmetik dan pangan.
3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain sebanyak 1 dari 1 (100%) rekomendasi yang diterbitkan yang terkait dengan komoditi pangan.
4. Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebanyak 4 dari 4 rekomendasi yang diterima (100%) yang terkait dengan komoditi pangan.

Pada tahun 2024. keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT seluruhnya sudah ditindaklanjuti oleh petugas dengan segera melaksanakan rekomendasi hasil inspeksi sarana yang tidak Memenuhi Syarat. Begitu pula halnya dengan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh pusat, dan rekomendasi dari pemangku kepentingan semuanya sudah ditindaklanjuti oleh petugas. Sementara itu, rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT juga telah ditindaklanjuti oleh Pusat / UPT lain.

Tercapainya target indikator ini didukung oleh upaya proaktif dan terus menerus yang meliputi komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Badan POM, UPT lain dan pemangku kepentingan lainnya serta monitoring dan evaluasi internal terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah dilakukan setiap bulan.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens kepada Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di dukung oleh:

1. Komunikasi dan koordinasi yang intens kepada Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut pengawasan.
2. Monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	100	102.04	132,592,000	132,485,586	99.92	0.02	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 99.92% yaitu dari alokasi anggaran Rp.133.592.000 direalisasikan sebesar Rp.132.485.586. Selama Tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan capaian Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran atau output lebih besar dari input. Artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini terserap dengan baik dan sudah efisiensi.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar) baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi Obat dan Makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/pencabutan ijin/ pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, dan saryanfar),

hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan. Perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu $(a+b)$ dibagi 2 (dua).

Komponen indikator terdiri dari:

- Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha dikalikan dengan 100%.
- Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	89.19	127.41	Tidak dapat disimpulkan

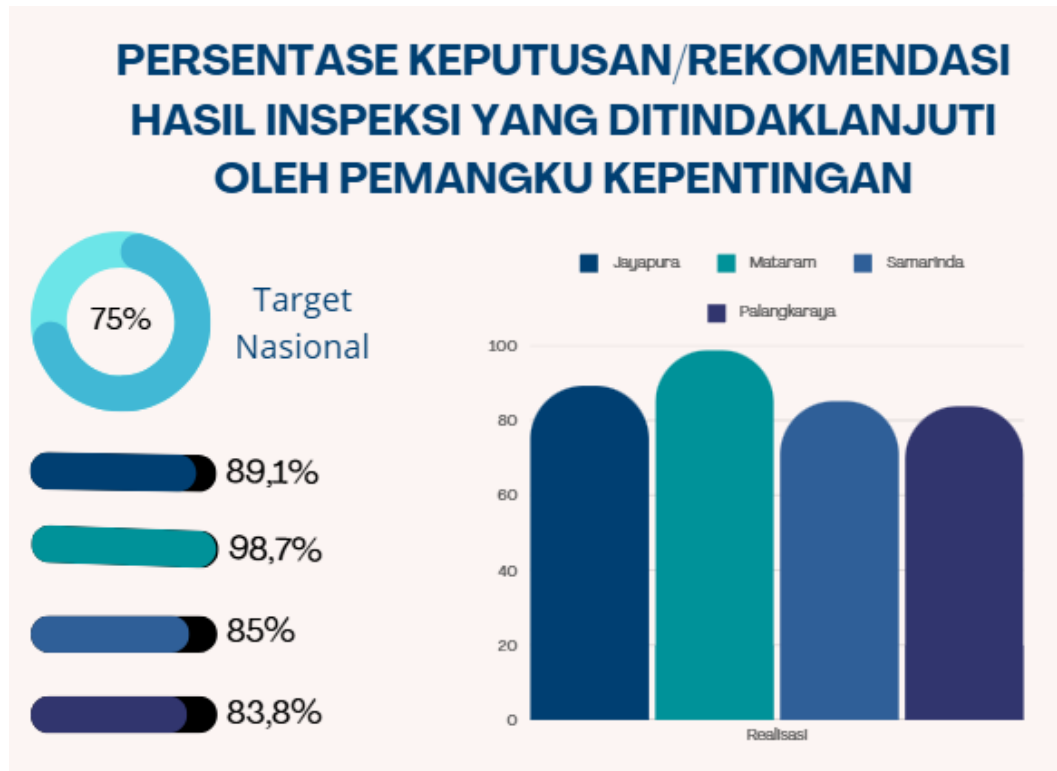
Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Tahun 2024 adalah 89.19 dari target 70 dengan capaian 127.14% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	2020	55	46.98	85.42
	2021	55	64.39	117.07
	2022	57	58	101.75
	2023	59	69.67	118.08
	2024	70	89.19	127.41

Realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2023.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja balai lain yang setara dengan target nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Mataram dan yang terendah BBPOM di Palangkaraya . Sedangkan terhadap target nasional (75%) BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Samarinda sudah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2024 adalah 117 tindak lanjut dari 149 rekomendasi yang diterbitkan terdiri dari :

1. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 116 tindak lanjut dari 148 rekomendasi yaitu komoditi obat, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan.
2. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebanyak 1 tindak lanjut dari 1 rekomendasi yaitu untuk komoditi obat .

Pada Tahun 2024 persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam hal ini pelaku usaha berbeda – beda untuk setiap bulannya hal ini dipengaruhi oleh intensitas dan efektivitas komunikasi petugas dengan pelaku usaha terkait perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi hasil inspeksi yang diberikan, respon aktif pelaku usaha serta komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Komunikasi yang intens dan efektif antara petugas dengan pelaku usaha menjadi faktor penting yang menyebabkan tingginya respon pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil inspeksi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jayapura. Realisasi dari kegiatan ini adalah 89.19 melebihi target yang ditetapkan sebesar 70. Peran penting petugas juga terlihat melalui pemastian setiap surat tindak lanjut yang dikirim telah diterima oleh sarana melalui pengiriman surat elektronik bagi pimpinan/penanggung jawab sarana mengingat sebagian daerah tidak memiliki akses/kantor pos yang memungkinkan fisik surat (*hardcopy*) tindak lanjut tersebut dapat diterima. Disamping itu, faktor lainnya adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas hasil pemeriksaan yang juga merupakan hasil dari pembinaan oleh petugas baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media komunikasi kepada pelaku usaha. Selanjutnya, komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota dalam membantu memantau perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ada di wilayah kerjanya menjadi faktor pendukung dalam capaian target indikator ini.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan lintas sektor dan pelaku usaha terkait tindak lanjut / perbaikan hasil inspeksi serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan oleh lintas sektor dan pelaku usaha. Koordinasi dan komunikasi yang lebih intens terutama perlu dilakukan secara berkala terutama kepada lintas sektor yang belum optimal dalam memberikan respon khususnya ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru yang saat ini hal tersebut belum maksimal dilakukan karena kondisi keamanan yang belum kondusif.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian kinerja dipengaruhi oleh :

- Melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan lintas sektor dan pelaku usaha terkait tindak lanjut / perbaikan hasil inspeksi .

- Monitoring evaluasi secara rutin terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan oleh lintas sektor dan pelaku usaha.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	89.19	127.41	1,020,000	1.020.000	100	0.27	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 100% yaitu dari alokasi anggaran Rp.1.020.000 direalisasikan sebesar Rp.1.020.000. Selama Tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan capaian Tidak Dapat Disimpulkan. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran atau output lebih besar dari input. Artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini terserap dengan baik dan sudah efisien.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
3. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
4. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
5. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
6. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong

- Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).
7. Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.
 8. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
 9. Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
 10. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
 11. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
 12. Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.

Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan di tahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan $n+1$.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.8	100	100.20	Sangat Baik

Realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2024 adalah 100 dari target 99.8 dengan capaian 100.20% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	2020	85	92	108.24
	2021	92	100	108.70
	2022	94	100	106.38
	2023	95	99.76	105.01
	2024	99.8	100	100.20

Realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2023, namun realisasi tahun 2024 meningkat pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja balai lain yang setara dengan target nasional



Berdasarkan gambar diatas, BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, BBPOM di Samarinda, dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional (97%).

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Sampai dengan bulan Desember, keputusan penilaian sertifikasi yang telah diselesaikan sebanyak 210 sertifikat atau rekomendasi dari 210 jumlah pemohon antara lain rekomendasi sertifikat CDOB sebanyak 10 rekomendasi, sertifikat IP CPPOB sebanyak 8 sertifikat, hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi IP CPPOB terhadap produsen pangan olahan sebanyak 7

sertifikat, hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran sebanyak 2 sertifikat, dan sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga sebanyak 183 sertifikasi.

Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian kinerja indikator ini telah dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi baik sebelum pengajuan maupun setelah pengajuan sertifikasi. Pendampingan sebelum pengajuan dilakukan dengan menyampaikan tata cara pengajuan sertifikasi dan kelengkapan dokumen yang diperlukan sehingga pada saat pengajuan tidak ada kekurangan dokumen yang belum dilengkapi pelaku usaha. Pendampingan setelah pengajuan dilakukan dengan memberikan saran dan masukan pada saat pembuatan dokumen perbaikan atas hasil audit maupun hasil evaluasi dokumen. Selain itu petugas juga berupaya untuk menyelesaikan setiap tahapan sertifikasi sesuai dengan timeline yang ditetapkan bahkan diupayakan sesegera mungkin untuk melakukan audit, evaluasi dokumen dan evaluasi CAPA sehingga keputusan penilaian sertifikasi dapat segera diterbitkan. Pendampingan dilakukan baik secara langsung melalui tatap muka di kantor BBPOM di Jayapura atau dengan memanfaatkan fasilitas Mall Pelayanan Publik (MPP) maupun secara tidak langsung melalui aplikasi whatsapp dan google meet berupa konsultasi dan desk CAPA. Meskipun petugas telah berupaya untuk melakukan pendampingan dan melakukan setiap tahapan sertifikasi sesuai timeline yang ditetapkan, namun penerbitan rekomendasi atau sertifikat terkadang mengalami kendala dari sisi pelaku usaha. Kendala tersebut berupa lamanya waktu yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas hasil audit maupun hasil evaluasi dokumen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait proses sertifikasi yang diajukan. Kendala ini diatasi dengan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam memahami proses sertifikasi yang diajukan dan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan hasil temuan audit sertifikasi.

Untuk sertifikasi berupa sertifikat hasil pengujian untuk sampel pihak ketiga, proses pengujiannya mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan sampel rutin sehingga sertifikat hasil uji dapat diterbitkan sesuai dengan timelinenya. Prioritas yang diberikan kepada sampel pihak ketiga ini menyebabkan penyelesaian pengujian sampel rutin mengalami keterlambatan disebabkan terbatasnya sumber daya baik personil maupun peralatan.

Dalam pencapaian target renstra tahun 2024 dilakukan upaya peningkatan capaian indikator ini yaitu pendampingan selama proses sertifikasi, selain itu juga akan dilakukan bimbingan teknis kepada pimpinan/penanggung jawab sarana yang akan disertifikasi sebelum pengajuan permohonan sehingga pada saat audit ketidaksesuaian yang ditemukan tidak terlalu banyak.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Meningkatkan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi baik sebelum maupun pada saat pengajuan sertifikasi untuk mempercepat proses sertifikasi yang nantinya akan mendukung kegiatan usaha para pelaku usaha.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian kinerja antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi secara berkala pada pertemuan bimtek, pelatihan, sosialisasi,dll.
3. Pendampingan secara intens kepada pelaku usaha selama proses sertifikasi.
4. Percepatan pengujian sampel pihak ketiga sesuai dengan timeline

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.8	100	100.20	7,650,000	7,650,000	100	0.002	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 100% yaitu dari alokasi anggaran Rp.7.650.000 direalisasikan sebesar Rp.7.650.000. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan capaian Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada capaian input (anggaran), artinya pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah terlaksana dengan baik dan sudah efisien.

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada :

- 1) Peraturan BPOM No.19 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan bahan Obat.
- 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
- 3) Peraturan Badan POM No.19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.
- 4) Keputusan Kepala Badan POM NO. HK.02.01.1.2.05.20.166 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 5) SOP Makro

Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area*. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif. Perhitungan nilai persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.5	76	106.29	Sangat Baik

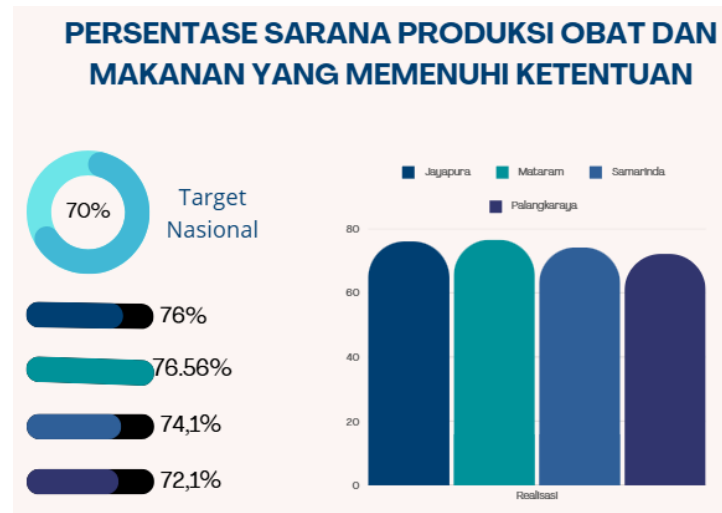
Realisasi indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2024 adalah 76 dari target 71.5 dengan capaian 106.29 dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2020	46	48.75	105.98
	2021	55	53.49	97.25
	2022	60	66.20	110.33
	2023	65	70.83	108.97
	2024	71.5	76	106.29

Realisasi kinerja indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan naik dari tahun 2020 hingga 2024 dan capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 namun target masih tetap tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Mataram dan yang terendah BBPOM di Palangkaraya. Sedangkan terhadap target nasional (70%) BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Samarinda sudah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pemeriksaan terhadap sarana produksi yang dilakukan adalah terhadap Industri Pangan sebanyak 25 sarana dengan hasil 18 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 7 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 49 sarana dengan hasil 39 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 10 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sebanyak 1 sarana dengan hasil TMK. Sarana produksi yang hasil pemeriksaannya masih Tidak Memenuhi Ketentuan diantaranya belum memenuhi aspek hygiene dan sanitasi serta aspek dokumentasi

Perhitungan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan diperoleh dari aplikasi Simetris dimana aliran data dari SIPT berdasarkan data inspeksi yang diinput pada bulan tersebut kemudian dilaporkan melalui SIPT.

Pemeriksaan sarana produksi diperiksa berdasarkan kajian risiko, sehingga sarana yang belum memenuhi ketentuan menjadi prioritas utama untuk diperiksa, juga untuk sarana yang belum melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dari pemeriksaan sebelumnya. Sarana produksi

yang TMK adalah sarana yang terakhir diperiksa tahun 2022 dan 2023 yang Tidak memenuhi ketentuan persyaratan higiene dan sanitasi baik bangunan, peralatan dan personil sehingga perlu dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. Upaya pembinaan kepada pelaku usaha dilakukan monitoring dan evaluasi dengan melihat perbaikan yang sudah ditindaklanjuti.

Realisasi kegiatan ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 76 dari target 71.5. Terjadi peningkatan realisasi kegiatan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 yang mencapai 70.83, Peningkatan realisasi secara tidak langsung menunjukkan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan kaidah cara produksi yang baik dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan hasil dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Jayapura dalam mengawal penerapan kaidah cara produksi yang baik oleh pelaku usaha serta pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan.

Dalam pencapaian target renstra tahun 2024 upaya yang dilakukan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi yang terus dilakukan untuk memastikan konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan kaidah Cara Produksi yang Baik. Fungsi pemeriksaan Balai Besar POM di Jayapura melakukan pendampingan intensif kepada sarana-sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan agar tidak ada temuan yang berulang pada pemeriksaan tahun depan, sehingga sarana-sarana tersebut tersebut dapat Memenuhi Ketentuan. Selain itu sinergisme dengan Dinas Kesehatan Kabupaten adalah upaya lain yang dilakukan seperti koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Biak terkait pengawalan pelaksanaan DAK Non Fisik BPOM Tahun Anggaran 2024 khususnya kepada sarana Industri Rumah tangga Pangan.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Melakukan komunikasi dan koordinasi intensif kepada lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan, pembinaan berkelanjutan terkait penerapan cara produksi yang baik dan pendampingan dalam perbaikan hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha di bidang produksi Obat dan Makanan serta monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah

1. Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas sehingga pelaku usaha lebih memahami kaidah cara produksi yang baik yang kemudian meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kaidah cara produksi yang baik.
2. Komunikasi dan koordinasi intensif kepada lintas sektor dan pelaku usaha terkait tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha.
4. Kompetensi petugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi yang terus meningkat sehingga pembinaan pelaku usaha dalam memahami kaidah Cara Produksi yang baik dilakukan lebih komprehensif dan pendampingan dalam perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan dilakukan lebih efektif dan efisien.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.5	76	106.29	125,179,000	125,179,000	100	0.06	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 100% yaitu dari alokasi anggaran Rp.125.179.000 direalisasikan sebesar Rp.125.179.000. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan capaian sangat baik. Dari segi capaian kinerja telah mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran yang disediakan telah seluruhnya direalisasikan. Artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini telah terlaksana dengan baik dan sudah efisien.

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi yang terdiri dari sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- a) Per BPOM No. 19 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan bahan Obat.
- b) Peraturan BPOM No.21 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
- c) Peraturan Badan POM No.19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.

- d) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.02.02.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
- e) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.2.05.20.166 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- f) Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No. B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Sarana Distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area*. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

Perhitungan nilai persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dibagi dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	85.61	100.72	Sangat Baik

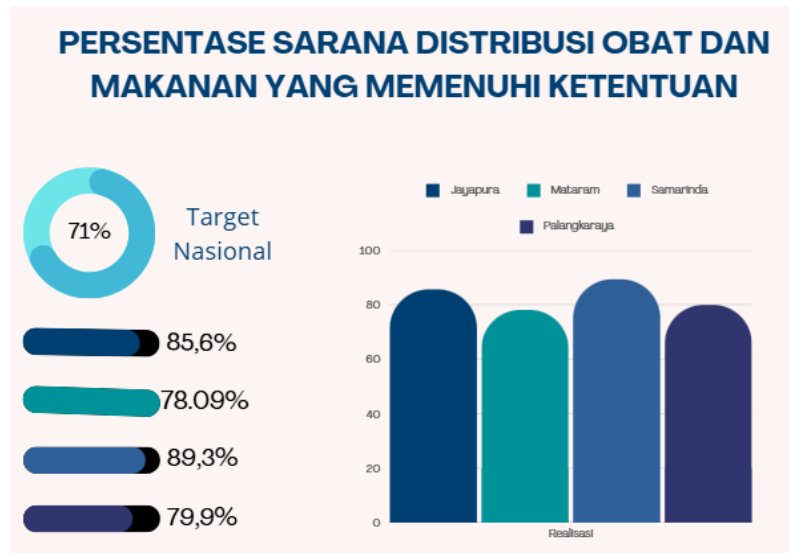
Realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2024 adalah 85.61 dari target 85 dengan capaian 100.72% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2020	55	76.40	138.41
	2021	76	73.33	96.49
	2022	79	79.40	100.51
	2023	82	82.29	100.35
	2024	85	85.61	100.72

Realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga 2023 dengan target target telah tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan target nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Samarinda dan yang terendah BBPOM di Mataram. Sedangkan terhadap target nasional (71%) BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, BBPOM di Palangkaraya, dan BBPOM di Samarinda sudah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Perhitungan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan diperoleh dari aplikasi Simetris dimana aliran data dari SIPT berdasarkan input data inspeksi di bulan tersebut dan telah dikirimkan melalui SIPT Kepala Balai ke pusat. Dari 820 sarana yang diperiksa pada Tahun 2024 702 sarana memenuhi ketentuan dan 118 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Hasil pemeriksaan sarana sebagai berikut :

- Pedagang Besar Farmasi (PBF) 10 sarana (6 MK, 4 TMK)
- Apotek 165 sarana (146 MK, 19 TMK)
- Toko Obat 13 sarana (7 MK, 6 TMK)
- Instalasi Farmasi Pemerintah 16 sarana (13 MK, 3 TMK)
- Rumah Sakit 20 sarana (17 MK, 3 TMK)
- Puskesmas 58 sarana (55 MK, 3 TMK)
- Klinik 21 sarana (20 MK, 1 TMK)
- Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 24 sarana (17 MK, 7 TMK)
- Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan 4 sarana (3 MK, 1 TMK)
- Fasilitas Distribusi Kosmetik 184 sarana (145 MK, 39 TMK)

- Klinik Kecantikan 12 sarana (9 MK, 3 TMK)
- sarana peredaran pangan olahan 293 sarana (264 MK, 29 TMK)

Penetapan kesimpulan MK dan TMK berdasarkan pada pedoman pemeriksaan sarana untuk masing - masing komoditi. Jenis pelanggaran yang ditemukan berbeda - beda sesuai dengan jenis sarannya. Pada sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian pelanggaran yang biasa ditemukan antara lain terkait dengan administrasi pengelolaan sediaan farmasi, sarana dan prasarana, legalitas sarana dan penanggung jawab sarana serta mutu dan keamanan sediaan farmasi yang dikelola. Pada sarana distribusi kosmetik, sarana distribusi obat tradisional dan sarana distribusi suplemen kesehatan pelanggaran yang ditemukan berupa produk Tanpa Izin Edar atau produk kedaluwarsa, sedangkan temuan di sarana distribusi pangan olahan berupa produk pangan kedaluwarsa atau rusak. Pelanggaran yang ditemukan ada yang merupakan pelanggaran pertama namun ada juga yang merupakan pelanggaran berulang. Terhadap pelanggaran yang ditemukan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk masing - masing komoditi. Selain itu dilakukan juga pembinaan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab sarana terkait cara distribusi atau peredaran produk yang baik sehingga pemilik dan/atau penanggung jawab sarana dapat melakukan perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan dan mencegah temuan yang sama terulang kembali.

Realisasi kegiatan ini untuk tahun 2024 adalah 85.61 melewati target yang ditetapkan yaitu 85. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang terkait dengan distribusi obat dan makanan. Peningkatan kepatuhan ini merupakan hasil dari kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan petugas Balai Besar POM di Jayapura.

Upaya-upaya yang telah dilakukan :

1. Pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi dilakukan berdasarkan kajian risiko, sehingga sarana yang tidak memenuhi ketentuan pada tahun sebelumnya menjadi prioritas utama untuk diperiksa, juga untuk sarana yang belum melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dari pemeriksaan sebelumnya dan sarana yang tidak diperiksa dalam kurun waktu tertentu.
2. Komunikasi dan koordinasi intensif dengan lintas sektor dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota terkait pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana.
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Melakukan komunikasi dan koordinasi intensif kepada lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan, pembinaan berkelanjutan terkait penerapan cara distribusi yang baik dan

pendampingan dalam perbaikan hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha di bidang distribusi Obat dan Makanan serta monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah

1. Pemeriksaan sarana distribusi sesuai dengan perencanaan yang berdasarkan pada analisis risiko.
2. Melakukan Komunikasi dan Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat
3. Melakukan pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha termasuk dalam menindaklanjuti hasil pengawasan melalui tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan.
5. Kompetensi petugas yang terus meningkat dan selaras dengan perkembangan terkini.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	85.61	100.72	506.560.000	506.232.000	99.93	0.001	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 99.93% yaitu dari alokasi anggaran Rp.506.560.000 direalisasikan sebesar Rp.506.232.000. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan capaian Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja telah mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran telah sepenuhnya terealisasi. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada capaian input (anggaran) artinya pelaksanaan kegiatan pada indikator ini telah terlaksana dengan baik dan sudah efisien.

6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura

Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai PEKPPP BPOM dengan kategori

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal (<i>Proses Pembinaan</i>)
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk (<i>Proses Pembinaan</i>)
1,51 – 2,00	D	Buruk (<i>Proses Pembinaan</i>)
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalisme SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Penilaian kinerja UPP mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4.8	4.83	100.63	Sangat Baik

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik pada Tahun 2024 adalah 4.83 dari target 4.8 dengan capaian 100.63% dengan kriteria **Sangat Baik**.

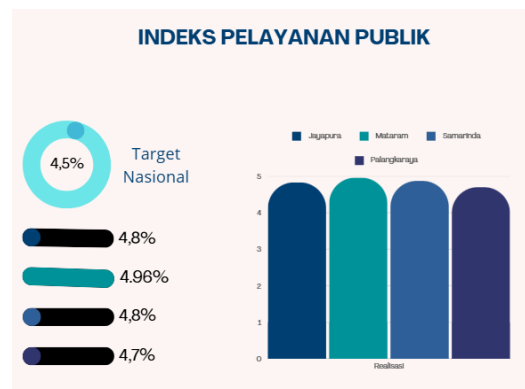
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pelayanan Publik	2020	3.51	4.08	116.24
	2021	4.20	4.33	103.10

	2022	4.4	4.24	96.36
	2023	4.25	4.72	111.06
	2024	4.8	4.83	100.63

Capaian indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2023. Capaian tahun 2024 termasuk dalam kategori Pelayanan Prima.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan target nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Mataram dan yang terendah BBPOM di Palangkaraya. Sedangkan terhadap target nasional (4.51) BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Samarinda sudah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, Balai Besar POM di Jayapura telah menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang mengacu pada Peraturan Badan POM terbaru. Selain itu beberapa upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jayapura untuk meningkatkan nilai Indeks Pelayanan Publik di tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- Melakukan pemutakhiran *subsite* jayapura.pom.go.id secara berkala setiap hari, tidak hanya berita internal namun bisa berupa data lainnya, salah satu contohnya yaitu memperbarui petugas pelayanan publik setiap harinya.
- Melakukan publikasi standar layanan secara berkala melalui media sosial Balai Besar POM di Jayapura.
- Melengkapi pemenuhan sarana dan prasarana kepada kelompok rentan, serta melakukan *Self Assessment* Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kelompok Rentan

- d. Melaksanakan SKM pada tiap Triwulan serta monitoring dan evaluasi RTL SKM.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik setiap triwulan.
- f. Melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai Petugas Pelayanan Publik dengan Pelatihan Peningkatan Standar dan Manajemen Kinerja Pelayanan Publik.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

1. Aspek Kebijakan Pelayanan (Publikasi SKM seharusnya mencantumkan informasi terkait metode, proses, dan hasil SKM).
2. Profesionalisme SDM (Membuat SK Internal terkait kode etik pelaksana pelayanan yang juga memuat penghargaan).

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Salah satu aspek terpenting yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Balai Besar POM di Jayapura terus-menerus melakukan perbaikan pada unit pelayanan publik seperti publikasi berbagai layanan yang dimiliki Balai Besar POM di Jayapura melalui media sosial, perbaikan dan peningkatan secara berkala terhadap fasilitas pelayanan dan meningkatkan kompetensi petugas pelayanan yang merupakan pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tahun 2023 sehingga diperoleh indeks pelayanan publik, yaitu 4,83 dengan capaian 100,63%.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Indeks Pelayanan Publik	4.8	4.83	100.63	2.533.198.000	2.517.492.209	99.38	0.01	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Indeks pelayanan Publik adalah 99.38% yaitu dari alokasi anggaran Rp.2.533.198.000 direalisasikan sebesar Rp.2.517.492.209. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks pelayanan Publik dengan capaian sangat baik. Dari segi capaian kinerja telah mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran telah sepenuhnya terealisasi. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada capaian input (anggaran) artinya pelaksanaan kegiatan pada indikator ini telah terlaksana dengan baik dan sudah efisien.

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

A. Ruang Lingkup UMKM

- UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
 - b) Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)
- UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai.
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (SPA CPOTB) secara bertahap.
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - a) Persetujuan denah (sesuai petunjuk teknis penyusunan denah bangunan industri kosmetik golongan B)
 - b) Pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (SPA CPKB) dan/atau Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) (sesuai petunjuk teknis penerbitan SPA CPKB dan CPKB).
 - c) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai petunjuk teknis penerbitan nomor notifikasi kosmetik).
 - d) Penerbitan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik.

C. Kriteria UMKM yang didampingi :

- Untuk UMKM pangan mengacu pada pedoman pendampingan penerapan CPPOB bagi UMK Pangan.
- Untuk UMKM OT :
 - a) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan/atau sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki sertifikat CPOTB bertahap.
 - b) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional.
 - c) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up).
 - d) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB bertahap.
 - e) UMKM yang direkomendasikan oleh lintas sektor
- Untuk UMKM Kosmetik :
 - a) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - b) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81	70	86.42	Cukup

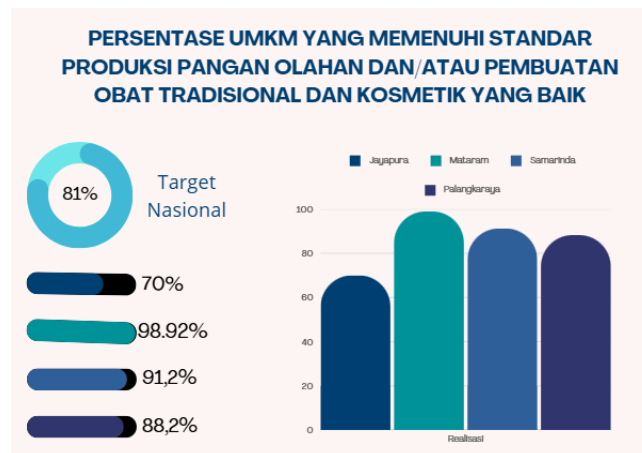
Realisasi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada Tahun 2024 adalah 70 dari target 81 dengan capaian 86.42% dengan kriteria **Cukup**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	77	80	103.90
	2023	79	66.67	84.39
	2024	81	70	86.42

Capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2023.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja dengan Balai Lain yang setara dengan target nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Mataram dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (81%), BBPOM di Mataram, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional. Sedangkan BBPOM di Jayapura belum mencapai target nasional. BBPOM di Jayapura masih harus bekerja keras dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan ijin edar.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024 berdasarkan target yang ditetapkan UMKM yang didampingi dalam rangka pemenuhan standar produksi oleh Balai Besar POM di Jayapura adalah UMKM Kosmetik dan UMKM Pangan Olahan dan tidak melakukan pendampingan terhadap UMKM Obat Tradisional. Dalam rangka pencapaian indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Kosmetik yang baik sampai akhir tahun 2024 telah dilakukan seluruh tahapan – tahapan pendampingan sesuai dengan pedoman untuk masing - masing komoditi, masing - masing tahapan tersebut memiliki bobot capaian. Tahapan pendampingan dinyatakan terlaksana jika seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan bobotnya. Untuk komoditi kosmetik tahapan pendampingan terdiri dari kegiatan laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dengan bobot 10%, Bimtek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dengan bobot 40%, fasilitasi pendampingan terhadap UMKM dengan bobot 40% dan pelaporan kepada Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku

Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan bobot 10%. Sedangkan untuk komoditi Pangan Olahan tahapan pendampingan berupa penetapan UMKM Pangan Olahan target dengan bobot 10%, pelaksanaan Bimtek CPPOB dengan bobot 30%, fasilitasi pendampingan dengan bobot 40%, Pemeriksaan Sarana dengan bobot 10% dan monitoring pelaporan dengan bobot 10%.

Dalam upaya pencapaian indikator ini telah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor dalam upaya mengumpulkan data UMKM yang akan didampingi, data yang diperoleh selanjutnya dipilah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dipilih menjadi UMKM yang akan dijadikan target pendampingan UMKM tahun 2024. Selain melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor dilakukan juga evaluasi terhadap kegiatan pendampingan tahun sebelumnya untuk melihat UMKM yang berpotensi untuk dijadikan target pendampingan tahun ini dan UMKM yang proses pendampingannya akan dilanjutkan di tahun ini.

Target jumlah UMKM yang didampingi adalah 2 UMKM Kosmetik dan 20 UMKM Pangan Olahan. Penetapan target UMKM yang didampingi dilakukan dengan melibatkan lintas sektor terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Realisasi kegiatan pendampingan UMKM tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 ini untuk komoditi kosmetik kedua UMKM telah melakukan permohonan persetujuan denah bangunan tempat produksi kosmetik dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Pengawasan Kosmetik sehingga target pendampingan UMKM untuk komoditi kosmetik tercapai seluruhnya. Sedangkan untuk komoditi pangan olahan dari 20 UMKM yang ditargetkan hanya 8 UMKM yang dapat memenuhi standar produksi berupa diterbitkannya sertifikat IP CPPOB.

Dalam proses pendampingan terdapat kendala dan permasalahan yang kemudian berimbas pada tidak tercapainya target pendampingan UMKM Pangan Olahan. Berdasarkan permasalahan yang ada, dari 20 sarana UMKM pangan yang menjadi target pendampingan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Belum ada badan usaha yang mengelola sarana produksi yang sudah dibangun. Hal ini terjadi pada sarana produksi sentra pengolahan ikan asar dan sentra pengolahan kelapa yang merupakan binaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Biak Numfor dan sentra industri kakao yang merupakan binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jayapura. Bangunan dan fasilitas produksi sudah tersedia namun belum ada badan usaha UMKM yang mengelola sarana produksi tersebut. Keberadaan badan usaha ini diperlukan

dalam setiap proses perizinan yang ada sebagai identitas dari sarana produksi tersebut termasuk dalam pengajuan sertifikat IP CPOOB.

- b. Bangunan tempat produksi belum memenuhi kaidah CPOOB. Terdapat sarana yang belum memiliki bangunan/ruangan khusus untuk melakukan kegiatan produksi, kegiatan produksi masih dilakukan di dapur rumah tangga. UMKM yang telah memiliki bangunan khusus untuk produksi kondisinya masih belum sesuai dengan kaidah CPOOB, masih memerlukan perbaikan terhadap bangunan tempat produksinya, seperti memperbaiki tata letak ruang, area dan peralatan, menutup bagian yang masih terbuka dan melengkapi fasilitas yang diperlukan seperti wastafel, fasilitas pencucian peralatan, fasilitas penanganan limbah, dll.
- c. Pelaku usaha tidak menunjukkan komitmen untuk mengikuti setiap tahapan pendampingan, tidak merespon saran dan permintaan perbaikan dari petugas.
- d. Pelaku usaha tidak lagi melanjutkan kegiatan produksi.
- e. Pelaku usaha mengalami kendala KSWP yang tidak valid sehingga tidak dapat melakukan pengajuan IP CPOOB. Kendala tersebut belum dapat diatasi karena menyangkut tunggakan pajak yang bisa dibayarkan.

Terhadap kendala dan permasalahan tersebut telah dilakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, antara lain melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait kendala bangunan tempat produksi yang dialami pelaku usaha. Komunikasi dan koordinasi dilakukan terutama dengan lintas sektor yang memiliki kewenangan dan sumber daya untuk mengatasi kendala tersebut, namun hal ini tidak serta merta mendapatkan respon positif dari lintas sektor. Terlepas dari kendala yang ada komitmen UMKM terus dibangun antara lain dengan memberikan pemahaman kepada UMKM terkait tujuan kegiatan pendampingan yang pada dasarnya adalah untuk kepentingan kemajuan usaha mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan upaya untuk mencari sarana baru yang memungkinkan untuk didampingi. Telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini pemerintah daerah untuk mendata sarana yang dapat didampingi, namun dari data yang ada tidak ada sarana produksi yang memenuhi kriteria untuk didampingi, sarana produksi masih berupa Industri Rumah Tangga Pangan dengan produk yang masih bisa mendapatkan izin edar SPP-IRT, selain itu bangunan tempat produksi juga masih belum sesuai dengan kaidah CPOOB.

Selain berkoordinasi dengan lintas sektor sarana baru juga berasal dari sarana produksi yang telah memiliki MD namun belum memiliki sertifikat IP CPOOB serta sarana baru yang

memproduksi pangan olahan yang harus diregistrasikan sebagai MD. Namun dalam perjalanannya tetap tidak sesuai prediksi. Sarana produksi yang telah memiliki MD namun belum memiliki sertifikat IP CPOOB tersebut meskipun telah diberi surat peringatan tidak semuanya merespon dengan baik dan cepat, dari 10 sarana yang diberi surat peringatan baru 2 yang telah mengajukan IP CPOOB sisanya masih belum melakukan pengajuan IP CPOOB dengan berbagai alasan antara lain dokumen yang belum siap dan kesulitan mengakses aplikasi karena tidak ada personil yang memiliki keterampilan mengoperasikan perangkat IT. Realisasi kinerja untuk kegiatan ini lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan dengan kriteria capaian cukup. Realisasi pada tahun 2023 juga tidak mencapai target yang ditetapkan dengan permasalahan yang sejenis. Realisasi tahun 2024 sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2023.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Memaksimalkan sosialisasi inovasi sarang semut dan SAGU EMAS Papua, agar pelaku usaha dapat secara mandiri mengakses informasi yang diinginkan, serta mendapatkan pendampingan jemput bola hingga produknya mendapatkan izin edar. Melakukan pendampingan yang lebih fokus dan intens sehingga UMKM dapat memenuhi standar produksi sesuai dengan komoditinya serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor lainnya untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam melakukan pendampingan UMKM.

E. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

- meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam hal pendampingan pelaku usaha sehingga terdapat kolaborasi dan sinergitas dalam pembagian tupoksi pembinaan dan pendampingan yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang mampu memenuhi persyaratan aspek-aspek CPOOB/CPKB/CPOTB,
- Melakukan pendampingan secara on site untuk melihat kondisi riil sarana dan selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikan, membangun komunikasi dengan UMKM yang akan dibina dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis secara berkala kepada UMKM yang berkomitmen untuk didampingi.
- Melakukan Pendampingan dilakukan baik secara langsung melalui pertemuan tatap muka baik di lokasi UMKM, di kantor BBPOM di Jayapura maupun di Mall Pelayanan Publik serta pendampingan secara tidak langsung melalui telepon dan WA.
- Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan oleh sarana yang didampingi.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81	70	86.42	81,892,000	59,973,900	73.24	0.18	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah 73.24% yaitu dari alokasi anggaran Rp.81.892.000 direalisasikan sebesar Rp.59.793.900. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan capaian cukup. Dari segi capaian kinerja telah melebihi target dan realisasi anggaran belum terserap seluruhnya atau capaian output lebih besar dari capaian output. Artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada :

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - a) TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
 - b) Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM).
2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - a) TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting. I

- b) Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.
3. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.
- a) Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
- b) Peran UPT antara lain:
1. menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 2. penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran;
 3. pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM;
 4. monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;
 5. monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	75.47	79.44	Cukup

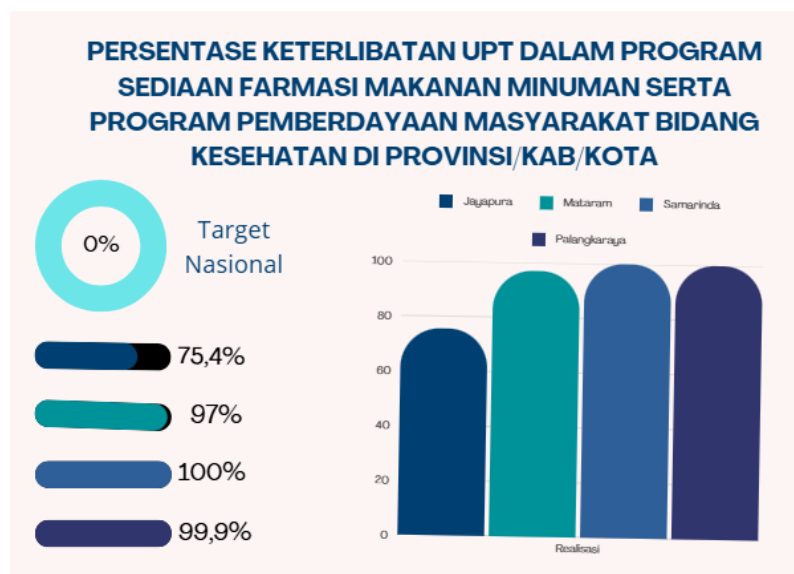
Realisasi indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan pada Tahun 2024 adalah 75.47 dari target 95 dengan capaian 79.44% dengan kriteria **Cukup**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	95	75.47	79.44

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan merupakan indikator baru di tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan target nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Samarinda sedangkan yang terendah BBPOM di Jayapura. Untuk indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan tidak memiliki target nasional.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan merupakan indikator baru dalam Perjanjian Kinerja BBPOM di

Jayapura tahun 2024. Dari aspek-aspek penilaian telah dilakukan kelengkapan data dukung berupa :

1. Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditandai dengan adanya SK pembentukan TKPPOM . Dari 2 Provinsi dan 16 Kabupaten/Kota terdapat 1 Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota yang telah memiliki SK TKPPOM dan 1 Provinsi dengan 7 Kabupaten yang belum memiliki SK TKPPOM yaitu Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten yang ada di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan kecuali Kabupaten Jayawijaya. Hal ini dikarenakan Provinsi Papua Pegunungan merupakan Daerah Otonomi Baru yang belum memiliki Kepala Daerah definitif begitu pula dengan 7 Kabupaten yang kepala daerahnya dijabat oleh Pejabat Sementara. Pembentukan TKPPOM akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pejabat kepala daerah definitif.
2. Kegiatan koordinasi dan pengawasan terpadu bersama Organisasi Perangkat Daerah di 11 Kabupaten Kota. Pengawasan terpadu yang dilakukan berupa pemeriksaan bersama ke sarana distribusi dan sarana produksi.
3. Pembentukan Tim Percepatan Pengendalian Stunting (TPPS) Provinsi Papua ditandai dengan ditandatanganinya SK TPPS, sedangkan untuk TPPS Provinsi Papua Pegunungan baru akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan setelah adanya Kepala Daerah (Gubernur) definitif. Untuk di tingkat Kabupaten/Kota belum ada TPPS yang terbentuk.
4. Kegiatan koordinasi terkait stunting dengan pemerintah daerah kabupaten Jayapura sebagai langkah awal pengendalian stunting di Kabupaten Jayapura sebelum TPPS terbentuk
5. Kegiatan koordinasi lintas sektor berupa pendataan lokus stunting provinsi papua dalam rangka pelaksanaan program GKPD 2024 di Kota Jayapura.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Koordinasi yang sulit dilakukan di daerah pedalaman Papua/daerah Provinsi Papua Pegunungan/wilayah rawan konflik/chaos
2. Kurangnya koordinasi keterlibatan BBPOM Jayapura dalam pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM), pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di sebagian besar Kabupaten
3. Kurangnya sumber daya dalam pelaksanaan koordinasi
4. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memahami peran BBPOM Jayapura untuk di daerah Kegiatan yang telah dilakukan di selama tahun 2024 antara lain melaksanakan pemeriksaan sarana bersama Pemerintah Daerah dalam hal ini lintas sektor terkait baik sarana distribusi

maupun sarana produksi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK bagi kabupaten/kota penerima DAK melalui tatap muka maupun online.

Dalam pencapaian target renstra tahun 2024 rekomendasi yang dilakukan antara lain;

- Meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan melalui pertemuan koordinasi dengan lintas sektor terkait,
- Meningkatkan koordinasi terkait penanganan stunting dengan lintas sektor terkait pada wilayah Kabupaten/Kota,
- Melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan DAK non Fisik dan melaksanakan monev terhadap pelaksanaan DAK non Fisik.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens kepada pemerintah daerah melalui lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan serta pengelolaan kegiatan dengan anggaran DAK BOK POM.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator ini antara lain melakukan koordinasi dengan Pemda (instansi terkait) sehubungan dengan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, serta pengelolaan kegiatan dengan anggaran DAK BOK POM, selain itu telah memberikan usulan Kabupaten/Kota yang akan mendapat anggaran DAK tahun 2025.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	75.47	79.44	297.970.000	297.175.500	99.73	- 0.203	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota adalah 99.73% yaitu dari alokasi anggaran Rp.297.970.000 direalisasikan sebesar Rp.297.175.500. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan capaian Cukup. Dari segi capaian kinerja lebih kecil

daripada capaian input (anggaran), artinya pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini belum terlaksana dengan baik dan tidak efisien.

3.1.3. Sasaran Strategis III – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 4 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ketiga ini. Berdasarkan keempat indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran strategis III diperoleh rata-rata capaian sebesar 100.26% dengan kriteria **Sangat Baik**. Capaian indikator di Sasaran Strategis III didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.2.213.316.000,-**

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.22 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Tahun 2024

Kode SS	Sasaran strategis	Indikator	Targe t	Realisas i	Capaia n	Kriteria
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.8	97.43	101.70	Sangat Baik
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88	88	100	Baik
		Jumlah desa pangan aman	22	22	100	Baik
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	22	22	100	Baik

Adapun Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;

- b) KIE langsung ke masyarakat; dan
- c) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online* survei.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.8	97.43	101.70	Sangat Baik

Realisasi indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Tahun 2024 adalah 97.43 dari target 95.8 dengan capaian 101.70% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	2020	86.95	89.63	103.08
	2021	90.5	93.31	103.10
	2022	92.2	93.33	101.23
	2023	94.1	94.99	100.95
	2024	95.8	97.43	101.70

Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 dan sudah mencapai target. Terdapat peningkatan realisasi indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan karena pelaksanaan KIE dilakukan secara langsung kepada masyarakat yaitu melalui kegiatan Kami Siap Berbagi Informasi (KASBI) di fasilitas-fasilitas umum.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan target nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Mataram dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (97), BBPOM di Mataram dan BBPOM di Samarinda sudah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangkaraya belum mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil survei Tahun 2024, realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jayapura mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil survei Tahun 2023. Pada umumnya, seluruh kegiatan terlaksana sesuai perencanaan. Pada Tahun 2024 pelaksanaan KIE yaitu inovasi KASBI dilaksanakan di Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori. KASBI merupakan program inovasi dalam pelaksanaan KIE dimana pada pelaksanaannya selain pemberian informasi juga dilakukan praktek langsung untuk mengenali produk Obat dan Makanan yang Aman baik melalui aplikasi BPOM Mobile maupun melalui contoh produk yang dibawa petugas atau *display* produk TMS/TMK. Selain itu metode interaktif dengan peserta ini juga didukung oleh permainan edukasi yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan. Penilai Efektivitas KIE diukur menggunakan 4 (empat) indikator penilaian survei sebagai berikut :

No	Indikator Penilaian	2024
1	Ragam Kegiatan	99.31
2	Pemahaman	100
3	Manfaat	96.88
4	Minat	93.58

Secara keseluruhan hasil indeks, pencapaian indikator ini didukung oleh :

- Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti antara lain workshop informasi dan komunikasi dan pelatihan teknis KIE tingkat II
- Latihan perdana SAKA POM terkait pengawasan Obat dan Makanan
- Melakukan pelaksanaan KIE melalui program KASBI dengan memberikan materi yang menarik dan mudah dipahami dan dibutuhkan masyarakat.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Melaksanakan Kasbi di tempat yang banyak dikunjungi masyarakat dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan didukung oleh konsistensi pelaksanaan kegiatan inovasi KASBI pada fasilitas umum dan event-event daerah yang melibatkan masyarakat banyak. Selain materi yang menarik, petugas yang kompeten juga dengan pemberian produk informasi keamanan pangan yang menarik dan khas BPOM.

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.8	97.43	101.70	214.081.000	213.890.980	99.91	0	Efisien

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan adalah 99.91% yaitu dari alokasi anggaran Rp.214.081.000 direalisasikan sebesar Rp.213.890.980. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja telah melebihi target dan dari sisi alokasi anggaran yang disediakan telah seluruhnya direalisasikan. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada capaian input (anggaran), artinya pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini telah terlaksana dengan baik dan sudah efisien.

2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik

di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88	88	100	Baik

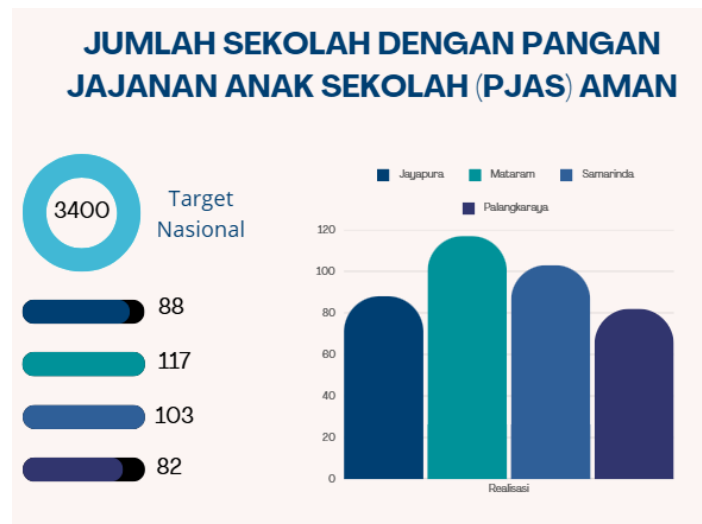
Realisasi indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2024 adalah 88 sekolah dari target 88 sekolah dengan capaian 100 % dengan kriteria baik.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	2020	16	16	100
	2021	40	47	117.5
	2022	56	58	103.57
	2023	72	74	102.78
	2024	88	88	100

Capaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 namun target tetap tercapai dengan penetapan target secara kumulatif hingga tahun 2024.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Mataram dan yang terendah BBPOM di Palangkaraya sesuai target yang ditetapkan di renstra masing-masing UPT. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh UPT di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Target jumlah sekolah dengan PJAS Aman yang diintervensi pada Tahun 2024 merupakan kumulatif dari target Renstra dalam RPJM 2020-2024 yaitu 88 sekolah. Untuk tahun 2024 sendiri memiliki target 16 sekolah yang dilaksanakan di 3 Kabupaten dengan lokus, yaitu Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura. Sedangkan target pengawalan adalah 18 sekolah yang telah diintervensi pada tahun 2023 di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen.

Pada tahun 2024 pelaksanaan Intervensi Keamanan PJAS telah dilakukan sesuai dengan tahapan. Adapun tahapan dan skor kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor PJAS; Skor 20% sudah selesai dan sesuai tahapan
2. Sosialisasi Keamanan Pangan; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan

3. Bimbingan Teknis KP untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah ; Skor 15% sudah selesai dan sesuai tahapan.
4. Pemberian Paket Edukasi ; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan.
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah; Skor 15% sudah selesai dan sesuai tahapan.
6. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman; Skor 20% sudah selesai dan sesuai tahapan.
7. Pengawasan; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan.

Pada Tahun 2024 telah dilakukan kegiatan yaitu Intervensi Keamanan PJAS dengan lokus Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom. Kegiatan ini memberikan sosialisasi kepada murid tentang keamanan pangan anak sekolah.

Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain:

- Komitmen dari sekolah yang diintervensi karena sejak awal pelaksanaan program (kegiatan Advokasi Lintas Sektor) sekolah yang akan diintervensi dilibatkan secara aktif sehingga tumbuh pemahaman yang baik akan pentingnya program PJAS bagi sekolah.
- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan sekolah yang akan diintervensi.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah

Pada program nasional dengan lokus yang telah ditentukan, kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Meminta komitmen pemda untuk mendukung keberlanjutan program dengan menandatangani Dokumen Komitmen.
2. Membimbing Tim Keamanan Pangan Sekolah dalam menyusun rencana aksi keberlanjutan program
3. Memberdayakan kader/murid sekolah sebagai talenta konten KIE yang diproduksi oleh Tim Media Sosial BBPOM agar sosialisasi keamanan pangan lebih mudah dipahami dan tersedia setiap saat

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Komitmen, koordinasi dan komunikasi dengan pihak sekolah yang diintervensi.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88	88	100	867,781,000	865,129,162	99.69	0.003	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah 99.69% yaitu dari alokasi anggaran Rp.867.781.000 direalisasikan sebesar Rp.865.129.162. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian Baik. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada capaian input (anggaran), artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini telah efisien.

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan $\leq 0,815$ dan desa berkembang adalah desa dengan IDM $> 0,599$ dan $\leq 0,707$, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- Kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan berdasarkan *progress* tahapan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	22	22	100	Baik

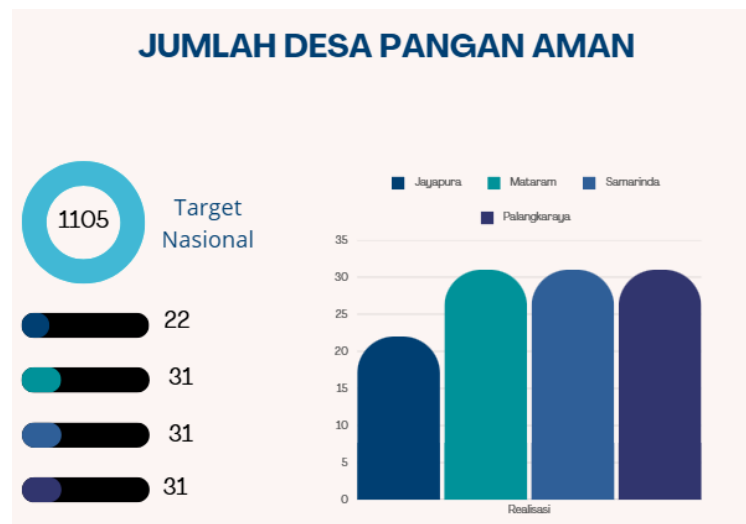
Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2024 adalah 22 Desa dari target 22 Desa dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah desa pangan aman	2020	4	4	100
	2021	8	8	100
	2022	13	13	100
	2023	17	17	100
	2024	22	22	100

Terdapat kenaikan realisasi jumlah desa pangan aman dari tahun 2020 hingga 2024. Namun capaian dari tahun 2020 hingga 2024 adalah tetap. Target indikator ini ditetapkan secara kumulatif sampai dengan tahun 2024.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2024 yang terendah adalah BBPOM di Jayapura karena perbedaan target dengan BBPOM di Mataram, BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Samarinda. Target nasional (1105) merupakan target kumulatif seluruh UPT di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Target jumlah desa pangan aman yang diintervensi pada Tahun 2024 adalah 5 desa pada 3 Kabupaten lokus, yaitu Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kota Jayapura 2 desa (Kelurahan Koya Timur dan Kelurahan Koya Barat); Lokus Non Stunting
2. Kabupaten Sarmi 2 desa (Kampung Kiren Distrik Bonggo dan Kampung Bebon jaya Distrik Bonggo); Lokus Non Stunting
3. Kabupaten Keerom 1 Desa (Kampung Jaifuri Distrik Skanto); Lokus Stunting

Sedangkan target pengawalan adalah 5 desa yang telah diintervensi pada Tahun 2023 di 3 Kabupaten lokus di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Desa Pangan Aman dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan target waktu pelaksanaan dan pembobotan capaian *progress* dan output pada akhir intervensi adalah jumlah desa pangan aman. Sampai dengan Triwulan III pelaksanaan Desa Pangan Aman telah dilakukan sesuai dengan tahapan juknis. Adapun tahapan dan skor kegiatan sampai dengan Triwulan III adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Kelembagaan Desa; Skor 20% sudah selesai dan sesuai tahapan
2. Pengadaan gimmick, rapid test, dll; Skor 5% sudah selesai dan sesuai tahapan.
3. Pengawalan; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan.
4. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD); Skor 15% sudah selesai dan sesuai tahapan.
5. Bimtek Komunitas, sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk komunitas; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan.
6. Fasilitasi Keamanan Pangan; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan.
7. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan pre dan post-intervensi; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan.
8. Monitoring dan Evaluasi : Pertemuan Lintas Sektor; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan.
9. Lomba Desa Pangan Aman; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan.

Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

- Komitmen dari pemerintah kampung karena sejak awal pelaksanaan program perangkat kampung yang diintervensi dilibatkan secara aktif sehingga tumbuh pemahaman yang baik akan pentingnya program GKPD bagi masyarakat
- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan tim keamanan desa dan kader keamanan pangan desa.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah

Pada program nasional dengan lokus yang telah ditentukan, kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Meminta komitmen pemda untuk mendukung keberlanjutan program dengan menandatangani Dokumen Komitmen.
2. Membimbing perangkat desa dalam menyusun rencana aksi keberlanjutan program.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Komitmen, koordinasi dan komunikasi dengan tim keamanan desa terdiri dari kepala kampung dan perangkatnya serta kader keamanan pangan desa yang terdiri dari masyarakat.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Jumlah desa pangan aman	22	22	100.00	616,764,000	607,585,133	98.51	0.015	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Jumlah desa pangan aman adalah 98.51% yaitu dari alokasi anggaran Rp.616.764.000 direalisasikan sebesar Rp.607.585.133. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Jumlah desa pangan aman dengan capaian Baik. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada capaian input (anggaran), artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait sudah efisien.

4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplai dapat berupa penerapan CRPB (Cara Ritel Pangan Yang Baik) oleh pedagang pasar di pasar rakyat.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	22	22	100	Baik

Realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas pada tahun 2024 adalah 22 Pasar dari target 22 Pasar dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	2020	2	2	100
	2021	8	8	100
	2022	12	12	100
	2023	17	17	100
	2024	22	22	100

Terdapat kenaikan realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dari tahun 2020 hingga 2024. Namun capaian dari tahun 2020 hingga 2024 adalah tetap. Target indikator ini ditetapkan secara kumulatif sampai dengan tahun 2024.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara dengan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Jayapura dan yang terendah BBPOM di Mataram dan BBPOM di Samarinda hal ini karena perbedaan target. Target nasional (450) merupakan target kumulatif seluruh UPT di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas yang diintervensi pada Tahun 2024 adalah 5 pasar pada 3 Kabupaten lokus, yaitu Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarimi dan Kota Jayapura, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kota Jayapura 2 pasar (Pasar Sentral Hamadi dan Pasar Pagi Koya Timur)
2. Kabupaten Sarimi 1 Pasar (Pasar Mararena)
3. Kabupaten Keerom 2 Pasar (Pasar Arso 3 dan Pasar Arso 4)

Sedangkan target pengawalan adalah 5 pasar yang telah diintervensi pada Tahun 2023 di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan target waktu pelaksanaan dan pembobotan capaian *progress* dan output pada akhir intervensi adalah jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Pada Tahun 2024 pelaksanaan Pasar Pangan Aman telah dilakukan sesuai dengan tahapan. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Forum Advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor Pasar; Skor 20% sudah selesai dan sesuai tahapan
- b. Survei Pasar; Skor 5% sudah selesai dan sesuai tahapan

- c. Bimtek Teknis Petugas Pengelola Pasar; Skor 15% sudah selesai dan sesuai tahapan
- d. Sampling dan Pengujian di Pasar tahap I; Skor 15% sudah selesai dan sesuai tahapan
- e. Penyuluhan Pedagang Pasar; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan.
- f. Kampanye Keamanan Pangan di Pasar; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan
- g. Sampling dan Pengujian Tahap II; Skor 15% sudah selesai dan sesuai tahapan
- h. Pengawasan; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan.

Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

- Komitmen dari pemerintah daerah setempat karena sejak awal pelaksanaan program pasar yang diintervensi dilibatkan secara aktif sehingga tumbuh pemahaman yang baik akan pentingnya program pasar aman bagi masyarakat.
- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan tim pengelola pasar.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah

Pada program nasional dengan lokus yang telah ditentukan, kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Meminta komitmen pemda untuk mendukung keberlanjutan program dengan menandatangani Dokumen Komitmen.
2. Membimbing pengelola pasar dalam menyusun rencana aksi keberlanjutan program.
3. Memberdayakan kader/penjual di pasar sebagai talent konten KIE yang diproduksi oleh Tim Media Sosial BBPOM agar sosialisasi keamanan pangan lebih mudah dipahami dan tersedia setiap saat.
4. Kompetensi petugas pasar dengan latar belakang pendidikan yang kurang relevan dengan pengujian pangan yang aman, sehingga BBPOM di Jayapura harus terus mendampingi pelaksanaan dan pengawasan program PABK

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Komitmen, koordinasi dan komunikasi dengan pengelola pasar.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	22	22	100	514.690.000	512.629.000	99.59	0.0041	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 99.59% yaitu dari alokasi anggaran Rp.514.690.000 direalisasikan sebesar Rp.512.629.000. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian Baik. Dari segi capaian kinerja telah mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran yang disediakan telah seluruhnya direalisasikan. Capaian kinerja lebih besar daripada capaian input (anggaran) artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini telah efisien.

3.1.4 Sasaran Strategis IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 2 (dua) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis keempat ini. Berdasarkan kedua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran strategis IV diperoleh rata-rata capaian sebesar 120% dengan kriteria **Sangat Baik**. Realisasi anggaran sasaran strategis IV pada Tahun 2024 sebesar **Rp.800.491.000,-**. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.27 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024

Kode SS	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Baik
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Baik

Adapun Penjelasan tabel di atas adalah :

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, dan Obat kuasi.

Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman atau Standar Prosedur Operasional (SOP).

Perhitungan indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah $(a+b)$ dibagi dengan 2 (dua) yaitu :

- A. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Obat dikalikan dengan 100%.
- B. Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.28 Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Baik

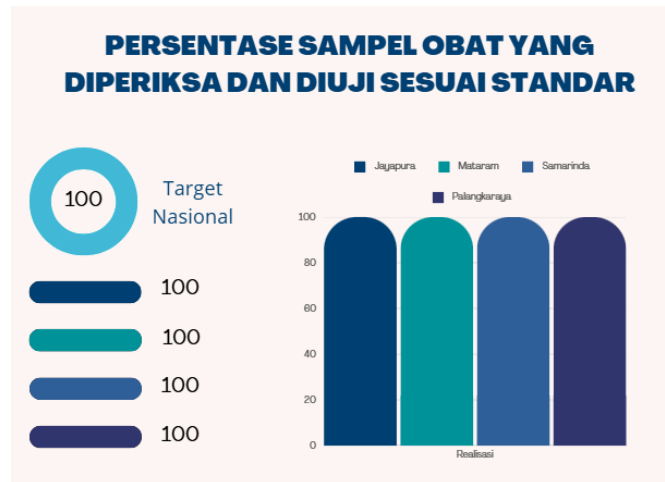
Realisasi indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Tahun 2024 adalah 100 dari target 100 dengan capaian 100% dengan kriteria **Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	95	99.91	105.17
	2021	100	100.04	100.04
	2022	100	100.10	100.10
	2023	100	100	100
	2024	100	100	100

Realisasi dan capaian indikator pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, namun tetap mencapai target sama dengan capaian tahun 2023.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara dengan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 BBPOM di Jayapura, BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Mataram sama yaitu 100% dengan capaian 100% dan sudah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Perhitungan sampel Obat acak dan targeted yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari aplikasi Simetris dimana aliran data dari SIPT berdasarkan *input* data sampel diperiksa label/penandaan selanjutnya dilakukan pengujian di bulan tersebut dan telah dikirimkan melalui SIPT Kepala Balai ke pusat. Sampai dengan bulan Desember tahun 2024 sampel Obat yang disampling sebanyak 1373 dari target sampel tahun 2024 sebanyak 1373. Sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar serta sampel yang masuk laboratorium sejumlah 1373 sampel. Terdapat kendala atau permasalahan dalam pencapaian indikator ini diantaranya sebagai berikut:

- Adanya kerusakan alat Microwave yang menyebabkan terkendalanya pengujian untuk parameter logam berat pada produk Kosmetik. Namun telah dilakukan perbaikan di bulan Oktober sehingga pengujian dapat terselesaikan dengan baik.
- Pelaporan hasil pengujian di SIPT masih terkendala terutama di regionalisasi, terkadang dari sistem yang terjadi keberulangan data sehingga harus melakukan penginputan ulang data.
- Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi sampling sesuai Pedoman Sampling yang dilakukan secara berkala, setiap bulan.
- Sampel Obat (komoditi kosmetik) yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan

memberikan kontribusi terbesar untuk sampel Obat yang Tidak Memenuhi Syarat

- Perubahan jenis atau kategori sampel yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan dengan mengajukan perubahan komposisi/jenis sampling kepada KMEI.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

- Pemeliharaan alat dilakukan secara berkala
- Berkoordinasi dengan balai region untuk dapat tepat waktu menginput data di SIPT dan selalu melakukan monitoring data di SIPT.
- Melakukan monitoring evaluasi sampling dan input SIPT agar sesuai Pedoman Sampling dan timeline.
- Melakukan evaluasi penandaan sampel kosmetik sesuai dengan Petunjuk Teknis, Surat Edaran terbaru serta hasil evaluasi pelaporan penandaan dari Direktorat Pengawasan Kosmetik.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

1. Memonitoring pelaksanaan pengujian dan koordinasi baik di BBPOM di Jayapura maupun di Balai regional
2. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan sampling serta input SIPT evaluasi penandaan sampel.
3. Melakukan evaluasi penandaan sampel kosmetik sesuai dengan Petunjuk Teknis, Surat Edaran terbaru serta hasil evaluasi pelaporan penandaan dari Direktorat Pengawasan Kosmetik.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	477,187,000	476,269,973	99.80	0.002	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 99.80%. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian Baik. Dari segi capaian kinerja telah mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran telah direalisasikan sepenuhnya, Capaian kinerja lebih besar

daripada capaian input (anggaran), artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman atau SOP.

Perhitungan indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah $(a+b)$ dibagi dengan 2 (dua) dimana:

- Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Makanan dikalikan dengan 100%.
- Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.29 Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Baik

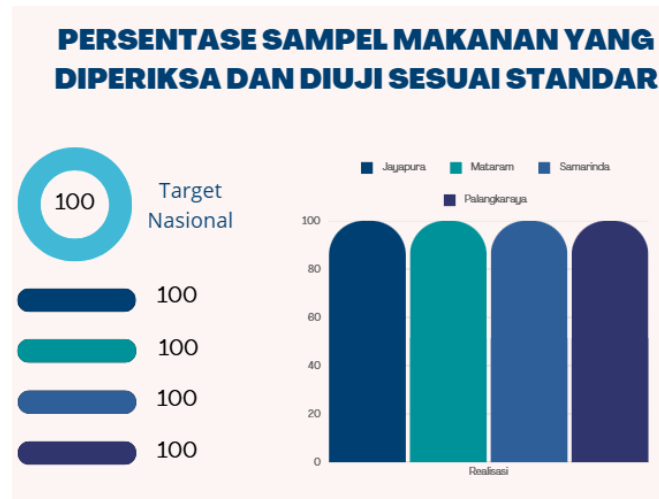
Realisasi indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Tahun 2024 adalah 100 dari target 100 dengan capaian 100% dengan kriteria **Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	85	99.97	117.38
	2021	100	100	100
	2022	100	100	100
	2023	100	100	100
	2024	100	100	100

Realisasi dan capaian indikator pada tahun 2024 sama dengan capaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan hasil yang maksimal.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara dengan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 BBPOM di Jayapura, BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Mataram sama yaitu 100% dengan capaian 100% dan sudah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Perhitungan sampel makanan acak dan targeted termasuk sampel fortifikasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari aplikasi Simetris dimana aliran data dari SIPT berdasarkan input data sampel diperiksa label/penandaan selanjutnya dilakukan pengujian di bulan tersebut dan telah dikirimkan melalui SIPT Kepala Balai ke pusat. Sampai dengan TW IV, sampel Makanan yang disampling sebanyak 600 sampel dari total target sampel 1 tahun sejumlah 600 sampel. Sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar serta sampe yang masuk laboratorium sejumlah 600 sampel.

Terdapat kendala dalam indikator kinerja ini yaitu sampel Pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan memberikan kontribusi terbesar untuk sampel Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah

- Tetap perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh fungsi pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel yang sudah diinput ke dalam SIPT dan segera menyelesaikan *entry* data apabila terdapat sampel yang belum diinput atau dikirim agar sesuai Pedoman Sampling

dan timeline.

- Melakukan evaluasi penandaan sampel makanan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan hasil evaluasi pelaporan penandaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
- Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi sampling sesuai Pedoman Sampling yang dilakukan secara berkala, setiap bulan.
- Melakukan koordinasi secara intens dengan Balai penguji regionalisasi termasuk untuk dapat tepat waktu menginput data di SIPT
- Melakukan koordinasi dengan PPK dalam percepatan pengaduan suku cadang

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

- Tetap perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh fungsi pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel yang sudah diinput ke dalam SIPT dan segera menyelesaikan *entry* data apabila terdapat sampel yang belum diinput atau dikirim agar sesuai Pedoman Sampling dan timeline.
- Melakukan evaluasi penandaan sampel makanan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan hasil evaluasi pelaporan penandaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
- Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi sampling sesuai Pedoman Sampling yang dilakukan secara berkala, setiap bulan.
- Melakukan koordinasi secara intens dengan Balai penguji regionalisasi termasuk untuk dapat tepat waktu menginput data di SIPT
- Melakukan koordinasi dengan PPK dalam percepatan pengaduan suku cadang

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	323,304,000	321,365,977	99.40	0.006	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 99.40%. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian Baik. Dari segi capaian kinerja telah mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran telah sepenuhnya terealisasi, capaian kinerja lebih besar daripada capaian

input (anggaran) artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

3.1.5. Sasaran Strategis V – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kelima ini., Dari perhitungan NPS pada sasaran strategis V 95.35% dengan kriteria **Cukup**. Capaian indikator di Sasaran Strategis V didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.820.367.000,-**

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.30 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024

Kod e SS	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
05	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	93.44	95.35	Cukup

Adapun penjelasan tabel di atas adalah :

1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perUndang - Undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan

4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$(\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1)$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%)$$

Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi. Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.31 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	93.44	95.35	Cukup

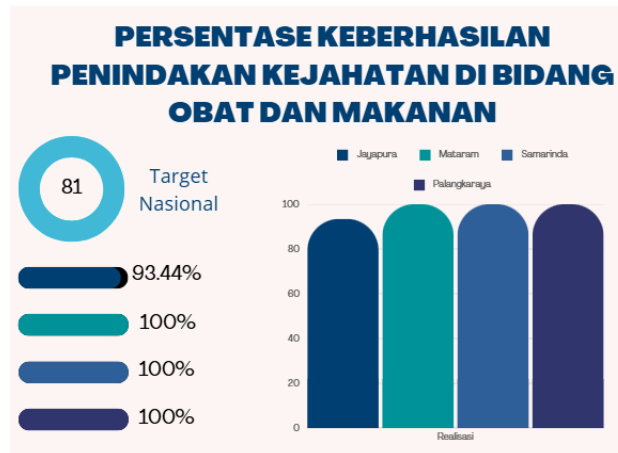
Realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada Tahun 2024 adalah 93.44 dari target 98 dengan capaian 95.35% dengan kriteria **Cukup**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2020	35	32.96	94.17
	2021	42	70.35	167.50
	2022	50	99	197
	2023	73	97	132.88
	2024	98	93.44	95.35

Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, namun naik dari tahun 2020 dan 2021.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara dengan target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Jayapura. BBPOM di Mataram, BBPOM di Samarinda, dan BBPOM di Palangkaraya memperoleh capaian 100%. Sedangkan terhadap target nasional (81%) BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Samarinda sudah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura Tahun 2024 tidak mencapai target.

- Capaian tahapan perkara Tahun 2024 sebagai berikut :
 - ✓ Realisasi perkara Tahun 2024 adalah 3 perkara pada tahap II dan 1 perkara pada tahap P21.
 - ✓ Masih terdapat 3 perkara *carry over* sampai dengan Tahun 2024 yaitu pada tahun 2017 sebanyak 1 perkara, pada tahun 2018 sebanyak 1 perkara, dan pada tahun 2023 sebanyak 1 perkara. Perkara *carry over* tahun 2017 dan tahun 2018 tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).
 - ✓ Perkara *carry over* untuk Tahun 2023 tersangka melarikan diri ke luar daerah Papua, dan sampai sekarang belum berhasil ditemukan dan belum ditetapkan sebagai DPO, Informasi terakhir tersangka berada di Jakarta.

Pada Triwulan I bulan Februari Tahun 2024 terdapat 1 perkara yang diperoleh berdasarkan informasi dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang statusnya sudah tahap II dimana dari tahapan SPDP sampai dengan tahap II kurang lebih 2 bulan.

Pada Triwulan II bulan April Tahun 2024 terdapat 1 perkara diperoleh berdasarkan komunikasi kelompok substansi pemeriksaan dan kelompok substansi penindakan dalam penerapan asas *ultimum remedium* (upaya terakhir), dimana hasil pemeriksaan rutin yang telah ditindaklanjuti sesuai SOP, dan sudah diberikan sanksi administratif berulang kali, namun karena tidak ada perbaikan dari sarana tersebut, selanjutnya dilakukan penegakan hukum dan telah sampai dengan tahap II kurang lebih 3 bulan.

Pada Triwulan III bulan September Tahun 2024 terdapat 1 perkara yang diperoleh berdasarkan hasil investigasi oleh petugas fungsi Penindakan yang statusnya dari tahapan SPDP sampai dengan Tahap II kurang lebih 2 bulan.

Pada Triwulan IV bulan Oktober Tahun 2024 terdapat 1 perkara yang diperoleh berdasarkan hasil investigasi oleh petugas fungsi penindakan yang statusnya dari tahapan SPDP sampai dengan Tahap II lebih dari 3 bulan dan menjadi perkara *carry over* di tahun 2025 dikarenakan setelah berkas selesai diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum dan ada beberapa petunjuk untuk penyidik melengkapi berkas perkara namun ketika telah selesai memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum adanya kendala yaitu Jaksa Penuntut Umum sedang menangani perkara lain di luar kota, namun penyidik terus berkoordinasi secara intens melalui telepon / *online*, sampai dengan Jaksa Penuntut umum kembali ke Jayapura untuk dilakukan Pelimpahan Tersangka dan barang Bukti (Tahap II), namun atas informasi dari Jaksa bahwa per tanggal 15 Desember 2024 Pengadilan Negeri Jayapura sudah tidak menerima pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga direncanakan dilakukan Tahap II pada bulan Januari 2025. Hal ini menjadi kendala eksternal penyidik.

Hal-hal yang telah dilakukan sebagai berikut :

- Koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Papua telah dilakukan dengan baik dimana dalam hal bantuan untuk *back-up* personil dalam mendampingi petugas melakukan investigasi, operasi penindakan, penyidikan hingga tahap II telah berjalan dengan sinergi dan optimal.
- Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan dengan baik dimana dalam hal kelengkapan berkas dilakukan dengan komunikasi yang intens.
- Koordinasi dengan fungsi pemeriksaan berdasarkan *track record* / hasil pemeriksaan sarana.
- Adanya komitmen penyidik dalam melakukan proses penyidikan hingga perkara selesai.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

- Kolaborasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan: Meningkatkan sinergi dengan Polri (Direktorat Intelkam Polda Papua, Direktorat Kriminal khusus Polda Papua) dan Kejaksaan Negeri Jayapura dan Kejaksaan Tinggi Papua agar penegakan hukum lebih efektif, terutama dalam proses penyelidikan dan penuntutan.
- Perlunya melakukan penggalangan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan menyasar pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Adapun pemangku kepentingan yang dapat disasar, seperti :
 - a) Pemangku kepentingan terkait pembangunan ekonomi (Disperindag Provinsi Papua, Perwakilan Bea Cukai, GP Farmasi, pelaku usaha).
 - b) Pemangku kepentingan terkait dukungan sumber informasi (Bais TNI, Jasa Pos, Logistik dan Forwarder, Perusahaan Otobus, Pemuda Pemudi Penggiat Anti Narkoba (PUPAN), pelaku usaha).
 - c) Pemangku kepentingan terkait KIE (PD IAI Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Provinsi Papua / Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Jayawijaya, Kota Jayapura, perwakilan Bea Cukai, Media cetak dan online, Disperindag Provinsi Papua, PUPAN, pelaku usaha).
- komunikasi kelompok substansi pemeriksaan dan kelompok substansi penindakan dalam penerapan asas *ultimum remedium* (upaya terakhir), dimana hasil pemeriksaan rutin yang telah ditindaklanjuti sesuai SOP, dan sudah diberikan sanksi administratif berulang kali, namun karena tidak ada perbaikan dari sarana tersebut, selanjutnya dilakukan penegakan hukum.
- Pengawasan, pengamatan penelitian dan pemeriksaan (Wasmalitrik), operasi intelijen, verifikasi data patroli siber juga dilakukan dalam upaya memperoleh perkara selain itu, komunikasi dan koordinasi secara intens dengan unsur-unsur CJS (*Criminal Justice System*).

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini adalah:

- Penguatan Jejaring Kerja Lintas Sektor: Kerjasama yang baik antar CJS (*Criminal Justice System*) dan jejaring kerja dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan lembaga terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan pengawasan yang komprehensif terhadap peredaran produk obat dan makanan di wilayah Papua.
- Komunikasi dan koordinasi yang baik antar fungsi

- Pengawasan, pengamatan penelitian dan pemeriksaan (Wasmalitrik), Penjejak Digital / Patroli Siber, Verifikasi Data Hasil Patroli Siber, Operasi Intelijen yang memberikan gambaran kasus dan kegiatan penggalangan juga bertujuan untuk pembentukan jaringan informan
- Dukungan anggaran termasuk sarana prasarana dan peralatan yang memadai guna mendukung pelaksanaan kegiatan
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan, khususnya untuk komponen yang belum mencapai target.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	93.44	95.35	820,367,000	808,471,498	98.55	-0.032	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah 98.55% yaitu dari alokasi anggaran Rp.820.367.000 direalisasikan sebesar Rp.808.471.498. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan capaian Cukup. Dari segi capaian kinerja belum mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran telah sepenuhnya direalisasikan, dari segi capaian kinerja lebih kecil daripada capaian input (anggaran) artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini tidak efisien.

3.1.6. Sasaran Strategis VI – Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keenam ini. Berdasarkan dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran strategis VI diperoleh rata-rata capaian

sebesar 111,72% dengan kriteria **Sangat Baik**. Capaian indikator di Sasaran Strategis VI didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.16.598.443.000,-**

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.32 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2024

Kode SS	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
06	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83.7	86.58	103.44	Sangat Baik
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	3	3.6	100	Baik

Adapun Penjelasan tabel di atas adalah :

1. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP

Definisi pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) adalah upaya laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.33 Capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83.7	86.58	103.44	Sangat Baik

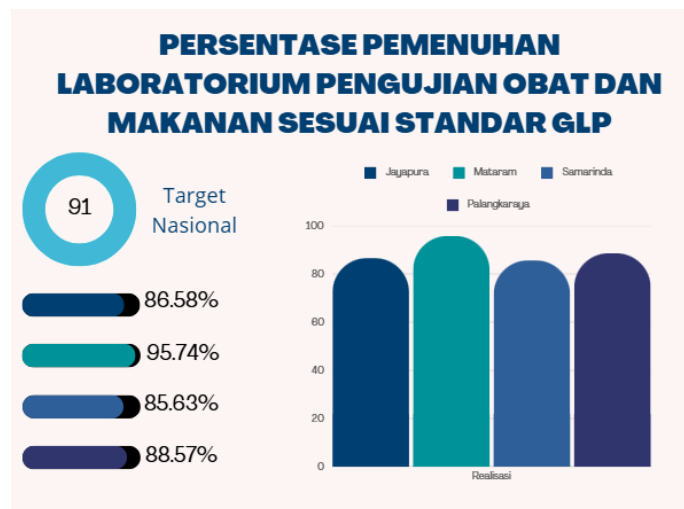
Realisasi indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada Tahun 2024 adalah 86.58 dari target 83.7 dengan capaian 103.44% dan mendapatkan kriteria Sangat Baik.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	2020	79	66.8	84.56
	2021	72	74.10	102.92
	2022	77.0	80.2	104.16
	2023	82	81.58	99.49
	2024	83.7	86.58	103.44

Realisasi indikator persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2024. Capaian kinerja indikator ini juga mengalami kenaikan di tahun 2024 setelah sempat mengalami penurunan di tahun 2023.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara dengan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Mataram dan yang terendah BBPOM di Samarinda. Terhadap target nasional (91) BBPOM di Mataram sudah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Jayapura, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palangkaraya belum mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif

terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium direfleksikan ke dalam tiga aspek komponen *Good Laboratory Practices* (GLP) dan ditetapkan sebagai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Badan POM melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 470 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Untuk memperoleh profil kemampuan pengujian laboratorium Balai Besar/Balai POM, PPPOMN sebagai unit pengampu indikator ini perlu melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan terhadap standar ruang lingkup, standar kompetensi personel, dan terhadap standar peralatan laboratorium setiap triwulan, namun penetapan nilai SKL dilakukan pada akhir tahun. Dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi diharapkan dapat mengawal tercapainya pemenuhan SKL sesuai target akhir tahun 2024. Target indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2024 adalah 83.7%. Dari target tahunan, oleh unit pengampu dilakukan *breakdown* target setiap triwulan dengan frekuensi target secara kumulatif. Pada Triwulan IV tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah memenuhi target yaitu dengan nilai SKL sebesar 86,58% dari target 83,70% yang diperoleh dari persentase pemenuhan ruang lingkup sebesar 88,49%, persentase pemenuhan kompetensi sebesar 94,93%, dan persentase pemenuhan peralatan sebesar 76,32%.

Telah dilakukan penambahan ruang lingkup pada Triwulan IV tahun 2024 antara lain :

1. Penetapan Kadar Cisapride pada sediaan tablet
2. Identifikasi Desonid pada sediaan kosmetik secara KCKT PDA
3. Identifikasi metanol pada sheet mask secara GCMS HSS
4. Identifikasi PABA pada sediaan tabir surya secara KCKT PDA
5. Penetapan Kadar Oksimetoksisinamat, Oksibenzon, Butilmetoksibenzoilmetan, homosalat, Oktil salisilat, Metil Benziliden Camphor, pada sediaan tabir surya dan mandi surya secara KCKT PDA
6. Identifikasi Fenitoin pada sediaan Obat Tradisional secara KLT-Densitometri
7. Identifikasi ALT Non Laktat pada sediaan Suplemen Kesehatan yang mengandung probiotik
8. Identifikasi *Listeria spp* pada sediaan Suplemen Kesehatan yang mengandung probiotik
9. Identifikasi *Salmonella spp* pada sediaan Suplemen Kesehatan yang mengandung probiotik

Adapun kendala yang dihadapi terkait anggaran untuk pembelian peralatan dalam pemenuhan target standar peralatan. Pada tahun 2024 karena adanya *Automatic Adjustment* namun pada

akhir tahun telah dilakukan pembelian alat melalui optimalisasi anggaran sehingga persentase pemenuhan peralatan dapat meningkat pada Triwulan IV.

Tindak lanjut rekomendasi dari Triwulan III yang telah dilakukan antara lain

1. Dilakukan pembelian peralatan sesuai dengan SKL Peralatan
2. Dilakukan bimbingan teknis internal untuk pemenuhan SKL kompetensi

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

1. Membuat perencanaan pemenuhan target SKL secara triwulanan karena pada tahun 2025 penilaian SKL akan dilakukan setiap triwulan
2. Melakukan exercise perhitungan sesuai dengan *tools* baru yang digunakan pada tahun berikutnya . Standar Kemampuan Laboratorium pada tahun berikutnya mencakup SKL Ruang Lingkup, SKL Pemenuhan Kompetensi Laboratorium, SKL Pemenuhan Peralatan, dan SKL Pemenuhan Metode Analisis Terverifikasi.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja:

- Monitoring dan evaluasi rencana pemenuhan Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi yang dilakukan secara berkala (triwulanan). Monitoring dan evaluasi dilakukan sebelum tanggal 20 akhir triwulan berjalan.
- Workshop Pengujian dalam rangka Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium. Kegiatan ini melibatkan seluruh Balai Besar/Balai POM, sehingga pembahasan dilakukan secara komprehensif agar target pemenuhan capaian SKL dapat tercapai dan jika ada kendala dapat segera diselesaikan atau ditindaklanjuti.
- Pengadaan peralatan pada Triwulan III yaitu Conductivity meter, GCMS-HSS, dan Microwave digester
- Peningkatan kompetensi melalui pelatihan internal dan pengerjaan sampel (CP/LCP)
- Pengadaan sampel dan pengerjaan parameter uji sesuai ruang lingkup pengujian

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83.7	86.58	103.44	4,142,354,000	4,121,238,597	99.49	0.039	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah 99.49% yaitu dari alokasi anggaran Rp.4.142.354.000 direalisasikan sebesar Rp.4.121.238.597. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan capaian Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja telah mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran telah sepenuhnya direalisasikan, dari segi capaian kinerja lebih kecil daripada capaian input (anggaran) artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

a) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
- Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing

b) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai: *email, sharing folder, dashboard BOC*, Berita Aktual pada *Subsite* Balai
- Pusat: *email dan dashboard BOC*

c) Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

**Tabel 3.34 Capaian Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	100	Baik

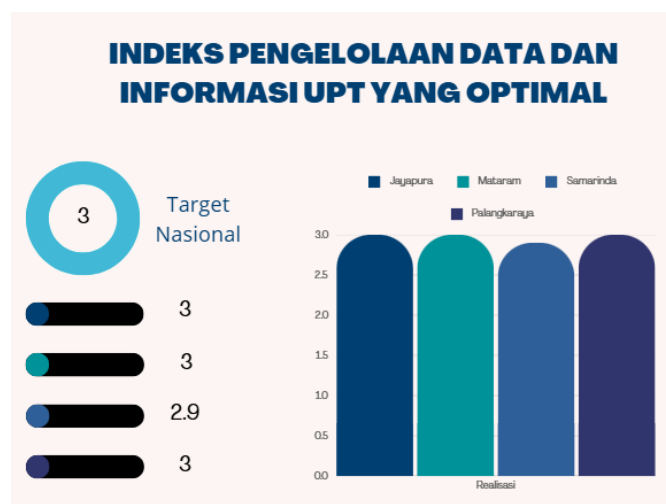
Realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal pada Tahun 2024 adalah 3 dari target 3.6 dengan kriteria Sangat **Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2020	1.51	1.575	104.30
	2021	2	2.025	101.25
	2022	2.25	2.9	128.88
	2023	2.5	2.9	116
	2024	3	3	100

Realisasi dan capaian indikator indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2020, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan merupakan target maksimal dalam perhitungan indikator tersebut.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja yang terendah adalah BBPOM di Samarinda. Sedangkan terhadap target nasional (3) BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, dan BBPOM

di Palangkaraya sudah mencapai target nasional. Untuk BBPOM di Samarinda belum mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal bertujuan untuk menjamin data dan informasi yang tersedia selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran, serta untuk menilai implementasi sistem informasi dalam pelaksanaan proses bisnis unit kerja. Setiap komponen penilaian indeks ini memiliki ketentuan yang berbeda-beda tergantung pada aspek yang dinilai. Komponen penilaian Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal terdiri dari Pemutakhiran data dan Pemanfaatan sistem. BBPOM di Jayapura telah memperoleh penilaian terhadap realisasi indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada Tahun 2024. Penilaian diperoleh dari Pusat Data dan informasi Badan POM. Pencapaian nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura didukung oleh :

1. Pemanfaatan sistem informasi yang terdiri dari : Pemanfaatan *E-mail*, *Dashboard* di BCC, *Sharing Folder* dan Berita Aktual dengan nilai indeks masing-masing 3, kriteria **sangat dimanfaatkan**. Keberhasilan pencapaian dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap saat untuk komponen yang belum mencapai target di akhir bulan.
 - b. Pembagian tugas untuk penyusunan dan upload berita aktual yang telah dilaksanakan dengan konsisten
2. Pemutakhiran data yang terdiri dari : Pemutakhiran data SIPT dan SPIMKer dengan nilai indeks masing-masing 3, kriteria **sangat dimanfaatkan**. Keberhasilan pencapaian dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Data laporan keracunan yang dientri telah diverifikasi tepat waktu
 - b. Masing-masing penanggung jawab di *Role Supervisor* dan Manajer Teknis (MT) melakukan proses terhadap jumlah data pemeriksaan sarana, data sampling dan data pengujian serta adanya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Meskipun indikator ini telah mencapai target, masih terdapat kendala-kendala yaitu masih terbatasnya anggaran untuk pengadaan Alat Pengolah Data terutama laptop untuk pegawai.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Penambahan anggaran untuk pengadaan Alat Pengolah Data terutama laptop untuk pegawai, pemeliharaan sistem jaringan internet untuk menunjang kecepatan kinerja, serta peningkatan sarana dan prasarana IT.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator antara lain :

- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan, khususnya untuk komponen yang belum mencapai target.
- Pembagian tugas yang dituangkan ke dalam SKP untuk masing-masing komponen penilaian.
- Melaksanakan desk Indeks pengelolaan data dan informasi dengan Pusdatin BPOM untuk mensinkronkan data dan monev triwulan dengan Pusdatin
- Meningkatkan akses *email* pegawai dengan mengirimkan *email* pemberitahuan terkait kepegawaian kepada seluruh pegawai
- Pengadaan alat pengolah data berupa laptop, PC, Scanner, Printer, dan Monitor serta pemeliharaan terhadap PC dan Laptop.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	3	3	100.00	12.456.089.000	12.450.780.115	99.95	0.0005	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal adalah 99.95% yaitu dari alokasi anggaran Rp.12.456.089.000 direalisasikan sebesar Rp.12.450.780.115. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal dengan kriteria Baik. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran, artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

3.1.7 Sasaran Strategis VII - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua ini. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS

pada sasaran kegiatan VII diperoleh rata-rata capaian sebesar 109.76% dengan kriteria **Sangat Baik**, capaian indikator di Sasaran Kegiatan VII didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.13.870.000**.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.35 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	67.5	74.09	109.76	Sangat baik

Adapun penjelasan tabel di atas sebagai berikut:

1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Indeks kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambil keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun

Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:

- Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan, seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
- Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Nilai indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *online* dan *offline*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*. Hasil survei oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.36 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	67.5	74.09	109.76	Sangat Baik

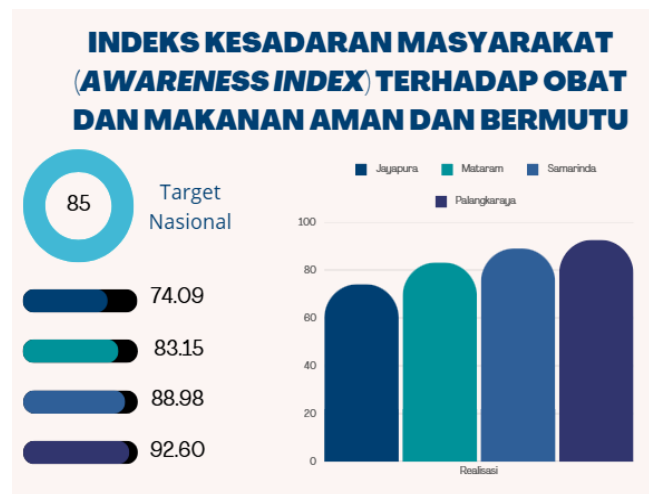
Realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2024 adalah 74.09 dari target 67.5 dengan capaian 109.76% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	2020	72	60.8	84.51
	2021	64	72.57	113.39
	2022	68	65.8	96.76
	2023	71	66.56	93.75
	2024	67.5	74.09	109.76

Realisasi dan capaian kinerja indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mengalami kenaikan di tahun 2024 dibandingkan dari tahun 2020 hingga 2023.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (85), BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palangkaraya telah mencapai target nasional , sedangkan BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Mataram belum mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Indeks kesadaran (*awareness index*) masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dibentuk dari 3 (tiga) indikator yaitu Perilaku, Pengetahuan dan Sikap.

Tujuan pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat adalah untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan dan peningkatan kinerja pengawasan BPOM.

Pada tahun 2024, realisasi Indeks kesadaran (*awareness index*) masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebesar 74.09 lebih tinggi dari target Tahun 2024 67,5.

Dalam mencapai target nilai Indeks Kesadaran Masyarakat di tahun 2024, Balai Besar POM di Jayapura memiliki kendala salah satunya adalah hampir seluruh publikasi kegiatan pengawasan dan KIE dilakukan melalui media sosial walaupun masih banyak daerah yang belum dijangkau jaringan internet sehingga untuk meningkatkan kinerjanya Balai Besar POM di Jayapura akan menambah ragam publikasi melalui media lain (*videotron, talkshow radio/televisi*). Selain itu, Balai Besar POM di Jayapura juga telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai target nilai Indeks Kesadaran Masyarakat di tahun 2024 yaitu:

- Melakukan publikasi kegiatan pengawasan dan KIE melalui media sosial dan *subsite* secara rutin.
- Membuat konten publikasi/edukasi bersama kader/komunitas yang diintervensi program keamanan pangan.
- Melakukan publikasi konten melalui iklan di radio (Radio Bahana Sangkakala).

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Pemberian informasi melalui media sosial dapat dilakukan secara rutin dengan jumlah yang lebih banyak serta biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan media lainnya.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai target kinerja indikator ini, Balai Besar POM di Jayapura harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan secara berkala serta mengadakan kerja sama dengan lintas sektor terkait Obat dan Makanan yang aman.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu publikasi dan KIE. Publikasi melalui koran, radio, televisi dengan tema hasil intensifikasi pengawasan kosmetik, hasil intensifikasi pengawasan pangan hari raya (sarana distribusi pangan dan takjil), Media Sosial dengan tema kegiatan-kegiatan Balai Besar POM di Jayapura sedangkan KIE melalui KASBI dengan tema Cek KLIK dan BPOM *Mobile* serta KIE Media Sosial dengan tema Pengawasan Takjil.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	67.5	74.09	109.76	13,870,000	13,690,000	98.7	0.11	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah 98.7% yaitu dari alokasi anggaran Rp.13.870.000 direalisasikan sebesar Rp.13.690.000.. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dengan kriteria Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran, artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

3.1.8. Sasaran Strategis VIII – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 3 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedelapan ini. Dari ketiga indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai

indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Realisasi Sasaran Strategis ini diperoleh 99,24% dengan kategori **Cukup**. Capaian indikator di Sasaran Strategis VIII didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.368.988.000,-**

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.37 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2024

Kode SS	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
08	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94.6	96.49	102	Sangat Baik
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73	68.7	94.11	Cukup
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	90.5	91.96	101.61	Sangat Baik

Adapun penjelasan tabel di atas sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya.

Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy* yang masing-masing memiliki bobot.

Survei dilakukan secara *online* dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.38 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94.6	96.49	102	Sangat Baik

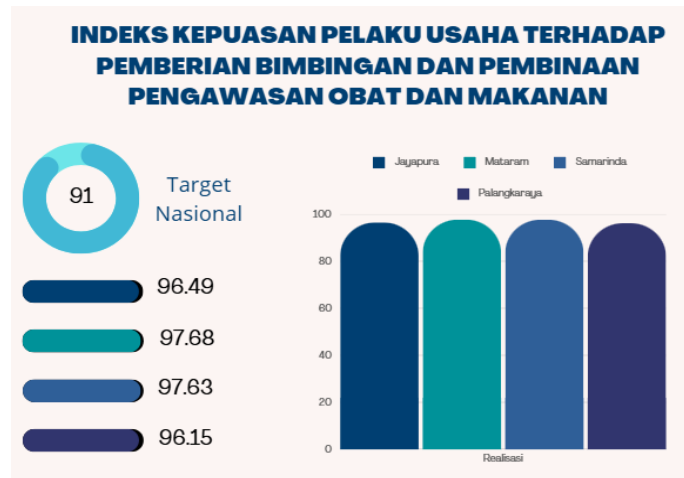
Realisasi indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 adalah 96.49 dari target 94.6 dengan capaian 102% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	2020	83.5	90.59	108.49
	2021	91.1	90.2	99.01
	2022	92.30	94.50	102.38
	2023	93.40	94.4	101.07
	2024	94.6	96.49	102

Realisasi dan capaian kinerja indikator pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan target telah tercapai. BBPOM di Jayapura secara intens melakukan pendampingan/pembinaan kepada pelaku usaha salah satunya dengan program SAGU EMAS PAPUA (Siap Dampingi UMKM Ekonomi Masyarakat Papua).

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Mataram dan yang terendah BBPOM di Palangkaraya. Sedangkan terhadap target nasional (91) BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha atas Bimbingan dan Pembinaan Balai di akhir tahun 2024 adalah 96.49 di atas target yang ditetapkan yaitu 94.6. Nilai tersebut diperoleh dari 5 kegiatan yaitu Konsultasi dan Desk CAPA sertifikasi CDOB. Bimtek CPKB, Bimtek CPPOB, pendampingan UMKM kosmetik dan pendampingan UMKM pangan olahan. Kegiatan Bimtek CPKB dan Pendampingan UMKM Produksi Kosmetik dalam rangka sertifikasi CPKB memberikan nilai indeks yang sangat baik, yaitu 100, namun untuk kegiatan Konsultasi dan Desk CAPA memberikan nilai yang masih cukup baik yaitu 88.73, Bimtek CPPOB memberikan nilai indeks yang baik, yaitu 98.94, dan pendampingan UMKM pangan olahan memberikan nilai indeks 94.80 sehingga nilai keseluruhan sampai akhir pengukuran adalah 96.49 dengan jumlah responden seluruhnya sebanyak 22 responden.

Berdasarkan hasil survei diketahui masih terdapat kegiatan dengan nilai indeks dibawah target, beberapa hal yang menjadi penyebabnya antara lain kemudahan akses untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan, kemudahan materi untuk dipahami dan kecukupan waktu pelaksanaan bimbingan dan pembinaan. Selama ini pelaku usaha mendapatkan bimbingan dan pembinaan baik secara langsung dengan datang ke kantor BBPOM di Jayapura atau Mall Pelayanan Publik maupun secara tidak langsung melalui telepon atau Whatsapp petugas, namun demikian pelaku usaha masih menilai layanan yang diberikan masih belum

sepenuhnya mudah dijangkau. Demikian halnya dengan kecukupan waktu terutama pada saat pelaku usaha konsultasi secara langsung.

Pelaksanaan survei dilakukan secara online pada aplikasi survei dengan memberikan link survei kepada pelaku usaha. Pelaksanaan survei dilakukan juga secara manual dengan menggunakan lembar pertanyaan yang diunduh dari aplikasi dan selanjutnya hasil survei diinput oleh petugas ke dalam aplikasi survei.

Jika dilihat dari jenis kegiatan bimbingan dan pembinaan memberikan informasi bahwa kegiatan yang dilakukan secara intensif, *one on one* atau personal seperti pendampingan menunjukkan nilai kepuasan yang lebih tinggi dibanding kegiatan dengan peserta yang banyak seperti bimtek dan sosialisasi. Pemilihan media pelaksanaan bimbingan dan pembinaan secara daring/hibrid dapat menjadi solusi agar cakupan pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan lebih luas. Hal ini menunjukkan ketersediaan berbagai media yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari petugas.

Meskipun demikian, seringkali terdapat kendala jaringan internet dan pelayanan daring memiliki keterbatasan dibanding pelayanan tatap muka langsung sehingga pelaku usaha tetap menyarankan adanya kegiatan secara luring.

Tercapainya indikator ini didukung oleh :

1. Meningkatnya kompetensi petugas terkait materi bimbingan dan pembinaan yang diberikan.
2. Ketersediaan berbagai media yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari petugas.

Pendampingan/pembinaan salah satunya melalui program SAGU EMAS PAPUA (Siap Dampingi UMKM Papua) secara intens telah dilakukan kepada pelaku usaha di beberapa kabupaten/kota antara lain: Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Keerom. Selain pendampingan melalui program SAGU EMAS PAPUA dilakukan juga desk dan konsultasi CAPA untuk proses sertifikasi CDOB bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang melakukan sertifikasi maupun resertifikasi CDOB.

Realisasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 yaitu 94.4 demikian pula dengan persentase capaian yang juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan terus meningkat yang secara tidak langsung menunjukkan pelayanan dan kompetensi petugas dalam memberikan pembinaan dan bimbingan juga semakin baik.

Dalam mencapai target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, upaya yang dilakukan meliputi :

- Pendampingan, bimbingan teknis, desk, dan sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha dijadwalkan secara rutin
- Pendampingan dilakukan oleh petugas yang kompeten dan berintegritas
- Fasilitas yang memadai selama pendampingan
- *Feedback* yang cepat dan jelas dari petugas terhadap permintaan Informasi pelaku usaha
- Pendampingan dilakukan hingga tuntas.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Peningkatan kompetensi petugas yang memberikan bimbingan dan pembinaan untuk menjawab permasalahan terkait pengawasan obat dan makanan yang terus berkembang.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator, yaitu:

- Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha balik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan petugas yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan materi atau objek bimbingan dan pembinaan yang diberikan.
- penambahan media bimbingan dan pembinaan juga dilakukan untuk memberikan kemudahan pelaku usaha dalam hal mengakses bimbingan dan pembinaan yang diperlukan.
- Peningkatan kompetensi petugas juga terus dilakukan melalui pembelajaran mandiri maupun diskusi internal maupun dengan petugas atau fasilitator di UPT lain.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94.6	96.49	102	179,564,000	176,458,257	98.27	0.037	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan adalah 98.27% yaitu dari alokasi anggaran Rp.179.564.000 direalisasikan sebesar Rp.176.458.257. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan kriteria Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja lebih

besar daripada realisasi anggaran, artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17 - 65 tahun.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *service Quality* (ServQual) yaitu *reliability*, *assurance*, *empathy* dan *responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi :

- Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
- Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
- Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.
- Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.39 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73	68.7	94.11	Cukup

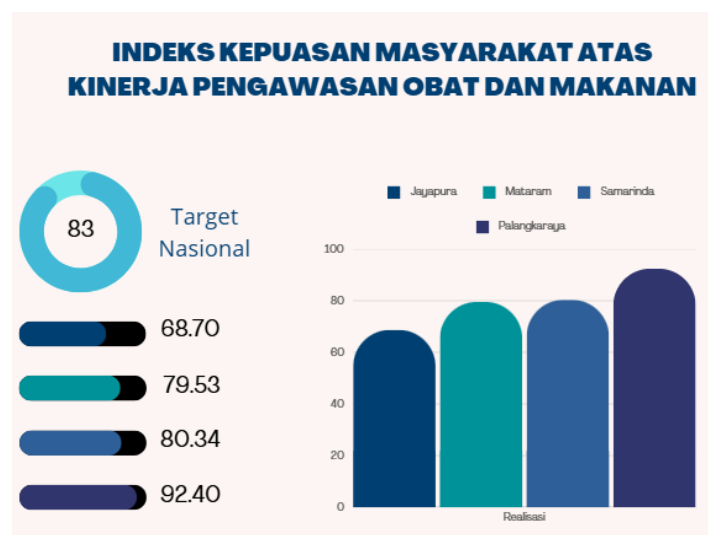
Realisasi indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 adalah 68.7 dari target 73 dengan capaian 94.11% dengan kriteria **Cukup**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	2020	72	63.01	87.51
	2021	64.76	61.70	95.27
	2022	66.51	63.40	95.32
	2023	68.26	72.06	105.57
	2024	73	68.7	94.11

Terdapat penurunan realisasi dan capaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2024. Namun ada tren kenaikan pada tahun 2020-2023 dimana tren ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh BBPOM di Jayapura dalam menjalankan fungsi pengawasan Obat dan Makanan semakin diketahui oleh masyarakat.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (83) BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional, Sedangkan BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, dan BBPOM di Samarinda belum mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam peningkatan pencapaian indeks ini dilakukan kegiatan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai media terutama yang terkait langsung dengan masyarakat misalnya hasil intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari raya, hasil pengawasan pangan buka puasa/takjil, hasil intensifikasi pengawasan produk Kosmetik ilegal/mengandung bahan berbahaya secara konsisten.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebesar 68,7, tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 73.

Dalam mencapai target nilai Indeks Kesadaran Masyarakat di tahun 2024, Balai Besar POM di Jayapura memiliki kendala salah satunya adalah hampir seluruh publikasi kegiatan pengawasan dan KIE dilakukan melalui media sosial walaupun masih banyak daerah yang belum dijangkau jaringan internet sehingga untuk meningkatkan kinerjanya Balai Besar POM di Jayapura akan menambah ragam publikasi melalui media lain (videotron, talk show radio/televisi).

Selain itu, upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jayapura untuk mencapai target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di tahun 2024 yaitu:

- Melakukan publikasi kegiatan pengawasan dan KIE melalui media sosial dan *subsite* secara rutin.
- Membuat konten publikasi/edukasi bersama kader/komunitas yang diintervensi program keamanan pangan.
- Melakukan publikasi konten melalui iklan di radio (Radio Bahana Sangkakala).

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Menambah ragam publikasi melalui media lain bagi daerah dengan jangkauan internet/sarana komunikasi yang kurang, misalnya melalui bahan cetak (contoh banner) yang ditempatkan pada tempat yang banyak dikunjungi masyarakat (puskesmas, kantor polisi, pelabuhan laut).

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai target kinerja indikator ini, Balai Besar POM di Jayapura harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan secara berkala serta mengadakan kerja sama dengan lintas sektor terkait Obat dan Makanan yang aman.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu publikasi dan KIE. Publikasi melalui koran, radio, televisi dengan tema hasil intensifikasi pengawasan kosmetik, hasil intensifikasi pengawasan pangan hari raya (sarana distribusi pangan dan takjil), Media Sosial dengan tema kegiatan-kegiatan Balai Besar POM di Jayapura sedangkan

KIE melalui KASBI dengan tema Cek KLIK dan BPOM *Mobile* serta KIE Media Sosial dengan tema Pengawasan Takjil.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73	68.7	94.11	23,988,000	23,087,620	96.25	-0.022	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah 96.25% yaitu dari alokasi anggaran Rp.23.988.000 direalisasikan sebesar Rp.23.087.620. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan kriteria Cukup. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran, artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini yaitu PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan yaitu :

U1. Persyaratan

U2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

U3. Waktu Penyelesaian

U4. Biaya / Tarif

U5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan

U6. Kompetensi Pelaksana

U7. Perilaku Pelaksana

U8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

U9. Sarana dan Prasarana

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh BPOM.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.40 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90.5	91.96	101.61	Sangat Baik

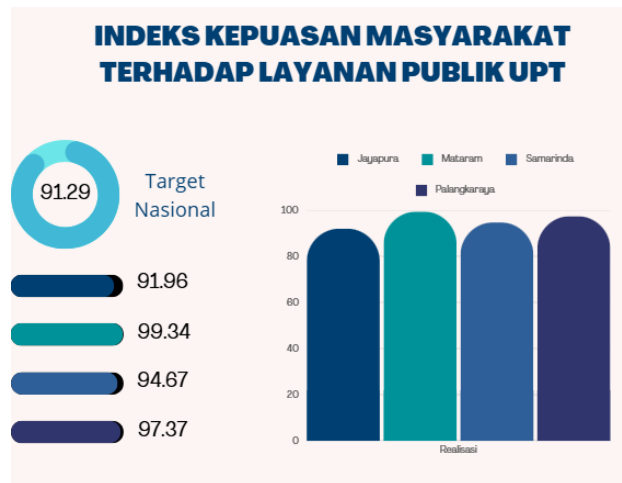
Realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2024 adalah 91.96 dari target 90.5 dengan capaian 101.61% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	2020	88	88.20	100.23
	2021	89.50	91.76	102.53
	2022	90.50	89.4	98.78
	2023	91	90.04	98.95
	2024	90.5	91.96	101.61

Terdapat peningkatan realisasi dan capaian indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2020 hingga tahun 2023.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Mataram dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (91.29) BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Samarinda sudah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Untuk meningkatkan indeks ini dilakukan:

- Forum konsultasi publik standar layanan untuk mendapatkan saran dan masukkan dari pengguna layanan.
- Memberikan pemahaman dan pendampingan yang lebih solutif terhadap pelaku usaha dengan menghubungkan antara pelaku usaha dan lintas sektor terkait yang mempunyai dana bantuan
- Melakukan pelatihan pelayanan publik kepada petugas layanan.

Rekomendasi perbaikan kinerja yang dapat dilakukan berdasarkan Unsur Penilaian :

1. U1 (Persyaratan Pelayanan)
 - a) Review Standar Layanan secara berkala;
 - b) Peningkatan sosialisasi Standar Layanan.
2. U4 (Biaya/Tarif)
 - a) Peningkatan sosialisasi dasar penetapan tarif/biaya layanan.
3. U5 (Produk/Spesifikasi Jenis Pelayanan)
 - a) Peningkatan sosialisasi jenis dan produk layanan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM yaitu:

1. Laboratorium yang terakreditasi ISO/SNI 17025/2017
2. Kompetensi SDM, Alat Laboratorium dan parameter uji lengkap
3. Sistem informasi pelayanan publik sangat memadai (SIPT yang terintegrasi billing pembayaran sampel PNBP, Aplikasi Noken untuk *tracking* hasil uji, dll, aplikasi registrasi produk, aplikasi survei kepuasan pelanggan)
4. Potongan tarif pengujian sampel UMKM
5. SDM dan sarana penunjang pelayanan publik.
6. *Refreshment* Layanan 5S bagi seluruh jenjang petugas pelaksana layanan (petugas keamanan, petugas parkir, *customer service*, petugas pelaksana layanan)

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura	90.5	91.96	101.61	165,436,000	165,344,004	99.94	0.016	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Jayapura adalah 99.94% yaitu dari alokasi anggaran Rp.165.436.000 direalisasikan sebesar Rp.165.344.004. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Jayapura dengan kriteria Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran, artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

3.1.9. Sasaran Strategis IX – Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Pada Sasaran Strategis ini terdapat tiga (3) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kesembilan ini. Pada ketiga indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian

untuk nilai indikator dengan capaian lebih dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Realisasi pada sasaran strategis ini diperoleh 98.29% dengan capaian **Cukup**. Capaian indikator di Sasaran strategis IX didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.914.254.000,-**

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.41 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis IX Tahun 2024

Kode SS	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
09	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB	91.18	86.9	95.31	Cukup
		Nilai AKIP	81.49	76.95	94.43	Cukup
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	92.79	97.56	105.15	Sangat Baik

1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Manajemen Perubahan : bobot 8%
- Penataan Tatalaksana : bobot 7%
- Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot komponen hasil penilaian satker/unit kerja dan BBPOM/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan akuntabel : bobot 22.5%
 - a. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) : 17.50%
 - b. Capaian Kinerja Lebih Baik : 5%
- Terwujudnya Pelayanan Publik yang prima : bobot 17.50%
 - a. Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SKP) : 17.50%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.42 Capaian Kinerja Indikator Indeks RB UPT Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	91.18	86.9	95.31	Cukup

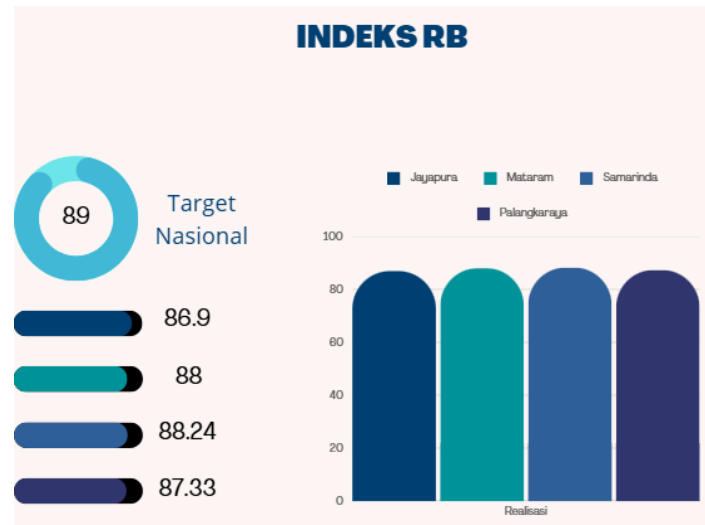
Realisasi indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2024 adalah 86.9 dari target 91.18 dengan capaian 95.31% dengan kriteria **Cukup**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	2020	85	68.65	80.76
	2021	84.8	84.76	99.95
	2022	86.80	90.05	103.74
	2023	88.80	90.18	101.55
	2024	91.18	86.9	95.31

Realisasi indikator indeks RB Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 hingga 2023. Capaian indikator juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 dan 2023 dan target tidak tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, perbandingan realisasi indikator Indeks RB tertinggi adalah BBPOM di Samarinda dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (89), BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Samarinda tidak mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam mendukung capaian indikator ini, Balai Besar POM di Jayapura berkomitmen dari Pimpinan dan seluruh ASN untuk membangun Zona Integritas di unit kerja dan telah menerapkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi serta Budaya Organisasi. Pada tahun 2024, beberapa komponen penilaian mengalami penurunan yaitu pada Komponen Pengungkit Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan pada komponen hasil keduanya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023.

Penilaian		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
A.	Komponen Pengungkit	60.00				
	I. Manajemen Perubahan	8.00	4.00	3.75	7.75	MS
	II. Penataan Tatalaksana	7.00	2.93	2.50	5.43	MS
	III. Penataan Sistem Manajemen SDM	10.00	4.27	3.50	7.77	MS

	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10.00	4.73	3.96	8.69	MS
	V.	Penguatan Pengawasan	15.00	7.13	6.88	14.01	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10.00	3.85	4.59	8.44	MS
TOTAL PENGUNGKIT						52.07	MS
B.	Komponen Hasil		40.00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22.50			19.69	MS
		• Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17.50			17.19	MS
		• Capaian Kinerja lebih baik	5.00			2.50	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17.50				
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17.50			15.14	MS
TOTAL HASIL						34.83	MS
NILAI PMPZI						86.90	MS

Tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura tetap berkomitmen melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Nilai Hasil Evaluasi PMPZI Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024 adalah 86.90 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Adapun yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator ini adalah:

1. Data dukung yang belum memadai terhadap monitoring dan evaluasi pegawai mutasi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja unit dalam bentuk rapat bersama pimpinan
2. Perencanaan pengembangan kompetensi pegawai belum mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
3. Belum terdapat dokumentasi memadai yang menunjukkan keterlibatan pimpinan dalam proses serta monitoring dan evaluasi kinerja
4. Tidak terdapat bukti implementasi kebijakan pemberian *reward* dan *punishment* untuk level tim kerja berdasarkan capaian indikator kinerja
5. Belum terdapat analisis dampak setelah penerapan inovasi SAGU PAPUA serta belum terdapat informasi apakah inovasi yang diterapkan telah mampu mengatasi latar belakang permasalahan atau memenuhi kebutuhan *stakeholder*

6. Inovasi yang dibangun belum terintegrasi dengan manajemen risiko unit kerja, baik sebagai aktivitas maupun atribut pengendalian
7. Secara umum, terdapat kelemahan pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat antara lain:
 - a. Survei telah dilaksanakan setiap bulan, namun penyusunan laporan dan penyusunan rencana tindak lanjut hanya dilakukan per triwulan
 - b. Publikasi hasil survei hanya dilakukan melalui media *online* yaitu melalui *website* dan media sosial
 - c. Tidak terdapat informasi mengenai progres rencana tindak lanjut hasil survei yang telah disusun pada periode sebelumnya
8. Masih terdapat temuan pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti sesuai saran.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai mutasi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja unit dan mendokumentasikan data dukung atau tools penilaian yang relevan
2. Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
3. Mendokumentasikan keterlibatan serta arahan atau masukan pimpinan dalam monitoring dan evaluasi kinerja secara memadai.
4. Mereviu relevansi kebijakan pemberian *reward* dan *punishment* dengan kondisi unit kerja serta menerapkan kebijakan tersebut secara berkelanjutan dan mendokumentasikannya secara memadai.
5. Mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat melalui berbagai media baik *offline* maupun *online*, menyusun laporan survei kepuasan masyarakat serta rencana tindak lanjut sesuai dengan periode survei yang dilakukan dan memonitor progres rencana tindak lanjut yang telah disusun tersebut.
6. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai saran
7. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pernyataan kinerja

Pencapaian indeks RB ini karena komitmen dari Pimpinan dan seluruh ASN untuk membangun Zona Integritas di unit kerja dan penerapan nilai-nilai Reformasi Birokrasi serta Budaya

Organisasi dari Pimpinan Unit Kerja sampai ke level yang paling bawah. Seluruh rencana aksi RB yang telah direncanakan sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

1. Pimpinan telah menjadi *role model* dalam pembangunan ZI serta terlibat memberikan arahan dalam proses monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI secara berkala.
 2. Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI dilakukan secara bulanan dan berkesinambungan di mana terdapat informasi atas progres tindak lanjut rencana perbaikan yang disusun.
 3. Mutasi pegawai telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti kebijakan pola mutasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala unit kerja.
 4. Telah membangun berbagai inovasi dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas manajemen internal maupun pelayanan publik yang berdampak pada transparansi kinerja serta kemudahan dan kecepatan dalam akses pelayanan publik, antara lain:
 - a. Pengujian Sampel Ganja dan Shabu Selesai Satu Hari (PINANGSIRI) yaitu percepatan *timeline* pengujian sampel pihak ketiga berupa ganja dan shabu menjadi 1 hari kerja untuk sampel yang masuk di bawah pukul 12.00 WIT.
 - b. Siap Dampingi UMKM Papua (SAGU Papua) yakni pendampingan secara langsung dan jemput bola kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, atau lembaga lain yang memerlukan pendampingan sertifikasi, layanan desk CAPA, serta registrasi produk.
 - c. Pelayanan Surat Keterangan Ahli bagi Polisi (NUTRISI) berupa tautan pendataan alamat email yang dicantumkan pada subsite <https://jayapura.pom.go.id/>, untuk selanjutnya diberikan akses agar polisi dapat mengunduh Surat Keterangan Ahli tanpa harus datang ke kantor balai serta memberikan data terkait ahli untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - d. Elektronik Pemantauan Performa Kinerja dan Anggaran (E-PAPEDA) untuk memfasilitasi pengisian realisasi data kinerja dan anggaran per bulan.
- Upaya yang dilakukan tersebut berdampak terhadap meningkatnya nilai survei kepuasan masyarakat, Indeks Pelayanan Publik, indeks persepsi Reformasi Birokrasi, nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta efisiensi biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK).
5. Telah melakukan upaya penguatan integritas dan antikorupsi yang berdampak pada menurunnya tingkat keterlambatan pegawai serta meningkatnya indeks profesionalitas ASN, hasil survei persepsi anti korupsi, dan hasil survei *core value* BerAKHLAK berada pada kategori “Cukup”, antara lain:

- a. *Public campaign* pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan secara bulanan melalui media sosial, standing banner.
 - b. Lapo PACE melalui akses pada tautan <https://linktr.ee/lapopace>, dapat dimanfaatkan masyarakat maupun pegawai internal
 - c. Ko Terlambat Kaka (KOTEKA), yaitu inovasi memberikan *punishment* kepada pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja dalam bentuk pemberian atribut topi bertuliskan Ko Terlambat Kaka serta sanksi lainnya
 - d. Catatan Daftar Risiko untuk Pengawasan Internal dan Benturan Kepentingan (CENDRAWASIH BEKEN) yang dapat diakses melalui bit.ly/CendrawasihBeken, untuk memudahkan pegawai dalam menginventarisasi dan mengidentifikasi risiko-risiko maupun potensi benturan kepentingan
6. Telah memiliki kebijakan reward dan punishment bagi petugas pelayanan publik yang meliputi unsur penilaian kedisiplinan, kinerja petugas, serta penilaian pengguna layanan yang diimplementasikan secara bulanan.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Indeks RB	91.18	86.9	95.31	873,311,000	861,124,968	98.60	-0.03	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Indeks RB adalah 98.60% yaitu dari alokasi anggaran Rp.873.311.000 direalisasikan sebesar Rp.861.124.968. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks RB dengan kriteria Cukup. Dari segi capaian kinerja lebih kecil daripada realisasi anggaran, artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini tidak efisien.

2. Nilai AKIP UPT

Berdasarkan PP No.8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB NO.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja

Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain:

Komponen	Subkomponen 1 Keberadaan 20%	SubKomponen 2 Kualitas 30%	Subkomponen 3 Pemanfaatan 50%	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4.5	7.5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	5	7.5	12.5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.43 Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP UPT Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	81.49	76.95	94.43	Cukup

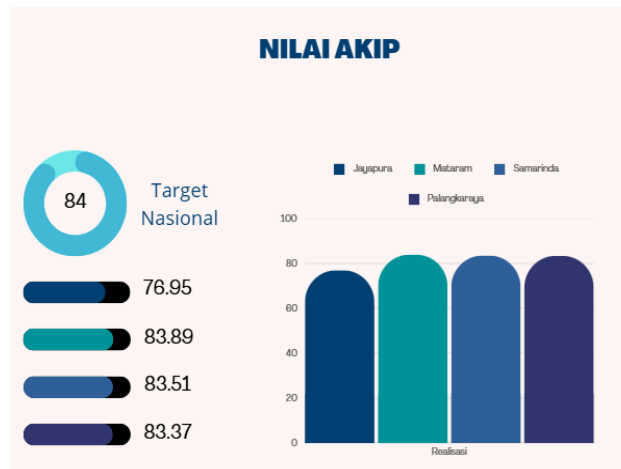
Realisasi indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2024 adalah 76.95 dari target 81.49 dengan capaian 94.43% dengan kriteria **Cukup**. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun 2024 merupakan penilaian AKIP dari tahun 2023.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	2020	80	77.22	96.53
	2021	79.7	78.96	99.07
	2022	82.2	78.25	95.19
	2023	84.70	78.5	92.68
	2024	81.49	76.95	94.43

Realisasi indikator nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020-2023 tetapi capaian indikator tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Mataram dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (84) BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palangkaraya belum mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta evaluasi perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024 belum mencapai target. Nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam hal ini Inspektorat I sebagai evaluator terdiri dari 5 (lima) komponen penilaian dengan hasil penilaian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	24	18,96	17,76
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,00	18,00
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48	9,12
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,00	15,80
5.	Capaian Kinerja	20	16,06	16,28
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,50	76,96
Predikat			BB	BB

Pada tahun 2024, nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura mengalami penurunan dari tahun 2023. Dalam pencapaian ini Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan *desk* penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat I pada tanggal 22 November 2024

2. Telah dilakukan penyusunan Laporan Monev (Bappenas, RHPK, RAPK, Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja) sampai dengan Triwulan IV secara tepat waktu sesuai dengan SOP Pengumpulan Data
3. Telah dilakukan penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA. 2025 dan DIPA TA. 2025 telah terbit di tanggal 2 Desember 2024 dengan pemblokiran anggaran perjadi 50% per masing-masing kegiatan dengan akun perjadi secara sistem.

Namun dalam pencapaiannya terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

- Proses penyesuaian target hanya mempertimbangkan tren pencapaian dan belum didukung dengan justifikasi lainnya yang komprehensif. Penetapan RAPK juga tidak didasari dengan dokumen yang valid karena PK belum disahkan, untuk perubahan RAPK pada 22 Agustus 2025 belum terdapat PK.
- Berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi Akhir Renstra terdapat beberapa indikator yang perkembangan kinerjanya menurun serta terdapat Realisasi/capaian IKU dengan trend perkembangan kinerja stagnan/tidak mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena proses perencanaan dan penyusunan target yang belum optimal yang belum mempertimbangkan variabel lain selain tren pencapaian
- Belum menyusun Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2020-2024
- Penyusunan target kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Kinerja Anggaran belum berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan/justifikasi yang jelas
- Belum melampirkan data dukung berupa SKP Kepala BBPOM di Jayapura tahun 2024 yang dilampirkan/upload belum disahkan.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Adanya ketidaksesuaian mekanisme pengumpulan data kinerja sebagai berikut
Belum terdapat alur yang menggambarkan adanya mekanisme yang mengatur apabila terjadi kesalahan/perubahan data termasuk dokumentasi kondisi sebelum - sesudah serta justifikasinya; Belum secara spesifik mencantumkan penanggung jawab data baik kesalahan internal atau data yang dikembalikan dari Biro Perencanaan dan Keuangan selaku Unit Pengampu; Belum mencantumkan sumber data kinerja yang valid seperti SIPT/SAKTI; Terdapat kelemahan dalam pengaturan timeline penginputan data, dimana untuk input data oleh masing-masing bagian maksimal 2 (dua) HK, namun data tersebut baru terkunci 5 (lima) HK setelah PIC pengumpul data melaksanakan verifikasi data. Sehingga masing-masing bagian (pemilik data) masih dimungkinkan merubah data tanpa dilaporkan kepada PIC

pengumpul data, yang mana dapat mengganggu proses verifikasi dan berpotensi terjadinya ketidaksesuaian timeline pengumpulan data kinerja.

- b. Belum terdapat monitoring atas tindak lanjut dari rekomendasi TW sebelumnya di dalam dokumen LEI
 - c. Berdasarkan hasil sampling kertas kerja awal perhitungan realisasi dan capaian pada Indikator "Pengujian dan Sertifikasi", telah terdapat perhitungan target dan *cut off* data yang jelas, namun proses apabila ada perubahan capaian pada indikator tersebut belum terdokumentasi (menyajikan informasi kondisi perubahan sebelum/sesudah perubahan).
 - d. Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang diisikan pada aplikasi SIMETRIS belum selaras dengan RTL yang telah ditetapkan dalam dokumen LEI.
 - e. Terdapat beberapa IKU yang sudah efisien namun belum menjelaskan upaya yang mendukung hal tersebut serta terdapat IKU yang tidak efisien namun belum menjelaskan faktor penyebab/kendala
 - f. Belum terdapat dasar yang jelas dalam hal dokumen PK yang menjadi dasar dalam proses pengukuran pada akhir tahun maupun selama periode berjalan
3. Pelaporan
- a. Terdapat perbedaan penyajian data realisasi dan capaian antar dokumen pelaporan kinerja
 - b. Laporan Kinerja Interim belum menjelaskan indikator keberhasilan atas RTL yang telah dilaksanakan terutama dengan menyajikan informasi kondisi sebelum dan sesudah RTL
 - c. Terdapat kekurangan dalam penyajian pemanfaatan informasi kinerja pada Laporan Kinerja Tahunan 2023 dimana belum secara spesifik menjelaskan indikator yang dilakukan penyesuaian dan belum menjelaskan besaran nilai atas penyesuaian anggaran
 - d. Belum menyampaikan Laporan Kinerja Interim TW III 2024
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Terdapat ketidakselarasan penyajian data target *output* antara Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA), Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Tahunan 2023
 - b. Monitoring RTL untuk IKU yang belum berhasil memenuhi capaian kinerja pada tahun 2023 belum disajikan pada Laporan Evaluasi Internal periode berikutnya
 - c. Penyajian dalam RHPK belum didukung dengan kertas kerja perhitungan dan data sumber yang dapat menjelaskan rincian data pembilang dan penyebut sesuai kamus indikator dalam manual IKU

- d. SK Tim Pengelola SAKIP Tahun 2024 belum menyebutkan personil yang ditunjuk untuk mengelola kinerja dari masing-masing fungsi serta belum terdapat bukti dukung yang dapat membuktikan bahwa seluruh personil yang telah ditetapkan dalam SK telah memiliki sertifikat keikutsertaan sosialisasi/bimtek/pelatihan terkait SAKIP.

5. Capaian Kinerja

No	Kriteria	Tahun 2022		Tahun 2023		Keterangan
		Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	
5a	Kinerja <i>output</i>					
1	Target dapat dicapai	AA	3.75	AA	3.75	Indikator kinerja tahun 2023 sebanyak 0% tidak tercapai.
2	Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	A	3.00	A	3.04	Indikator kinerja tahun 2023 sebanyak 19,05% capaiannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya
5b	Kinerja <i>outcome</i>					
1	Target dapat dicapai	BB	4.74	BB	4.96	Indikator kinerja tahun 2023 sebanyak 20,69% tidak tercapai
2	Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	BB	4.57	BB	4.53	Indikator kinerja tahun 2023 sebanyak 27,59% capaiannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

1. Perencanaan Kinerja

- Memastikan bahwa seluruh perubahan/penyesuaian atas sasaran/target pada periode berjalan didukung dengan usulan/persetujuan Rorenkeu selaku Unit Pengampu.
- Menetapkan target kinerja dengan baik dan berdasarkan basis data yg memadai, tidak sebatas mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil kajian/data lain yang relevan sebagai data dukung penetapan target kinerja.
- Melaporkan dan mendokumentasikan secara tertib seluruh dokumen kinerja mulai tahap perencanaan, perubahan, sampai dengan pelaporan sesuai ketentuan.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria tahapan pengumpulan data kinerja yang baik seperti:
- Terdapat mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data dan secara spesifik menyebutkan penanggung jawab bila terjadi kesalahan tersebut;
 - Mencantumkan informasi sumber data pengumpulan kinerja yang valid dan mudah telusur, serta dilengkapi dengan kertas kerja pengukuran data kinerja;

- Memastikan tahapan pengendalian internal dalam proses pengukuran dan pelaporan data kinerja telah memadai, termasuk dalam hal pengaturan timeline penginputan data.
 - b. Mendokumentasikan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal triwulanan terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap RTL dari periode sebelumnya yang mendukung upaya pemenuhan target kinerja yang belum tercapai, ataupun dalam rangka mempertahankan target yang sudah tercapai.
 - c. Memastikan keselarasan inputan kinerja pada aplikasi SIMETRIS telah selaras dengan hasil pengukuran pada dokumen kinerja lainnya.
 - d. Menyajikan analisa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk upaya yang telah dilaksanakan apabila sudah efisien, dan kendala/hambatan yang dihadapi jika belum efisien serta tindak lanjutnya.
 - e. Memastikan bahwa proses pengukuran data kinerja (realisasi/capaian) telah didukung dengan dasar dokumen yang jelas dan sah.
3. Pelaporan Kinerja
- a. Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja.
 - b. Melengkapi Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan informasi tindak lanjut rekomendasi triwulan sebelumnya dan indikator keberhasilan atas rencana aksi yang telah dijalankan (kondisi sebelum dan sesudah rencana aksi).
 - c. Melengkapi Laporan Kinerja Tahunan dengan analisa pemanfaatan informasi kinerja terhadap setiap IKU untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang serta upaya pencapaian kinerja agar lebih optimal.
 - d. Menyusun inovasi terkait mekanisme pelaporan kinerja yang berdampak terhadap peningkatan pencapaian kinerja dapat dijadikan referensi oleh Satker lain.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian, serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target.
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas RTL secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu

kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu.

- c. Mengoptimalkan peran tim pengelola SAKIP serta memastikan bahwa seluruh pegawai yang termasuk ke dalam tim memiliki kompetensi yang memadai dibuktikan dengan adanya sertifikat sosialisasi/bimtek/pelatihan terkait SAKIP.
- d. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian nilai AKIP antara lain:

1. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggung jawab kegiatan sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat.
2. Peningkatan kualitas SDM pengelola akuntabilitas.
3. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP
4. Melakukan self assesment penilaian secara mandiri pada pengisian LKE SAKIP
5. Pelaporan monev yang dikumpulkan secara tepat waktu

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Nilai AKIP	81.49	78.5	94.43	40,943,000	40,942,477	99.99	-0.055	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Nilai AKIP adalah 99.99% yaitu dari alokasi anggaran Rp.40.943.000 direalisasikan sebesar Rp.40.942.477. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Nilai AKIP dengan kriteria Cukup. Dari segi capaian kinerja lebih kecil daripada realisasi anggaran, artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini tidak efisien.

6. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

- 1) Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);

- 2) Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
- 3) Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
- 4) Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
- 5) Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Sumber Data adalah hasil penilaian kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Badan POM Tahun 2024 yang telah dilakukan verifikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tanggal 17 Juli 2024.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.44 Capaian Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Pengelolaan Kearsipan	92.79	97.56	105.15	Sangat Baik

Realisasi indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan pada Tahun 2024 diperoleh 92.79 dari target 97.56 dengan capaian 105.15 dan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Jayapura	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	92.79	97.56	105.15

Realisasi indikator nilai Pengelolaan kearsipan Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020-2023 karena indikator tersebut ada pada tahun 2024.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Jayapura dan yang terendah BBPOM di Samarinda. Target nasional terhadap indikator tidak ada ditentukan sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024, BBPOM di Jayapura telah mendapatkan 1 (satu) pegawai dengan jabatan fungsional Arsiparis Ahli Pertama hasil seleksi rekrutmen CASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) di lingkungan BPOM. Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan Badan POM tanggal 5 Desember 2024
2. Membaharui Data Arsip Aktif di Unit Pengolah dan Unit Kearsipan II
3. Membaharui Data Arsip Inaktif di Unit Kearsipan II
4. Penyusunan Daftar Arsip Usulan Pemusnahan Triwulan IV Tahun 2024
5. Pengembangan kompetensi anggota tim kearsipan secara mandiri berupa modul E-Learning Kearsipan melalui pembelajaran daring (*online*) yang diselenggarakan oleh PPSDM Badan POM melalui aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*)

Sehubungan dengan pencapaian tersebut ditemukan juga beberapa kendala diantaranya:

1. Seluruh anggota tim arsip telah melakukan pendaftaran secara *online* untuk mengikuti Bimtek Kearsipan yang diselenggarakan ANRI pada *Website* resmi ANRI. Ada 3 (tiga) orang yang mendapatkan panggilan untuk mengikuti Bimtek tetapi tidak terlaksana karena anggaran tidak tersedia (diblokir). Pengembangan kompetensi anggota tim arsip melalui

IDEAS secara online meskipun hal ini belum memenuhi penilaian Audit Pengawasan Internal karena penilaian mewajibkan Bimtek yang dilaksanakan oleh ANRI atau Pusdiklat/PPSDM lain yang menyelenggarakan diklat kearsipan.

2. Capaian nilai untuk Aspek Sarana Prasarana Unit Kearsipan II belum sesuai standar karena Pengadaan Sarana Prasarana Arsip belum maksimal dilakukan di Tahun 2024 berdasarkan Nota Dinas Usulan Pengadaan Sarana Prasarana dari Tim Arsip karena keterbatasan anggaran
3. Arsip Aktif sebagian disimpan di ruang *Record Center* (bercampur dengan Arsip Inaktif) dan sebagian di ruang kerja pegawai karena belum ada ruang *Central File*, terutama untuk dokumen arsip Keuangan dan Tata Usaha.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

1. Sertifikasi Kompetensi Arsiparis
2. Pengalokasian dana untuk pengembangan kompetensi SDM Kearsipan berupa keikutsertaan pada Diklat Kearsipan
3. Dialokasikan dana untuk pemenuhan Sarana Prasarana Unit Kearsipan II berupa pengadaan:
 - a. Partisi di ruang Arsip Inaktif
 - b. CCTV
 - c. Dehumidifier
 - d. AC (AC sebelumnya dalam kondisi rusak berat)
 - e. Termohigrometer
 - f. Tabung Arsip
 - g. Laci besi untuk penyimpanan arsip seperti PETA
 - h. Penambahan rak arsip
 - i. Lemari tahan api untuk penyimpanan arsip kepegawaian
 - j. Container/Map untuk penyimpanan arsip foto
4. Perbaikan *layout* ruang *Record Center* berupa pemasangan partisi untuk antara ruang Layanan dan Pengolahan/Penyimpanan Arsip
5. Penyediaan ruangan *Central File* untuk menyimpan Arsip Aktif terutama untuk Arsip Aktif Keuangan dan Pengujian

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator ini adalah :

1. Komitmen pengelola arsip di tiap Unit Pengolah Arsip dan Unit Kearsipan II dalam melakukan penciptaan, pengelolaan, dan penataan arsip

2. Pemenuhan ABK Jabatan Fungsional Arsiparis dari Rekrutmen PPPK di Tahun 2024 dapat meningkatkan capaian nilai kearsipan untuk Unsur Penilaian SDM Unit Kearsipan II
3. Seluruh anggota tim arsip telah melakukan pengembangan kompetensi melalui IDEAS, meskipun hal ini belum memenuhi penilaian Audit Pengawasan Internal karena penilaian mewajibkan Bimtek yang dilaksanakan oleh ANRI atau Pusdiklat/PPSDM lain yang menyelenggarakan diklat kearsipan
4. Telah memenuhi sarana prasarana kearsipan berupa rak arsip

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Nilai Pengelolaan Kearsipan	92.79	97.56	105.15	196,658,000	196,644,330	99.99	0.051	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Nilai Pengelolaan Kearsipan adalah 99.99% yaitu dari alokasi anggaran Rp.196.658.000 direalisasikan sebesar Rp.196.644.330. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan kriteria Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran, artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

3.1.10. Sasaran Kegiatan X – Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kesepuluh ini. Dari indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS), dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Realisasi pada sasaran strategis ini diperoleh 95.38% dengan kriteria **Cukup**. Capaian indikator di Sasaran Strategis X didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.311.336.000,-**

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.45 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis X Tahun 2024

Kode SS	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91.08	86.88	95.39	Cukup

Adapun Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks Profesionalitas ASN UPT

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi : Kualifikasi pendidikan Formal PNS dari jenjang yang paling tinggi sampai jenjang yang paling rendah. Pengukuran pada pendidikan formal terakhir yang telah diakui atau disahkan oleh BKN . Kontribusi untuk dimensi ini adalah 25%
- Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah diikuti dan mempunyai kesesuaian dengan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Kontribusi untuk dimensi kompetensi sebesar 40%. Indikator yang digunakan untuk pengukuran dimensi ini adalah : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Kursus dan sejenisnya
- Kinerja : Kontribusi sebesar 30% dari keseluruhan pengukuran indikator yang digunakan yaitu Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai
- Disiplin : mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Kontribusi sebesar 5% dari indikator yang digunakan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.46 Capaian Kinerja Indikator Nilai Profesionalitas ASN UPT Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Profesionalitas ASN BBPOM Jayapura	91.08	86.88	95.39	Cukup

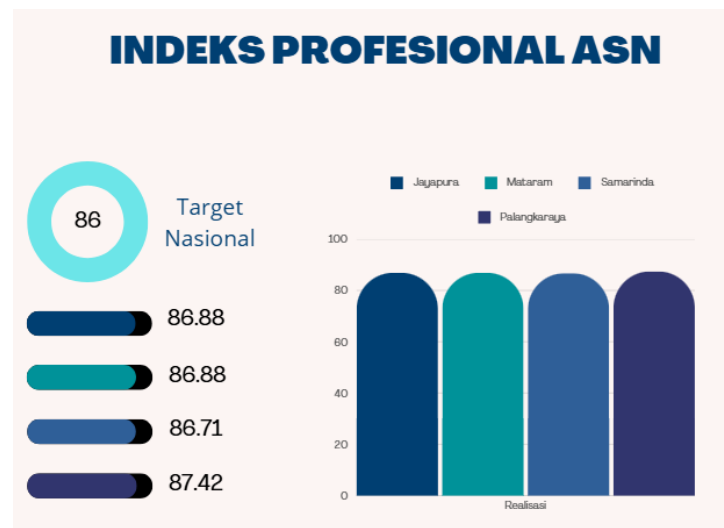
Realisasi indikator Nilai Profesionalitas ASN BBPOM Jayapura pada Tahun 2024 diperoleh 86.88 dari target 91.08 dengan capaian 95.38 dan kriteria **Cukup**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	2020	75	83.44	-
	2021	84	84.93	-
	2022	84.4	85.4	-
	2023	84.8	90.70	-
	2024	91.08	86.88	95.39

Realisasi indikator nilai Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020-2023 karena indikator tersebut ada pada tahun 2024.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan target nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya sedangkan yang terendah BBPOM di Samarinda. Sedangkan terhadap target nasional (86) BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gabungan dari beberapa komponen penilaian yaitu: kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai meliputi diklat kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%.

Upaya yang telah dilakukan Balai besar POM di Jayapura, untuk pencapaian indikator ini antara lain:

1. Pelaksanaan pemenuhan kompetensi pegawai, yaitu: Diklat Fungsional pada Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang Terampil dan Mahir
2. Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis pegawai di beberapa fungsi melalui Pelatihan Mandiri maupun kegiatan terpadu serta pelatihan mandiri lainnya yang diikuti melalui aplikasi IDEAS
3. Konsistensi pelaksanaan program inovasi JUBI dan Koteka
4. Monitoring dan evaluasi capaian pemenuhan 20 Jam Pelajaran secara rutin
5. Komunikasi, koordinasi, dan pendampingan oleh Biro SDM BPOM
6. Penilaian SKP secara berkala dan tepat waktu
7. Monev pelaksanaan pengembangan kompetensi tahun 2024 dan perencanaan pengembangan kompetensi tahun 2025

Namun, dalam upaya tersebut ditemukan beberapa kendala sehingga tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 sesuai Surat Deputy Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/BM.02.01/SD/K/2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024. Perubahan dimensi penilaian IP ASN Tahun 2024 adalah
 - a. Pegawai yang dinilai untuk IP ASN 2024 adalah PNS dan PPPK, rata-rata pegawai PPPK belum melaksanakan diklat fungsional
 - b. Nilai kinerja ditambahkan sebagai komponen pada dimensi kompetensi dengan bobot 25 dari nilai 40. Salah satu penurunan nilai IP ASN BPOM pada tahun 2024 dikarenakan rata-rata nilai kinerja pegawai BPOM adalah Baik (20), sehingga nilai maksimal pegawai pada dimensi kinerja adalah 35
2. IP ASN Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2023 adalah 90.70 dan IP ASN Tahun 2024 adalah 86.88 dimana terdapat penurunan nilai IP ASN sebesar 3,82 yang dipengaruhi oleh perubahan pengukuran IP ASN sesuai peraturan Badan Kepegawaian Negara
3. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil pengukuran IP ASN dengan penurunan nilai, dikarenakan antara lain masih ada pegawai yang belum mengikuti diklat fungsional/diklat teknis.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Memberikan penugasan kepada jabatan pegawai untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional/diklat teknis serta mengikuti seminar/workshop/sejenisnya minimal 20 Jam Pelajaran.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Telah dilakukan pengukuran IP ASN Tahun 2024 dengan menggunakan aplikasi IP ASN BPOM untuk masing-masing dimensi yaitu:

- Dimensi Kualifikasi: mengambil data dan Riwayat Pendidikan Terakhir pada aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir pegawai;
- Dimensi Kompetensi: dikonversi data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja dengan data dari Riwayat Pengembangan Kompetensi pada aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP sudah terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM)
- Dimensi Kinerja: mengambil data dari aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN
- Dimensi Disiplin: mengambil data disiplin dari SIASN

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	91.08	86.88	95.39	311.336.000	310.038.501	99.58	-0.04	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Indeks Profesionalitas ASN BBPOM Jayapura adalah 99.58% yaitu dari alokasi anggaran Rp.311.336.000 direalisasikan sebesar Rp.310.038.501. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BBPOM Jayapura dengan kriteria Cukup. Dari segi capaian kinerja lebih kecil daripada realisasi anggaran, artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini tidak efisien.

3.1.11. Sasaran Kegiatan XI– Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Pada Sasaran Strategis ini terdapat empat (4) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kesebelas ini. Dari keempat indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Realisasi pada sasaran strategis ini diperoleh 110.56% dengan kriteria

Sangat Baik. Capaian indikator di Sasaran Strategis XI didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.412.106.000,-**.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.47 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2024

Kode SS	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.48	90.31	100.92	Sangat Baik
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	95	135.71	Tidak dapat disimpulkan
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	85	98.19	115.52	Sangat Baik
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	63.48	105.8	Sangat Baik

Adapun Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun 13 (tiga belas) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- Revisi DIPA
- Deviasi Halaman III DIPA
- Pengelolaan UPrekon LPJ Bendahara
- Data Kontrak
- Penyelesaian Tagihan
- Penyerapan Anggaran
- Retur SP2D
- Perencanaan Kas (Renkas)
- Pengembalian/Kesalahan SPM
- Dispensasi Penyampaian SPM
- Pagu Minus

l) Konfirmasi Capaian *Output*

Komponen NKA mengalami perubahan berdasarkan PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang ditindaklanjuti dengan KMK nomor 466 tahun 2023 terdapat perubahan penilaian Kinerja Perencana Anggaran K/L dimana Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagai berikut :

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.48 Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM Jayapura	89.48	90.31	100.92	Sangat Baik

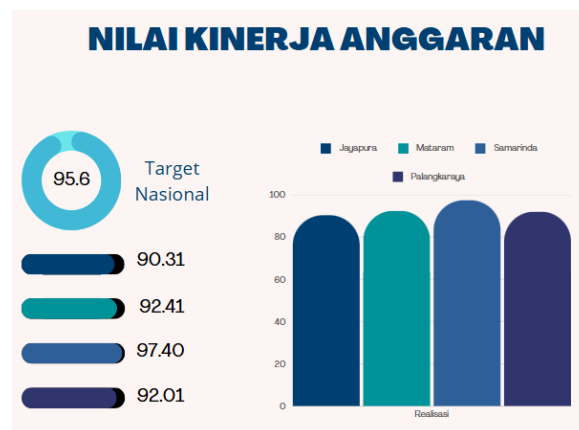
Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jayapura pada Tahun 2024 adalah 90.31 dari target 89.48 dengan capaian 100.92% dan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	2020	93	88.326	94.97
	2021	92.3	89.83	97.33
	2022	92.90	89.80	96.66
	2023	94.10	88.72	94.28
	2024	89.48	90.31	100.92

Realisasi dan capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2023.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Samarinda dan yang terendah adalah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (95.6) BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, dan BBPOM di Palangkaraya belum mencapai target nasional. BBPOM di Samarinda telah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024 dengan adanya PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang ditindaklanjuti dengan KMK nomor 466 tahun 2023 terdapat perubahan penilaian Kinerja Perencana Anggaran K/L dimana Nilai Kinerja Anggaran (NKA) terdiri dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) : Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 50% : 50% dari semula 40% : 60%. Nilai IKPA dilakukan per bulan yang terdiri dari 8 (delapan) komponen yang dinilai antara lain : Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, capaian output) sedangkan Nilai EKA terdiri dari 2 komponen yaitu Efektivitas (capaian RO) dan Efisiensi (implementasi SBK) yang diperoleh pada akhir tahun. Pada Triwulan III berdasarkan surat Sekretaris Utama BPOM nomor B-PR.07.2.21.05.24.382 tanggal 14 Mei 2024 hal Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada RAPK Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2024, maka dilakukan penyesuaian kembali terhadap target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jayapura dimana pengukuran kedua pembentuk NKA akan diperoleh pada akhir tahun pelaksanaan anggaran (bulan Desember). Hal ini disebabkan karena terdapat perubahan bobot indikator, komponen pembentuk indikator, maupun waktu pengukuran dan penilaian IKPA. Mengacu pada Juknis penilaian DIPA, penilaian indikator revisi DIPA dan indikator kinerja belanja kontraktual menggunakan basis data per semester, dan indikator kinerja Dispensasi SPM pada akhir tahun menjadi pengurang nilai akhir IKPA setahun.

Pada Tahun 2024, nilai Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPOM di Jayapura sebesar 96,42 dengan bobot 50% menjadi 48,21 sedangkan untuk nilai Perencanaan Anggaran (EKA) sebesar 84,19 dengan bobot 50% menjadi 42,095 sehingga realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah 90,31.

MONEV ≡ BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Role Pilih TA (2024) Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan 25 entri Carit:

No. ↕	Kode Satuan Kerja ↕	Satuan Kerja ↕	NK Perencanaan Anggaran ↕	NK Pelaksanaan Anggaran ↕	Nilai Kinerja Anggaran ↕
1	432985	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	84,19	96,42	90,31

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya 1 Selanjutnya

Pencapaian nilai Perencanaan Anggaran (EKA) belum maksimal dimana untuk komponen penilaian efisiensi SBK dengan bobot 15% diperoleh hasil 0% dikarenakan pada RO SBK yaitu Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Jayapura pada bulan Januari telah dilakukan *Automatic Adjustment* (AA) sebesar 36,45% sedangkan pada ketentuan efisiensi SBK yaitu Efisiensi Alokasi Per RO SBKK bernilai lebih dari 20% serta kurang dari 0% akan diperhitungkan 0%. Untuk komponen penilaian penggunaan SBK dengan bobot 10% memperoleh hasil maksimal sedangkan Capaian RO dengan Bobot 75% diperoleh hasil belum maksimal (98,92) dimana pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) RO yang tidak mencapai target yaitu UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT dikarenakan tidak semua sarana tersebut menunjukkan progress yang baik selama proses pendampingan. Terdapat beberapa kondisi yang ditemui selama pendampingan yang menyebabkan sarana tidak dapat melanjutkan proses pendampingan hingga mendapatkan sertifikat IP CPPOB untuk sarana pangan atau persetujuan denah untuk sarana kosmetik antara lain belum ada badan usaha yang mengelola sarana produksi yang sudah dibangun, bangunan tempat produksi belum memenuhi kaidah CPPOB, pelaku usaha tidak menunjukkan komitmen untuk mengikuti setiap tahapan pendampingan, tidak merespon saran dan permintaan perbaikan dari petugas, pelaku usaha tidak lagi melanjutkan kegiatan produksi, pelaku usaha mengalami kendala KSWP yang tidak valid sehingga tidak dapat melakukan pengajuan IP CPPOB.

Pencapaian nilai Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan untuk peningkatan antara lain :

- ❖ Penyerapan anggaran. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran terhadap Pagu Awal sebesar 87,95% sedangkan terhadap Pagu Akhir (Blokir AA dan penghematan perjadi) sebesar 99,60%. Realisasi per jenis belanja terhadap pagu akhir terdiri dari Belanja Pegawai 99,94%, Belanja Barang 99,27% dan Belanja Modal 99,65%. Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan target dan nilai kinerja penyerapan yaitu berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Nilai penyerapan di akhir tahun mempengaruhi nilai penyerapan di triwulan sebelumnya, dimana triwulan II target penyerapan anggaran tidak tercapai sesuai dengan target nasional per jenis belanja dimana untuk jenis belanja modal masih dalam proses pelaksanaan pengadaan sedangkan untuk jenis belanja barang juga belum tercapai secara maksimal.
- ❖ Deviasi Halaman III DIPA. Pemutakhiran RPD setiap triwulan telah dilakukan tepat waktu. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Pemutakhiran RPD halaman III DIPA telah dilakukan pada awal TW IV bulan Oktober, namun pada bulan November terdapat penghematan anggaran berupa pengurangan belanja barang

(perjalanan dinas) sebesar 355.888.000 dan tidak bisa lagi dilakukan penyesuaian RPD. Hal ini menyebabkan terjadinya deviasi pada jenis belanja barang (52) sehingga nilai Deviasi Halaman III DIPA belum maksimal.

- ❖ UP dan TUP. Komponen ini terdiri dari ketepatan waktu revolving dengan batas waktu tidak lebih dari 30 hari kalender dan jumlah revolving harus 100%. Sedangkan pada pelaksanaannya di Triwulan II, terdapat keterlambatan revolving yang mengakibatkan nilainya terakumulasi sampai akhir tahun.
- ❖ Belanja Kontraktual. Pada tahun 2024, untuk indikator belanja kontraktual terdapat perubahan penilaian yang terdiri dari distribusi akselerasi kontrak, akselerasi kontrak dini dan akselerasi belanja 53 dimana pada penilaian komponen akselerasi 53 belum maksimal dikarenakan terdapat pengadaan kontraktual dengan nilai kontrak lebih kecil dari 200 juta baru terlaksana di triwulan IV dengan adanya optimalisasi anggaran.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

- Mengoptimalkan penyerapan anggaran setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
- Melakukan revisi DIPA dan POK sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan penyerapan anggaran
- Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala.

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Nilai Kinerja Anggaran	89.48	90.31	100.92	13,246,000	13,245,650	99.99	0.009	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura Balai Besar POM di Jayapura yang optimal adalah 99.99% yaitu dari alokasi anggaran Rp.13.246.000 direalisasikan sebesar Rp.13.245.650. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura dengan kriteria Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran atau output lebih besar dari input. Artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

F. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

- Rapat monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala.
- Memanfaatkan pemutakhiran RPD Hal III DIPA setiap triwulan secara tepat waktu.
- Pengisian capaian output pada aplikasi Sakti sebelum batas waktu yang ditentukan.
- Melakukan Reviu DIPA dan POK sesuai ketentuan yang berlaku secara periodik untuk melihat kesesuaian kegiatan dalam DIPA dengan kebutuhan.
- Memperhatikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 khususnya tanggal-tanggal yang telah ditetapkan agar pencairan anggaran di akhir tahun 2024 tidak menyebabkan dispensasi SPM yang dapat mengurangi nilai IKPA satker.

2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

- a) Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%);
- b) Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%); • Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%);
- c) Persentase penerapan proses non E-tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%);
- d) Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%).

Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan dibulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.49 Capaian Kinerja Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	95	135.71	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa pada Tahun 2024 diperoleh 95 dari target 70 dengan capaian 135,71% dan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

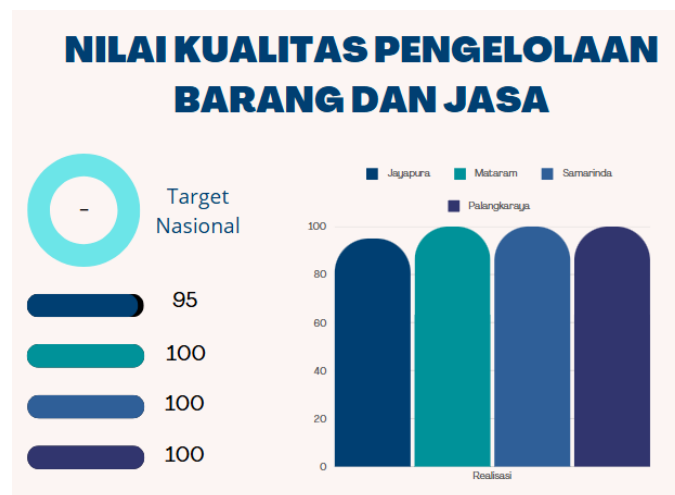
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa Balai Besar POM di Jayapura	2020	-	-	-
	2021	-	-	-

	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	70	95	135.71

Realisasi dan capaian kinerja untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena capaiannya diperoleh pada tahun 2024.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara terhadap target nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Mataram, BBPOM di Samarinda serta BBPOM di Palangkaraya dengan capaian 100. Sedangkan yang terendah adalah BBPOM di Jayapura. Untuk indikator ini tidak ada target nasional sehingga tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 adalah 95. Biro Umum sebagai pengampu indikator ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, namun penetapan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dilakukan pada akhir tahun.

Upaya yang dilakukan dalam mendukung realisasi indikator ini dilakukan sebagai berikut :

1. Pengadaan dan Pengelolaan Kontrak pengadaan barang dan jasa meliputi:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penyelesaian pengadaan barang dan jasa melalui katalog e-Purchasing secara tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
 - b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penyelesaian pengadaan Pekerjaan Konstruksi secara tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku

- c. Penambahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang dan jasa sejumlah 1 (satu) orang untuk periode TA 2024
- d. Pelaksanaan Kontrak Pra DIPA untuk Pengadaan Jasa *Outsourcing* meliputi Tenaga Kebersihan, Satpam dan Supir.
- e. Penunjukan Tim Pembantu PPK untuk TA 2024 untuk membantu PPK melakukan pemeriksaan barang dan jasa yang diterima serta operator pada aplikasi SAKTI
- f. Konsultasi secara konsisten kepada UKPBJ dan Inspektorat terkait kendala di lapangan

Capaian indikator pengadaan barang dan jasa tahun 2024 adalah 95% terhadap target 70% yaitu sebesar 135,71% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan karena target mandatory dari Badan POM yang diberikan kepada Balai Besar POM di Jayapura untuk Pengadaan barang dan jasa hanya 70% sedangkan capaian tahun 2023 sudah 95%. Pada saat penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di awal tahun 2024, PPK telah mengusulkan ke bagian perencanaan Balai Besar POM di Jayapura untuk peningkatan target tetapi karena sifatnya mandatory maka tidak dapat dilakukan perubahan target.

Dalam melakukan proses pengadaan jasa pekerjaan konstruksi terdapat beberapa kendala yaitu pemahaman PPK terkait konstruksi belum memadai terutama terkait tentang pengelolaan kontrak konstruksi dikarenakan PPK belum mengikuti Diklat PPK Type B.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Melakukan Diklat PPK Type B mengingat pentingnya Diklat tersebut bagi PPK untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait pengelolaan kontrak konstruksi.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

- Penyelesaian kontrak pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *e-purchasing*
- Penyelesaian kontrak pekerjaan konstruksi secara tepat waktu
- Melakukan kontrak pra-DIPA TA. 2024 untuk jasa *Outsourcing*
- Penambahan tenaga PPK untuk pengadaan barang dan jasa mempercepat proses pengadaan barang dan jasa
- Adanya Tim PPK yang membantu PPK dalam pengecekan barang dan jasa serta proses pembayaran pada aplikasi SAKTI
- Monitoring dan evaluasi pengadaan secara berkala
- Koordinasi dan komunikasi dengan pihak BPOM dalam hal ini UKPBJ Biro Umum dan Inspektorat terkait pekerjaan konstruksi TA. 2025.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	95	135.71	11,181,000	11,180,516	99.99	0,35	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa adalah 99.99% yaitu dari alokasi anggaran Rp.11.181.000 direalisasikan sebesar Rp.11.180.516. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran atau output lebih besar dari input. Artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

2. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan.

- a) Kualitas pelaporan (Bobot 75%)
- b) Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut
 - 1) Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
 - 2) H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - 3) H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
 - 4) Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)
- Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut

- ◆ Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- ◆ H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
- ◆ H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
- ◆ Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)
- Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: $(\text{Total Nilai Aset yang telah diPSP (SIMAN)} / \text{Total Aset}) \times 100\%$.
- Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui / total barang rusak berat x 100 %.
- Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total pemusnahan yang diusulkan/ total barang usang atau rusak x 100 %.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.50 Capaian Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	85	98.19	115.52	Sangat Baik

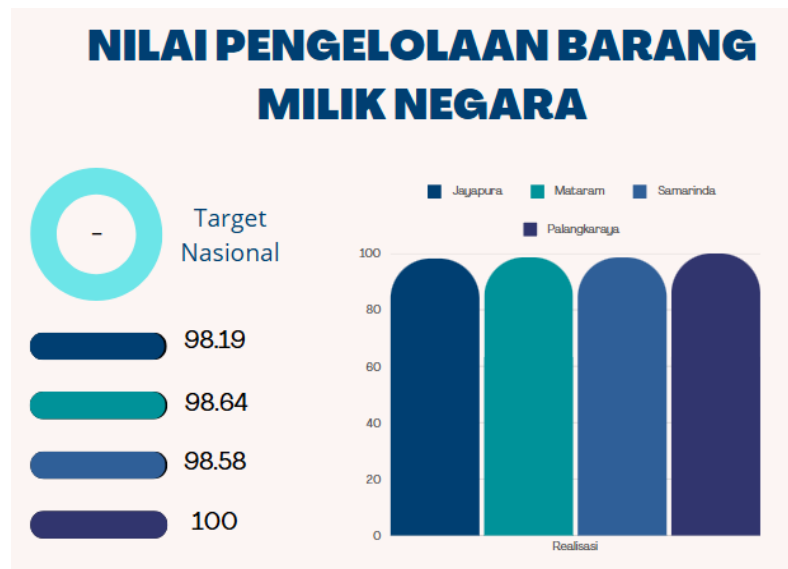
Realisasi indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara pada tahun 2024 diperoleh 98.19 dari target 85 dengan capaian 115,52 dan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Balai Besar POM di Jayapura	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	85	98.19	115.52

Realisasi dan capaian kinerja untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena capaiannya diperoleh pada tahun 2024.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan Target nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya. Sedangkan yang terendah adalah BBPOM di Jayapura. Untuk indikator ini tidak ada target nasional sehingga tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan upaya antara lain :

1. Pengusulan Penetapan Status Pemilikan (PSP) untuk seluruh BMN berupa aset dan ekstrakomptabel
2. Pengusulan penghapusan aset dengan kondisi rusak berat
3. Monitoring dan evaluasi DBR secara berkala
4. Stock opname Semester 2 Tahun 2024

Masih terdapat kendala yaitu berkurangnya SDM Pengelola BMN karena mutasi ke UPT lain, namun di tahun 2025 telah terdapat tenaga fungsional Penata laksana Barang sebanyak 2 orang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan BMN tahun 2025

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

1. Pengusulan Penetapan Status Pemilikan (PSP) untuk seluruh BMN berupa aset dan ekstrakomptabel sesuai dengan pedoman.
2. Mendata dan melakukan pengusulan penghapusan aset dengan kondisi rusak berat.
3. Melakukan update DBR secara berkala

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target antara lain :

- Pelaporan BMN tepat waktu serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- Penyampaian usulan RKBMN tepat waktu
- Pengusulan PSP BMN sesegera mungkin setelah adanya pembelian aset
- Melakukan penghapusan BMN rusak berat
- Pemusnahan persediaan usang/rusak

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	85	98.19	115.52	26.086.000	26.084.977	99.99	0.15	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara adalah 99.99% yaitu dari alokasi anggaran Rp.26.086.000 direalisasikan sebesar Rp.26.084.977. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dengan kriteria Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran atau output lebih besar dari input. Artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

4. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

- 1) Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan: Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
- 2) Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah:

- Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).

- Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).
- Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.51 Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	63.48	105.8	Sangat Baik

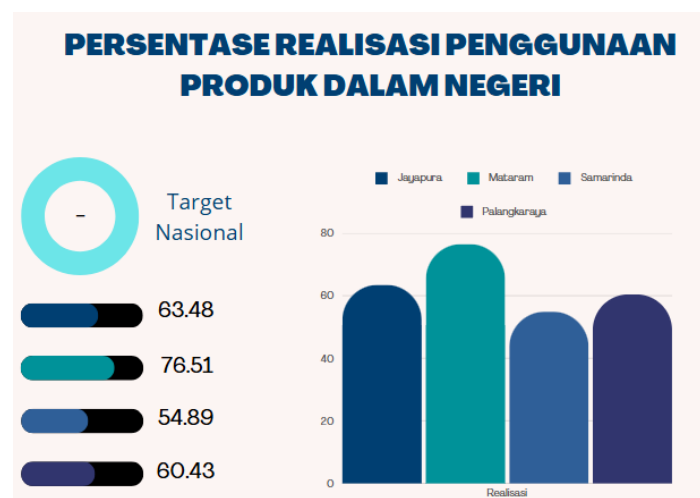
Realisasi indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri diperoleh 63.48 dari target 60 dengan capaian 105,8% dan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Balai Besar POM di Jayapura	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	60	63.48	105.8

Realisasi dan capaian kinerja untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena capaiannya diperoleh pada tahun 2024.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang setara dengan target nasional



Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Mataram. Sedangkan yang terendah adalah BBPOM di Samarinda. Untuk indikator ini tidak ada target nasional sehingga tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penggunaan Produk dalam negeri telah dimasukkan dalam perencanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan telah dilakukan monev capaian untuk Tahun 2024 melalui capaian yang tertera dalam aplikasi SAKTI.

Belanja PDN di Triwulan IV berdasarkan data dari aplikasi SAKTI senilai Rp.3.848.911.211,- dari total nilai dokumen Rp. 6.616.851.378,- (capaian 58.17%). Dalam mencapai target, telah dilakukan berbagai upaya:

1. Melakukan pengadaan barang dan jasa dengan mengutamakan belanja produk PDN
2. Melakukan monitoring dan evaluasi belanja PDN
3. Melakukan pelaporan monev belanja PDN ke Inspektorat I

Adapun hambatan yang dihadapi antara lain :

Pencarian informasi terkait spesifikasi produk dalam negeri dan ketersediaan substitusi PDN untuk produk impor tidak mudah dalam pelaksanaannya karena keterbatasan informasi yang tersedia di E-katalog dan Website Kemenperin. Produk di E-katalog tidak semua melampirkan brosur, penyedia mencantumkan jenis produk PDN tapi setelah ditelusuri ternyata merupakan produk impor, mencantumkan sertifikat TKDN yang tidak sesuai dengan produk yang ditayangkan. Produk TKDN di Website Kemenperin tidak menyediakan informasi spesifikasi yang cukup dan jelas serta tidak tercantum nomor kontak pabrik/distributor yang dapat dihubungi.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

1. Mengutamakan belanja produk dengan PDN untuk semua pengadaan barang dan jasa
2. Melakukan monitoring dan evaluasi belanja PDN setiap triwulan

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

1. Komitmen dari tim pengadaan dalam mengutamakan produk PDN/TKDN dalam belanja pengadaan barang/jasa
2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran penggunaan produk dalam negeri mendorong pihak user dan perencana pengadaan mengutamakan spesifikasi produk dalam negeri dalam menyusun kebutuhan barang dan jasa.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	63.48	105.8	361,593,000	361,585,831	99.99	0.058	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase Realisasi Penggunaan PDN adalah 99.99% yaitu dari alokasi anggaran Rp.361.593.000 direalisasikan sebesar Rp.361.585.831. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Realisasi Penggunaan PDN dengan kriteria Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran atau output lebih besar dari input. Artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini sudah efisien.

3.2 EVALUASI AKHIR PERIODE RENSTRA (TAHUN KE-5)

A. ANALISIS TREN (Evaluasi Tahun Ke-3 dan Tahun Ke-5)

Analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai target akhir periode Renstra. Hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori berikut:

1. Menurun dengan perkembangan kinerja $<0\%$ (kriteria Perlu Upaya Strategis)
Perkembangan kinerja cenderung menurun dari tahun *baseline*, baik terhadap kondisi terkini maupun target tahun 2024
2. Stagnan dengan perkembangan kinerja $0-15\%$ (kriteria Perlu Upaya Strategis)
Perkembangan kinerja cenderung stagnan (tidak berubah/sedikit meningkat) dari tahun *baseline* terhadap kondisi terkini maupun target tahun 2024
3. Meningkatkan Moderat dengan perkembangan kinerja $>15-100\%$ (kriteria Perlu Upaya Percepatan)
Perkembangan kinerja cenderung meningkat namun diperkirakan belum dapat mencapai target tahun 2024
4. Meningkatkan *On The Track* dengan perkembangan kinerja $>100\%$ (kriteria Pertahankan Kinerja)
Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024
5. Meningkatkan Relatif dengan perkembangan kinerja $>0\%$

Perkembangan kinerja cenderung meningkat dari tahun *baseline* terhadap kondisi terkini, namun tidak dapat dilihat perkiraan ketercapaian target tahun 2024

6. Belum dapat disimpulkan

Perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan

No Kode	Sasaran Program / Kegiatan	Indeks KInerja Sasaran Program / Kegiatan	Base line (2019)	Tahun										Ket	Baseline		Capaian Terkini		Target 2024					Perkembangan Kinerja		Indeks Kinerja Sasaran Program / Kegi atan	Penjelasan Kategori
				2020		2021		2022		2023		2024			Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi						Perkemb angan Kinerjs	Kategori		
				Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)														
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di BBPOM Jayapura	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94	80.8	83.07	83.6	81.42	86.6	93.64	90	93.36	93.5	94.61		2019	96.73	2023	93.36	93.5	5	4	-0.01	-0.01	130.38	Meningk at (On the Track)	Kelompo k Analisis 1	Upaya yang telah dilakukan yaitu: menyusun perencanaan dengan baik, pelaksanaan sampling dan pengujian serta monitoring evaluasi yang telah dilakukan sesuai Pedoman Sampling. Ketersediaan alat, reagen dan suku cadang yang memadai
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	76	78	78.49	78.5	85.17	82	82.19	84	89.12	91	91		2019	86.20	2023	89.12	91	5	4	0.01	0.01	76.75	Meningk at (Moderat)	Kelompo k Analisis 1	Upaya yang telah dilakukan yaitu: Perencanaan yang telah disusun dengan baik, pelaksanaan sampling dan pengujian serta monitoring evaluasi yang telah dilakukan sesuai Pedoman Sampling. Ketersediaan alat, reagen dan suku cadang yang memadai
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarka n hasil pengawasa n	81	81	86.6	87	80.45	90	92.96	91	93.18	93.5	93.5		2020	86.6	2023	93.18	93.5	4	3	0.02	0.02	127.71	Meningk at (On the Track)	Kelompo k Analisis 1	Upaya yang telah dilakukan yaitu: Perencanaan yang telah disusun dengan baik, pelaksanaan sampling dan pengujian serta monitoring evaluasi yang telah dilakukan sesuai Pedoman Sampling. Ketersediaan alat, reagen dan suku cadang yang memadai
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarka n hasil pengawasa n	66	66	79.23	85	89.34	86	92.96	87	95.12	95.3	96.4		2020	79.23	2023	95.12	95.3	4	3	0.05	0.06	132.95	Meningk at (On the Track)	Kelompo k Analisis 1	Upaya yang telah dilakukan yaitu: Perencanaan yang telah disusun dengan baik, pelaksanaan sampling dan pengujian serta monitoring evaluasi yang telah dilakukan sesuai Pedoman Sampling. Ketersediaan alat, reagen dan suku cadang

203

204

																											cara produksi yang baik.
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	76.4	76	73.33	79	79.4	82	82.29	85	85.14		2020	73.02	2023	82.29	85	4	3	0.04	0.04	104.99	Meningkat (On the Track)	Kelompok Analisis 1	Upaya yang telah dilakukan yaitu:Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan . Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar lebih ditingkatkan
		Indeks Pelayanan Publik	3.51	3.51	4.08	4.2	4.33	4.4	4.24	4.25	4.72	4.8	4.83		2020	4.08	2023	4.72	4.8	4	3	0.04	0.05	120.02	Meningkat (On the Track)	Kelompok Analisis 1	Upaya yang telah dilakukan yaitu: publikasi berbagai layanan yang dimiliki BBPOM di Jayapura melalui media sosial, perbaikan dan peningkatan secara berkala terhadap fasilitas pelayanan dan meningkatkan kompetensi petugas pelayanan
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77					77	80	79	66.67	81	81		2022	80	2023	66.67	81	2	1	0.01	-0.17	-2.674.31	Menurun	Kelompok Analisis 1	Upaya yang telah dilakukan yaitu: koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor tetap dilakukan terutama dalam hal sinergi dan kolaborasi terhadap kegiatan pendampingan yang dilakukan
		Persentase keterlibatan UPT dalam program seduaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota										95	75.47		2024	75.47	2024	75.47	95	0	0	0	0	0	Belum dapat disimpulkan	Kelompok Analisis 1	Upaya yang telah dilakukan yaitu: 2. Melaksanakan pemeriksaan bersama pemerintah daerah, khususnya lintas sektor 3. Melakukan monev terhadap pelaksanaan DAK bagi kab/kota penerima DAK melalui tatap muka maupun online
SK.5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di BBPOM Jayapura	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	86.95	86.95	89.63	90.5	93.31	92.2	93.33	94.1	94.99	95.8	96.78		2020	89.63	2023	94.99	95.8	4	3	0.02	0.02	116.49	Meningkat (On the Track)	Kelompok Analisis 1	Pencapaian indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan didukung oleh konsistensi pelaksanaan kegiatan inovasi KASBI pada fasilitas umum dan event-event daerah

206

207

SK.10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79	79	66.8	72	74.1	77	80.2	82	81.58	83.7	86.58		2020	66.8	2023	81.58	83.7	4	3	0.06	0.07	118.78	Meningkat (On the Track)	Kelompok Analisis 1	Upaya yang dilakukan: Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Pangan, Mikrobiologi, Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik untuk meningkatkan kompetensi pegawai
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1.51	1.51	1.575	2	2.025	2.25	2.9	2.5	2.9	3	3		2020	1.575	2023	2.90	3	4	3	0.17	0.23	129.11	Meningkat (On the Track)	Kelompok Analisis 1	Upaya yang telah dilakukan: Sosialisasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik termasuk sosialisasi indikator Pengelolaan Data dan Informasi
SK.11	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	93	93	88.326	92.3	89.83	92.9	89.8	94.10	88.72	89.48	90.31		2020	89.05	2023	88.72	89.48	4	3	0	0	-102.64	Menurun	Kelompok Analisis 1	Upaya yang dilakukan : 1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran secara berkala. 2. Menyusun RPD triwulan secara cermat dan melakukan pemutakhiran RPD Hal III DIPA tepat waktu. 3. Melakukan revisi anggaran dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran		95	100	95	100								2020	100	2023			4	3	-1	-1	100	Meningkat (On the Track)	Kelompok Analisis 1	
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa										70	95		2024	95	2024	95	70	0	0	0	0	0	Belum dapat disimpulkan	Kelompok Analisis 1	Upaya yang dilakukan : • Penyelesaian pengadaan dan kontrak pengadaan barang dan jasa • Perencanaan dan perisipan pengadaan Pra DIPA • Melakukan konsultasi terkait perencanaan dan pelaksanaan ke UKPBJ Biro Umum dan Inspektorat I
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara										85	98.19		2024	98.19	2024	98.19	85	0	0	0	0	0	Belum dapat disimpulkan	Kelompok Analisis 1	Upaya yang dilakukan : • Pengusulan PSP sesegera mungkin saat aset dan ekstrakomptabel sudah datang • Pengusulan penghapusan aset

209

B. ANALISIS GAP (Evaluasi Tahun Ke-5)

Merupakan perbandingan antara realisasi akhir periode Renstra terhadap target di tahun akhir periode Renstra. Hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori berikut:

1. Tercapai, apabila realisasi $>100\%$ target
2. Tidak Tercapai, apabila realisasi $<100\%$ target
3. Diperkirakan tercapai, apabila realisasi $>100\%$ target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosis)
4. Diperkirakan Tidak Tercapai, apabila perkiraan realisasi $<100\%$ target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosis)
5. Tidak Dapat Disimpulkan, apabila tidak memiliki nilai capaian

No.Kode	Program dan Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.1	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di BBPOM Jayapura	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8	83.07	83.6	81.42	86.6	93.64	90	93.36	93.5	94.43	101	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
			2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78.49	78.5	85.17	82	82.19	84	89.12	91	83.33	91.6	Tidak tercapai	BBPOM di Jayapura	
			3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	86.6	87	80.45	90	92.96	91	93.18	93.5	93.51	100	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
			4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66	79.23	85	89.34	86	92.96	87	95.12	95.3	96.67	101.4	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
			5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat			88	94.17	89	86.4	90	100	97	100	103.1	Tercapai	BBPOM di Jayapura	Indikator baru pada tahun 2021
SK.2	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM Jayapura	72	60.85	64	72.57	68	65.8	71	66.56	67.5	74.09	109.8	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
SK.3	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83.5	90.59	91.1	90.2	92.3	94.5	93.4	94.4	94.6	96.49	102	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
			8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72	63.01	64.76	61.7	66.51	63.4	68.26	72.06	73	68.07	93.2	Tidak tercapai	BBPOM di Jayapura	
			9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88	88.2	89.5	91.76	90.5	89.4	91	90.04	90.5	91.96	101.6	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
SK.4	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di BBPOM Jayapura	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89.73	89	95.77	90	98.08	91	97.83	98	100	102	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
			11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	46.98	55	64.39	57	58	59	69.67	70	89.19	127.4	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
			12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	92	92	100	94	100	95	99.76	99.8	100	100.2	Tercapai	BBPOM di Jayapura	

			13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		46	48.75	55	53.49	60	66.2	65	70.83	71.5	76	106.3	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
			14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		55	76.4	76	73.33	79	79.4	82	82.29	85	85.61	100.7	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
			15	Indeks Pelayanan Publik		3.51	4.08	4.2	4.33	4.4	4.24	4.25	4.72	4.8	4.83	100.6	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
			16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik						77	80	79	66.67	81	70	86.4	Tidak tercapai	BBPOM di Jayapura	Indikator baru pada tahun 2022
			17	Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kab /Kota										95	75.47	79.4	Tidak tercapai	BBPOM di Jayapura	Indikator baru pada tahun 2024
SK.5	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di BBPOM Jayapura	18	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan		86.95	89.63	90.5	93.31	92.2	93.33	94.1	94.99	95.8	97.43	101.7	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
			19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		16	16	40	47	56	58	72	74	88	88	100	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
			20	Jumlah desa pangan aman		4	4	8	8	13	13	17	17	22	22	100	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
			21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		2	2	8	8	12	12	17	17	22	22	100	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
SK. 6	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan makanan di BBPOM Jayapura	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		95	99.91	100	100.04	100	100.1	100	100	100	100	100	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
			23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		85	99.77	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
SK.7	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di BBPOM Jayapura	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		35	32.96	42	70.35	50	99	73	97	98	93.44	95.3	Tidak tercapai	BBPOM di Jayapura	
SK.8	8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Indeks RB		85	68.65	84.8	84.76	86.8	90.05	88.88	90.18	91.18	86.90	95.3	Tidak tercapai	BBPOM di Jayapura	
			26	Nilai AKIP		80	77.22	79.7	78.96	82.2	78.25	84.70	78.50	81.49	76.95	94.4	Tidak tercapai	BBPOM di Jayapura	

			27	Nilai pengelolaan kearsipan										92.79	97.56	105.1	Tercapai	BBPOM di Jayapura	Indikator baru pada tahun 2024
SK.9	9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	28	Indeks profesionalitas ASN UPT		75	83.44	84	84.93	84.4	85.4	84.8	90.7	91.08	86.88	95.4	Tidak tercapai	BBPOM di Jayapura	
SK.10	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		79	66.8	72	74.1	77	80.2	82	81.58	83.7	86.58	103.4	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
			30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		1.51	1.575	2	2.025	2.25	2.9	2.5	2.9	3	3	100	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
SK.11	11	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran		93	88.326	92.3	89.83	92.9	89.8	94.10	88.72	89.48	90.31	100.9	Tercapai	BBPOM di Jayapura	
			32	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran		95	100	95	100								Tidak Dapat Disimpulkan	BBPOM di Jayapura	Indikator hanya berlaku untuk pengukuran kinerja Balai Besar/Balai di tahun 2020-2021
			33	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa										70	95	135.07	Tercapai	BBPOM di Jayapura	Indikator baru pada tahun 2024
			34	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara										85	98.19	115.5	Tercapai	BBPOM di Jayapura	Indikator baru pada tahun 2024
			35	Persentase realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri										60	63.48	105.8	Tercapai	BBPOM di Jayapura	Indikator baru pada tahun 2024

3.3 EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS

Pada sub bab ini diuraikan penilaian ketercapaian tujuan secara komprehensif dan dijelaskan penyebab ketercapaian dan ketidaktercapaian tujuan serta dilengkapi dengan rekomendasi sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan.

Penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam kategori berikut:

1. Tujuan sudah tercapai/*on track* jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait lebih dari 100% ($x > 100\%$).
2. Tujuan belum tercapai/perlu kerja keras jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait kurang dari 100% ($x < 100\%$)

Kode	IKU	T1			T2			T3			T4			T5			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan	Ketercapaian dan Ketidaktercapaian
		T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%				
SK.1. Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT																				
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8	83.07	102.81	83.6	81.42	97.39	86.6	93.64	108.12	90	93.36	103.73	93.5	94.43	100.86	102.58	Tujuan sudah tercapai/ <i>on track</i>	Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan: - Perencanaan yang telah disusun, pelaksanaan sampling dan pengujian serta monitoring evaluasi yang telah dilakukan sesuai Pedoman Sampling. - Melakukan evaluasi penandaan sampel Obat sesuai dengan Petunjuk Teknis, Surat Edaran terbaru serta hasil evaluasi pelaporan penandaan dari Direktorat terkait. - Penginputan dan pengiriman data sampel dan hasil uji dilakukan segera dan real time. - Ketersediaan alat, reagen dan suku cadang yang memadai. Perlu upaya perbaikan dan pembelian ketika terjadi kerusakan. - Berkoordinasi dengan BBPOM di Makassar untuk dapat melakukan pengujian parameter logam berat di Laboratorium Pengujian di BBPOM di Makassar.	
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78.49	100.63	78.5	85.17	108.5	82	82.19	100.23	84	89.12	106.10	91	83.33	88.96	100,88		Jumlah sampel makanan yang TMK penandaan lebih banyak dibandingkan dengan sampel yang TMS hasil pengujian mengindikasikan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memahami bahwa label/penandaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) atau Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang menentukan mutu dan keamanan produk secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pembinaan secara terus menerus untuk memastikan pelaku usaha menerapkan seluruh aspek CPPOB atau CPPB-IRT termasuk aspek label penandaan. Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan: - Perencanaan yang telah disusun, pelaksanaan sampling dan pengujian serta monitoring evaluasi yang telah dilakukan sesuai Pedoman Sampling. - Melakukan evaluasi penandaan sampel pangan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan hasil evaluasi pelaporan penandaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. - Melakukan koordinasi dengan UPT dalam Region Makassar terkait jadwal pengiriman sampel yang telah disepakati bersama - Penginputan dan pengiriman data sampel dan hasil uji dilakukan segera dan real time.	
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	86.6	106.92	87	80.45	92.47	90	92.96	103.29	91	93.18	102.4	93.5	93.51	99.40	100.89		Dalam pencapaian target ini secara tidak langsung dipengaruhi juga oleh kelancaran proses pengujian itu sendiri mulai dari proses sampling, pengiriman ke Laboratorium, pengujian dan pelaporan hasil pengujian melalui SIPT. Terkait proses pengujian hal- hal seperti kerusakan alat microwave yang merupakan komponen dari instrumen Spektrofotometer Serapan Atom yang digunakan untuk pengujian parameter logam berat pada sampel kosmetik. Untuk mengatasi hal tersebut telah diupayakan untuk perbaikan alat dan pembelian suku cadang serta pengujian ke BBPOM di Makassar sehingga pengujian dapat dilakukan kembali dan tidak terjadi carry over. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk melakukan pengujian sampel di UPT lain ketika terdapat kendala pada instrumen yang digunakan untuk melakukan pengujian di Balai Besar POM di Jayapura. Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan: - Melakukan evaluasi penandaan sampel sesuai dengan Petunjuk Teknis, Surat Edaran terbaru serta hasil evaluasi pelaporan penandaan dari Direktorat terkait. - Memonitoring pelaksanaan pengujian baik di BBPOM di Jayapura maupun di Balai regional - Berkoordinasi dengan BBPOM di Makassar untuk dapat melakukan pengujian parameter logam berat di Laboratorium Pengujian di BBPOM di Makassar.	

216

8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72	63.01	87.51	64.76	61.7	95.27	66.51	63.4	95.32	68.26	72.06	105.57	73	68.07	94.11	95.55			Dalam mencapai target nilai Indeks Kesadaran Masyarakat di tahun 2024, Balai Besar POM di Jayapura memiliki kendala salah satunya adalah hampir seluruh publikasi kegiatan pengawasan dan KIE dilakukan melalui media sosial walaupun masih banyak daerah yang belum dijangkau jaringan internet sehingga untuk meningkatkan kinerjanya Balai Besar POM di Jayapura akan menambah ragam publikasi melalui media lain (videotron, talk show radio/televsisi). Selain itu, upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jayapura untuk mencapai target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di tahun 2024 yaitu: 1. Melakukan publikasi kegiatan pengawasan dan KIE melalui media sosial dan subsite secara rutin. 2. Membuat konten publikasi/edukasi bersama kader/komunitas yang diintervensi program keamanan pangan. 3. Melakukan publikasi konten melalui iklan di radio (Radio Bahana Sangkakala).
9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88	88.2	100.23	89.5	91.76	102.53	90.5	89.4	98.78	91	90.04	98.95	90.5	91.96	101.60	100.41			Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM yaitu: 1. Laboratorium yang terakreditasi ISO/SNI 17025/2017 2. Kompetensi SDM, Alat Laboratorium dan parameter uji lengkap 3. Sistem informasi pelayanan publik sangat memadai (SIPT yang terintegrasi billing pembayaran sampel PNB, Aplikasi Noken untuk tracking hasil uji, dll, aplikasi registrasi produk, aplikasi survei kepuasan pelanggan) 4. Potongan tarif pengujian sampel UMKM 5. SDM dan sarana penunjang pelayanan publik. 6. Refreshment Layanan 5S bagi seluruh jenjang petugas pelaksana layanan (petugas keamanan, petugas parkir, customer service, petugas pelaksana layanan
SK.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT																				
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89.73	103.14	89	95.77	107.61	90	98.08	108.98	91	97.83	107.51	98	100	102.04	105.85	102.35	Tujuan sudah tercapai/ on track	Keberhasilan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di dukung oleh: 1. Komunikasi dan koordinasi yang intens kepada Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut pengawasan. 2. Monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan.
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	46.98	85.42	55	64.39	117.07	57	58	101.75	59	69.67	118.08	70	89.19	127.41	109.95			Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian kinerja dipengaruhi oleh : 1. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan lintas sektor dan pelaku usaha terkait tindak lanjut / perbaikan hasil inspeksi 2. Monitoring evaluasi secara rutin terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan oleh lintas sektor dan pelaku usaha.
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	92	108.24	92	100	108.70	94	100	106.38	95	99.76	105.01	99.8	100	100.20	105.71			Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian kinerja antara lain : 1. Melakukan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi dalam rangka sertifikasi. 2. Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi secara berkala pada pertemuan bimtek, pelatihan, sosialisasi,dll. 3. Pendampingan secara intens kepada pelaku usaha selama proses sertifikasi. 4. Percepatan pengujian sampel pihak ketiga sesuai dengan timeline
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	48.75	105.98	55	53.49	97.25	60	66.2	110.33	65	70.83	108.97	71.5	76	106.29	105.76			Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah 1. Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas sehingga pelaku usaha lebih memahami kaidah cara produksi yang baik yang kemudian meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kaidah cara produksi yang baik. 2. Komunikasi dan koordinasi intensif kepada lintas sektor dan pelaku usaha terkait tindak lanjut hasil pengawasan. 3. Monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha. 4. Kompetensi petugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi yang terus meningkat sehingga pembinaan pelaku usaha dalam memahami kaidah Cara Produksi yang baik dilakukan lebih komprehensif dan pendampingan dalam perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan dilakukan lebih efektif dan efisien.

14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	76.4	138.91	76	73.33	96.49	79	79.4	100.51	82	82.29	100.35	85	85.61	100.72	107.39			Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah 1. Pemeriksaan sarana distribusi sesuai dengan perencanaan yang berdasarkan pada analisis risiko. 2. Melakukan Komunikasi dan Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat 3. Melakukan pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha termasuk dalam menindaklanjuti hasil pengawasan melalui tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan. 5. Kompetensi petugas yang terus meningkat dan selaras dengan perkembangan terkini.
15	Indeks Pelayanan Publik	3.51	4.08	116.24	4.2	4.33	103.1	4.4	4.24	96.36	4.25	4.72	111.06	4.8	4.83	100.63	105.48			Salah satu aspek terpenting yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Balai Besar POM di Jayapura terus-menerus melakukan perbaikan pada unit pelayanan publik seperti publikasi berbagai layanan yang dimiliki Balai Besar POM di Jayapura melalui media sosial, perbaikan dan peningkatan secara berkala terhadap fasilitas pelayanan dan meningkatkan kompetensi petugas pelayanan yang merupakan pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tahun 2023 sehingga diperoleh indeks pelayanan publik, yaitu 4,83 dengan capaian 100,63%.
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							77	80	103.90	79	66.67	84.39	81	70	109.26	99.18			Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain: 1. meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam hal pendampingan pelaku usaha sehingga terdapat kolaborasi dan sinergitas dalam pembagian tupoksi pembinaan dan pendampingan yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang mampu memenuhi persyaratan aspek-aspek CPPOB/CPKB/CPOTB, 2. Melakukan pendampingan secara on site untuk melihat kondisi riil sarana dan selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikan, membangun komunikasi dengan UMKM yang akan dibina dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis secara berkala kepada UMKM yang berkomitmen untuk didampingi. 3. Melakukan Pendampingan dilakukan baik secara langsung melalui pertemuan tatap muka baik di lokasi UMKM, di kantor BBPOM di Jayapura maupun di Mall Pelayanan Publik serta pendampingan secara tidak langsung melalui telepon dan WA. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan oleh sarana yang didampingi.
17	Persentase keterlibatan UPT dalam program seduan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kab /Kota													95	75.47	79.44	79.44			Kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator ini antara lain melakukan koordinasi dengan Pemda (instansi terkait) sehubungan dengan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, serta pengelolaan kegiatan dengan anggaran DAK BOK POM, selain itu telah memberikan usulan Kabupaten/Kota yang akan mendapat anggaran DAK tahun 2025
SK.5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT																				
18	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	86.95	89.63	103.08	90.5	93.31	103.10	92.2	93.33	101.23	94.1	94.99	100.95	95.8	97.43	101.70	102.01	101.69	Tujuan sudah tercapai/ on track	Pencapaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan didukung oleh konsistensi pelaksanaan kegiatan inovasi KASBI pada fasilitas umum dan event-event daerah yang melibatkan masyarakat banyak. Selain materi yang menarik, petugas yang kompeten juga dengan pemberian produk informasi keamanan pangan yang menarik dan khas BPOM
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100	40	47	117.5	56	58	103.57	72	74	102.78	88	88	100	104.77			Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Komitmen, koordinasi dan komunikasi dengan pihak sekolah yang diintervensi.
20	Jumlah desa pangan aman	4	4	100	8	8	100	13	13	100	17	17	100	22	22	100	100			Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Komitmen, koordinasi dan komunikasi dengan tim keamanan desa terdiri dari kepala kampung dan perangkatnya serta kader keamanan pangan desa yang terdiri dari masyarakat.

21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100	8	8	100	12	12	100	17	17	100	22	22	100	100			Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Komitmen, koordinasi dan komunikasi dengan pihak pengelola pasar.
SK.6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT																				
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95	99.91	105.17	100	100.04	100.04	100	100.1	100.1	100	100	100	100	100	100	101.06	102.26	Tujuan sudah tercapai/ <i>on track</i>	Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah: 1. Memonitoring pelaksanaan pengujian dan koordinasi baik di BBPOM di Jayapura maupun di Balai regional 2. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan sampling serta input SIPT evaluasi penandaan sampel. 3. Melakukan evaluasi penandaan sampel kosmetik sesuai dengan Petunjuk Teknis, Surat Edaran terbaru serta hasil evaluasi pelaporan penandaan dari Direktorat Pengawasan
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	99.77	117.38	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	103.47			Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah : 1. Tetap perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh fungsi pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel yang sudah diinput ke dalam SIPT dan segera menyelesaikan entry data apabila terdapat sampel yang belum diinput atau dikirim agar sesuai Pedoman Sampling dan timeline. 2. Melakukan evaluasi penandaan sampel makanan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan hasil evaluasi pelaporan penandaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. 3. Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi sampling sesuai Pedoman Sampling yang dilakukan secara berkala, setiap bulan. 4. Melakukan koordinasi secara intens dengan Balai penguji regionalisasi termasuk untuk dapat tepat waktu menginput data di SIPT 5. Melakukan koordinasi dengan PPK dalam percepatan pengaduan suku cadang
SK.7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT																				
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35	32.96	94.17	42	70.35	167.5	50	99	197	73	97	132.88	98	93.44	95.35	137.38	137.38	Tujuan sudah tercapai/ <i>on track</i>	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan belum mencapai target disebabkan oleh 1 perkara yang diperoleh dari hasil investigasi statusnya dari tahapan SPDP sampai dengan Tahap II lebih dari 3 bulan dan menjadi perkara carry over di tahun 2025, karena jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut berada di luar kota dan atas informasi dari jaksa bahwa per tanggal 15 Desember 2024 Pengadilan Negeri Jayapura sudah tidak menerima pelimpahan perkara dari jaksa Penuntut Umum, sehingga direncanakan dilakukan Tahap II pada bulan Januari 2025. Upaya yang dilakukan terkait kendala tersebut yaitu 1. Melakukan komunikasi yang intens dengan jaksa penuntut umum yang menangani perkara 2. Kolaborasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan: Meningkatkan sinergi dengan Polri (Direktorat Intelkam Polda Papua, Direktorat Kriminal khusus Polda Papua) dan Kejaksaan Negeri Jayapura dan Kejaksaan Tinggi Papua agar penegakan hukum lebih efektif, terutama dalam proses penyelidikan dan penuntutan.
SK.8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal																				
25	Indeks RB	85	68.65	80.76	84.8	84.76	99.95	86.8	90.05	103.74	88.88	90.18	101.55	91.18	86.90	95.31	96.26	98.98	Tujuan belum tercapai / perlu kerja keras	Data dukung yang belum memadai terhadap monitoring dan evaluasi pegawai mutasi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja unit dalam bentuk rapat bersama pimpinan. tindak lanjut: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai mutasi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja unit dan mendokumentasikan data dukung atau tools penilaian yang relevan

220

221

																					b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas RTL secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu. c. Mengoptimalkan peran tim pengelola SAKIP serta memastikan bahwa seluruh pegawai yang termasuk ke dalam tim memiliki kompetensi yang memadai dibuktikan dengan adanya sertifikat sosialisasi/bimtek/pelatihan terkait SAKIP. d. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran.
27	Nilai pengelolaan kearsipan													92.79	97.56	105.1	105.1			Kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator ini adalah : 1. Komitmen pengelola arsip di tiap Unit Pengolah Arsip dan Unit Kearsipan II dalam melakukan penciptaan, pengelolaan, dan penataan arsip 2. Pemenuhan ABK Jabatan Fungsional Arsiparis dari Rekrutmen PPPK di Tahun 2024 dapat meningkatkan capaian nilai kearsipan untuk Unsur Penilaian SDM Unit Kearsipan II 3. Seluruh anggota tim arsip telah melakukan pengembangan kompetensi melalui IDEAS, meskipun hal ini belum memenuhi penilaian Audit Pengawasan Internal karena penilaian mewajibkan Bimtek yang dilaksanakan oleh ANRI atau Pusdiklat/PPSDM lain yang menyelenggarakan diklat kearsipan 4. Telah memenuhi sarana prasarana kearsipan berupa rak arsip	
SK.9. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal																					
28	Indeks profesionalitas ASN UPT	75	83.44	111.25	84	84.93	101.11	84.4	85.4	101.18	84.8	90.7	106.96	91.08	86.88	95.4	103.18	103.18	Tujuan sudah tercapai/ on track	Terdapat perubahan dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 sesuai Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/BM.02.01/SD/K/2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024. Perubahan dimensi penilaian IP ASN Tahun 2024 adalah a. Pegawai yang dinilai untuk IP ASN 2024 adalah PNS dan PPPK rata-rata pegawai PPPK belum melaksanakan diklat fungsional b. Nilai kinerja ditambahkan sebagai komponen pada dimensi kompetensi dengan bobot 25 dari nilai 40. Salah satu penurunan nilai IP ASN BPOM pada tahun 2024 dikarenakan rata-rata nilai kinerja pegawai BPOM adalah Baik (20), sehingga nilai maksimal pegawai pada dimensi kinerja adalah 35 c. IP ASN Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2023 adalah 90.70 dan IP ASN Tahun 2024 adalah 86.88 dimana terdapat penurunan nilai IP ASN sebesar 3,82 yang dipengaruhi oleh perubahan pengukuran IP ASN sesuai peraturan Badan Kepegawaian Negara d. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil pengukuran IP ASN dengan penurunan nilai, dikarenakan antara lain masih ada pegawai yang belum mengikuti diklat fungsional/diklat teknis.	
SK.10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan																					
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79	66.8	84.56	72	74.1	102.92	77	80.2	104.16	82	81.58	99.49	83.7	86.58	103.4	98.91	104.49	Tujuan sudah tercapai/ on track	atan-kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja: 1. Monitoring dan evaluasi rencana pemenuhan Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi yang dilakukan secara berkala (triwulanan). Monitoring dan evaluasi dilakukan sebelum tanggal 20 akhir triwulan berjalan. 2. Workshop Pengujian dalam rangka Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium. Kegiatan ini melibatkan seluruh Balai Besar/Balai POM, sehingga pembahasan dilakukan secara komprehensif agar target pemenuhan capaian SKL dapat tercapai dan jika ada kendala dapat segera diselesaikan atau ditindaklanjuti. 3. Pengadaan peralatan pada Triwulan III yaitu Conductivity meter, GCMS-HSS, dan Microwave digester 4. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan internal dan pengerjaan sampel (CP/LCP) 5. Pengadaan sampel dan pengerjaan parameter uji sesuai ruang lingkup pengujian	

30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1.51	1.575	104.3	2	2.025	101.25	2.25	2.9	128.88	2.5	2.9	116	3	3	100	110.08			Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator antara lain : 1. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan, khususnya untuk komponen yang belum mencapai target. 2. Pembagian tugas yang dituangkan ke dalam SKP untuk masing-masing komponen penilaian. 3. Melaksanakan desk Indeks pengelolaan data dan informasi dengan Pusdatin BPOM untuk mensinkronkan data dan money triwulan dengan Pusdatin 4. Meningkatkan akses email pegawai dengan mengirim email pemberitahuan terkait kepegawaian kepada seluruh pegawai 5. Pengadaan alat pengolah data berupa laptop, PC, Scanner, Printer, dan Monitor serta pemeliharaan terhadap PC dan Laptop.
SK.11. Terkelolanya keuangan UPT secara Akuntabel																				
31	Nilai Kinerja Anggaran	93	88.326	94.97	92.3	89.83	97.32	92.9	89.8	96.66	94.10	88.72	94.28	89.48	90.31	100.9	96.82		Tujuan sudah tercapai/ on track	1. Rapat monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala. 2. Memanfaatkan pemutakhiran RPD Hal III DIPA setiap triwulan secara tepat waktu. 3. Pengisian capaian output pada aplikasi Sakti sebelum batas waktu yang ditentukan. 4. Melakukan Reviu DIPA dan POK sesuai ketentuan yang berlaku secara periodik untuk melihat kesesuaian kegiatan dalam DIPA dengan kebutuhan. 5. Memperhatikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 khususnya tanggal-tanggal yang telah ditetapkan agar pencairan anggaran di akhir tahun 2024 tidak menyebabkan dispensasi SPM yang dapat mengurangi nilai IKPA satker.
32	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	95	100	105.26	95	100	105.26													
33	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													70	95	135.7	135.7	113.45	Tujuan sudah tercapai/ on track	1. Penyelesaian kontrak pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-purchasing 2. Penyelesaian kontrak pekerjaan konstruksi secara tepat waktu 3. Melakukan kontrak pra-DIPA TA. 2024 untuk jasa Outsourcing 4. Penambahan tenaga PPK untuk pengadaan barang dan jasa 5. mempercepat proses pengadaan barang dan jasa 6. Adanya Tim PPK yang membantu PPK dalam pengecekan barang dan jasa serta proses pembayaran pada aplikasi SAKTI 7. Monitoring dan evaluasi pengadaan secara berkala Kordinasi dan komunikasi dengan pihak BPOM dalam hal ini UKPBJ Biro Umum dan Inspektorat terkait pekerjaan konstruksi TA. 2025.
34	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													85	98.19	115.5	115.5			1. Pelaporan BMN tepat waktu dan dimonev secara berkala. 2. Penyampaian usulan RKBMN tepat waktu 3. Pengusulan PSP BMN sesegera mungkin setelah adanya pembelian aset 4. Melakukan penghapusan BMN rusak berat 5. Pemusnahan persediaan usang/rusak
35	Persentase realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri													60	63.48	105.8	105.8			1. Komitmen dari tim pengadaan dalam mengutamakan produk PDN/TKDN dalam belanja pengadaan barang/jasa 2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran penggunaan produk dalam negeri mendorong pihak user dan perencana pengadaan mengutamakan spesifikasi produk dalam negeri dalam menyusun kebutuhan barang dan jasa.

3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Pada sub bab ini diuraikan progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja triwulan sebelumnya dan rekomendasi triwulan yang bersangkutan.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	Terdapat selisih antara sampel yang disampling dengan sampel yang masuk di laboratorium	Pengisian SIPT dilakukan secara real time karena capaian sampel dihitung dari SIPT serta Melakukan monitoring dan evaluasi oleh fungsi pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel yang sudah diinput ke dalam SIPT	Desember 2024	Telah dilakukan monev terhadap sampling dan pengujian pada WA grup terhadap permintaan data RHPK yang diikuti oleh arahan Kepala Balai untuk mengecek agar data yang disampaikan valid			Sampling dan Pengujian telah selesai hingga pelaporan SIPT
		Pelaksanaan pengadaan reagen, media, suku cadang mengalami keterlambatan	Pengadaan reagen, media, suku cadang akan dilakukan percepatan dengan melakukan koordinasi awal tahun antara laboratorium, Pejabat Pengadaan dan PPK		Telah dilakukan percepatan pengadaan dengan melakukan koordinasi antara laboratorium, Pejabat Pengadaan dan PPK			Untuk pengadaan suku cadang, media mikro sudah berkontrak di Triwulan I dan sudah selesai
		Beberapa sampel regionalisasi berpotensi melewati timeline pengujian	Koordinasi baik internal maupun eksternal (Region Makassar dan PPPOMN)		Koordinasi dilakukan dalam grup region Makassar terkait percepatan pengujian sampel dan permasalahan yang dihadapi serta adanya kendala-kendala dalam pengiriman sampel regionalisasi			Percepatan pengujian sampel regionalisasi
2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Sebagian besar sampel TMK penandaan produk pangan yang beredar di luar Papua	Komunikasi dan koordinasi antar unit serta pemanfaatan data yang diinput melalui SIPT		Telah dilakukan koordinasi dengan UPT terkait			Pengawasan terkait hasil pengawasan produk sudah terkoordinasi antar satker BPOM
		Tidak dapat melakukan pengujian yang menggunakan <i>immunoaffinity</i>	Pengadaan suku cadang yang masih <i>indent</i>		Suku cadang <i>immunoaffinity</i> telah datang pada akhir juli dan telah digunakan untuk pengerjaan sampel bulan Agustus			Pengujian menggunakan <i>immunoaffinity</i> telah dapat dilaksanakan bulan Agustus
		Sampel regionalisasi ICPMS belum dapat dikerjakan	Melakukan verifikasi metode pengujian untuk parameter uji yang menggunakan ICPMS untuk pengerjaan sampel Regionalisasi Laboratorium		Telah dilakukan verifikasi metode untuk parameter uji yang menggunakan ICPMS			Sampel regionalisasi ICPMS telah selesai diuji
		Terdapat selisih antara sampel yang disampling dengan sampel yang masuk di laboratorium	Pengisian SIPT dilakukan secara real time karena capaian sampel dihitung dari SIPT serta Melakukan monitoring dan evaluasi oleh fungsi pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel yang sudah diinput ke dalam SIPT	Desember 2024	Telah dilakukan monev terhadap sampling dan pengujian pada WA grup terhadap permintaan data RHPK yang diikuti oleh arahan Kepala Balai untuk mengecek agar data yang disampaikan valid			Sampling dan Pengujian telah selesai hingga pelaporan SIPT
		Pelaksanaan pengadaan reagen, media, suku cadang mengalami keterlambatan	Pengadaan reagen, media, suku cadang akan dilakukan percepatan dengan melakukan koordinasi awal tahun antara laboratorium, Pejabat Pengadaan dan PPK		Telah dilakukan percepatan pengadaan dengan melakukan koordinasi antara laboratorium, Pejabat Pengadaan dan PPK			Untuk pengadaan suku cadang, media mikro sudah berkontrak di Triwulan I dan sudah selesai
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Penambahan parameter baru regionalisasi mengakibatkan intensitas bersama (GCMS) menjadi tinggi sehingga mengakibatkan penggunaan suku cadang dan reagen pun menjadi lebih banyak khususnya penggunaan <i>filter gas</i>	Melakukan pemesanan <i>filter carrier gas</i> untuk setiap laboratorium yang menggunakan alat GCMS		Telah dipesan <i>filter carrier gas</i> untuk setiap laboratorium yang menggunakan alat GCMS			<i>Filter carrier gas</i> telah diganti dan ada cadangan milik laboratorium lainnya

		carrier digunakan bersama oleh beberapa laboratorium sehingga cepat kotor						
		Sampel <i>targeted</i> sulit disampling dikarenakan terbatasnya jumlah dan jenis sampel <i>targeted</i> yang beredar di lapangan sedangkan jumlah sampel <i>targeted</i> yang dibutuhkan lebih banyak	Melakukan komunikasi antar laboratorium untuk menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan sesuai parameter		Telah dilakukan komunikasi antar laboratorium untuk menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan sesuai parameter			Pemenuhan sampel <i>targeted</i> dapat dilakukan
		Terdapat selisih antara sampel yang disampling dengan sampel yang masuk di laboratorium	Pengisian SIPT dilakukan secara real time karena capaian sampel dihitung dari SIPT serta Melakukan monitoring dan evaluasi oleh fungsi pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel yang sudah diinput ke dalam SIPT	Desember 2024	Telah dilakukan movev terhadap sampling dan pengujian pada WA grup terhadap permintaan data RHPK yang diikuti oleh arahan Kepala Balai untuk mengecek agar data yang disampaikan valid			Sampling dan Pengujian telah selesai hingga pelaporan SIPT
		Pelaksanaan pengadaan reagen, media, suku cadang mengalami keterlambatan	Pengadaan reagen, media, suku cadang akan dilakukan percepatan dengan melakukan koordinasi awal tahun antara laboratorium, Pejabat Pengadaan dan PPK		Telah dilakukan percepatan pengadaan dengan melakukan koordinasi antara laboratorium, Pejabat Pengadaan dan PPK			Untuk pengadaan suku cadang, media mikro sudah berkontrak di Triwulan I dan sudah selesai
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	ICPMS belum terpasang padahal sangat dibutuhkan untuk penambahan parameter uji regionalisasi	Pembelian alat ICPMS untuk penambahan parameter uji regionalisasi melalui pengadaan kontrak namun pemasangan dan uji fungsi belum dilakukan		Pemasangan dan uji fungsi telah dilakukan pada Juli 2023			ICPMS telah terpasang dan telah dilakukan uji fungsi serta pelatihan penggunaan sehingga parameter uji regionalisasi bisa dilakukan
		Terdapat selisih antara sampel yang disampling dengan sampel yang masuk di laboratorium	Pengisian SIPT dilakukan secara real time karena capaian sampel dihitung dari SIPT serta Melakukan monitoring dan evaluasi oleh fungsi pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel yang sudah diinput ke dalam SIPT	Desember 2024	Telah dilakukan movev terhadap sampling dan pengujian pada WA grup terhadap permintaan data RHPK yang diikuti oleh arahan Kepala Balai untuk mengecek agar data yang disampaikan valid			Sampling dan Pengujian telah selesai hingga pelaporan SIPT
		Pelaksanaan pengadaan reagen, media, suku cadang mengalami keterlambatan	Pengadaan reagen, media, suku cadang akan dilakukan percepatan dengan melakukan koordinasi awal tahun antara laboratorium, Pejabat Pengadaan dan PPK		Telah dilakukan percepatan pengadaan dengan melakukan koordinasi antara laboratorium, Pejabat Pengadaan dan PPK			Untuk pengadaan suku cadang, media mikro sudah berkontrak di Triwulan I dan sudah selesai
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	Terdapat sampel fortifikasi yang TMK Penandaan yang berasal dari luar Papua	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan UPT terkait hasil pengawasan dan pengujian Pangan Fortifikasi		Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan UPT terkait hasil pengawasan dan pengujian Pangan Fortifikasi			Penanganan sampel TMK Penandaan sudah dikoordinasikan dengan UPT dimana produsen produk fortifikasi berada
		Terdapat selisih antara sampel yang disampling dengan sampel yang masuk di laboratorium	Pengisian SIPT dilakukan secara real time karena capaian sampel dihitung dari SIPT serta Melakukan monitoring dan evaluasi oleh fungsi pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel yang sudah diinput ke dalam SIPT	Desember 2024	Telah dilakukan movev terhadap sampling dan pengujian pada WA grup terhadap permintaan data RHPK yang diikuti oleh arahan Kepala Balai untuk mengecek agar data yang disampaikan valid			Sampling dan Pengujian telah selesai hingga pelaporan SIPT
		Pelaksanaan pengadaan reagen, media, suku cadang mengalami keterlambatan	Pengadaan reagen, media, suku cadang akan dilakukan percepatan dengan melakukan koordinasi awal tahun antara laboratorium, Pejabat Pengadaan dan PPK		Telah dilakukan percepatan pengadaan dengan melakukan koordinasi antara laboratorium, Pejabat Pengadaan dan PPK			Untuk pengadaan suku cadang, media mikro sudah berkontrak di Triwulan I dan sudah selesai
6	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	Tidak ada informasi bahwa surat tindak lanjut dari BBPOM Jayapura sudah dilaksanakan	Melakukan komunikasi, koordinasi serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau pelaksanaan rekomendasi atau		Telah dilakukan penyampaian surat tindak lanjut hasil pengawasan kepada Badan POM, UPT lain dan pemangku kepentingan			Ada <i>feedback</i> atau informasi berupa perbaikan yang disampaikan secara lisan oleh Dinas Kesehatan setempat dan dari pelaku usaha disampaikan secara lisan melalui <i>Whatsapp</i>

			perbaikan atas hasil inspeksi sarana					
		Rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT agar ditindaklanjuti oleh petugas dengan segera melaksanakan rekomendasi hasil inspeksi sarana yang TMS dan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Pusat	Melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens ke Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut pengawasan. Selain itu juga telah dilakukan evaluasi secara rutin terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan.		Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens ke Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut pengawasan. Selain itu juga telah dilakukan monitoring evaluasi secara rutin terhadap tindak lanjut pengawasan.			Rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh petugas dengan segera melaksanakan rekomendasi hasil inspeksi sarana yang TMS dan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Pusat
7	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	Tidak ada komunikasi terkait pelaporan tindakan lanjut pengawasan ke daerah Otonomi Baru yaitu Papua Pegunungan dan Papua Tengah	Melakukan komunikasi dan koordinasi ke Pemerintah Daerah khususnya Daerah Otonomi Baru yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan dikarenakan belum optimalnya dalam memberikan respon.		Telah melakukan koordinasi ke Pemerintah Daerah Otonomi Baru yaitu Papua Pegunungan. Petugas dari Jayapura berkoordinasi melalui Dinas terkait dengan penyampaian secara langsung kepada petugas Dinas serta memberikan <i>template</i> contoh pelaporan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Papua Tengah, terkait komunikasi dan koordinasi dilakukan oleh Loka POM di Kab. Mimika dan untuk Papua Selatan dilakukan oleh Loka POM di Kab. Merauke.			Telah diperoleh tindak lanjut terkait hasil pemeriksaan sebelumnya
		Belum intensnya komunikasi dengan Dinas Kesehatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga (PIRT)	Melakukan komunikasi yang lebih intens dengan Dinas Kesehatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga (PIRT)		1. Telah dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait tindak lanjut hasil pengawasan baik secara langsung oleh petugas maupun secara tidak langsung atau melalui media komunikasi dengan pelaku usaha, juga dilakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab/Kota. 2. Memastikan setiap surat tindak lanjut yang dikirim telah diterima oleh sarana melalui pengiriman surat elektronik kepada pimpinan/penanggung jawab sarana mengingat sebagian daerah tidak memiliki akses/kantor pos yang memungkinkan fisik surat (<i>hardcopy</i>) tindak lanjut tersebut dapat diterima 3. Telah dilakukan advokasi dan FGD dengan <i>stakeholder</i> dalam kegiatan Pentahelix Peningkatan Kepatuhan IRTP di Kota Jayapura dan Kab. Jayapura 4. Telah dilakukan Bimtek peningkatan kapasitas petugas pengawas IRTP Kota Jayapura 5. Telah dilakukan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Jayapura dan Kab. Jayapura dalam kegiatan Bimtek Cara Produksi Pangan yang Baik untuk industri Rumah Tangga sebagai salah satu upaya peningkatan kepatuhan IRTP dalam pemenuhan persyaratan peraturan			Sudah intensnya komunikasi dengan Dinas Kesehatan dan dinas-dinas terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga (PIRT)
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait proses sertifikasi yang diajukan karena masih ditemukan banyaknya ketidaksesuaian dokumen permohonan sertifikasi sarana	Melakukan pendampingan selama proses sertifikasi, selain itu juga melakukan bimbingan teknis kepada pimpinan/penanggung jawab sarana yang akan disertifikasi sebelum pengajuan permohonan sehingga pada saat audit tidak terlalu banyak ditemukan ketidaksesuaian		1. Aktif melakukan pendampingan secara langsung ke lapangan maupun secara tidak langsung/<i>online</i>. Sarana yang sudah didampingi terus dilakukan <i>money</i> dan rutin diingatkan agar melengkapi persyaratan-persyaratan terkait pemenuhan sertifikasi 2. Melayani pendampingan melalui tatap muka dengan memanfaatkan fasilitas Mall Pelayanan Publik (MPP) 3. Telah dilakukan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Jayapura dan Kab. Jayapura dalam kegiatan Bimtek Cara Produksi Pangan yang Baik untuk industri Rumah Tangga sebagai salah satu upaya			Sudah dilakukan pendampingan secara <i>massive</i> kepada pelaku usaha serta bimbingan teknis kepada pimpinan/penanggung jawab sarana yang akan disertifikasi

					peningkatan kepatuhan IRTP dalam pemenuhan persyaratan peraturan			
9	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	Masih ditemukan sarana yang belum melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dari pemeriksaan sebelumnya	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi secara terus menerus untuk memastikan konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan kaidah Cara Produksi yang Baik. Selain itu, sinergisme dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota terus ditingkatkan berupa desk hasil pengawasan, pengawasan tindak lanjut rekomendasi, dan pengawasan pelaksanaan DAK Non Fisik BPOM Tahun Anggaran 2024		1. Telah dilakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi secara intens terhadap pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi yang Baik 2. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi sehingga pelaku usaha memahami kaidah Cara Produksi yang Baik dan mampu melakukan perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan 3. Melakukan sinergisme dengan Dinas Kesehatan Kab. Biak berupa koordinasi terkait pengawasan pelaksanaan DAK Non Fisik BPOM TA 2024 khususnya kepada sarana IRTP 4. Telah dilakukan koordinasi Pemantapan tata Hubungan kerja untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Kab. Jayapura dan Kab. Keerom			Meminimalisir temuan berulang pada pemeriksaan selanjutnya dan memastikan konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi yang Baik
10	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	4. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan fasilitas distribusi obat dalam hal ini Instalasi Farmasi Pemerintah dan sarana pelayanan kefarmasian milik pemerintah, termasuk penambahan SDM farmasi, pengadaan peralatan dan sarana prasarana lainnya 5. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait dengan keamanan, mutu, dan manfaat Obat dan Makanan, khususnya pangan dan kosmetik. Potensi ekonomi yang besar menyebabkan masih maraknya penjualan kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kedaluarsa. 6. Sumber pengadaan kosmetik tanpa izin edar yang tidak jelas membuat penelusuran tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara tuntas.	1. Pengawasan secara komprehensif berbasis risiko 2. Penguatan tim terpadu pengawasan dan pembinaan Obat dan Makanan di daerah 3. Monitoring dan evaluasi secara berkala, khususnya pemberian tindak lanjut kepada sarana dan umpan balik berupa CAPA dari sarana yang diperiksa		1. Pada bulan Ramadhan telah dilaksanakan intensifikasi pengawasan sarana distribusi pangan yang difokuskan pada peredaran pangan tanpa izin edar, rusak dan kadaluarsa. Terdapat produk pangan kadaluarsa dan telah ditindaklanjuti dengan pemusnahan produk di sarana 2. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi berdasarkan kajian risiko, sehingga sarana yang belum memenuhi ketentuan menjadi prioritas utama untuk diperiksa, juga untuk sarana yang belum melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dari pemeriksaan sebelumnya. Secara umum pelanggaran yang sering terjadi yaitu kelengkapan sarana prasarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan dan telah dilakukan pembinaan dan pemberian surat peringatan kepada sarana 3. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana 4. Telah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, khususnya pemberian tindak lanjut kepada sarana dan umpan balik berupa CAPA dari sarana yang diperiksa			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang terkait dengan distribusi obat dan makanan
11	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	Belum dilakukan pembahasan hasil monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik dan Berita Acara FKP belum disusun dengan benar dan lengkap sesuai ketentuan.	Setiap kegiatan FKP membahas hasil monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik dan memastikan Berita Acara FKP disusun dengan benar dan lengkap sesuai ketentuan.		Telah dilakukan kegiatan FKP pada tanggal 29 April 2024			Telah dilakukan pembahasan hasil monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik dan Berita Acara FKP telah disusun dengan benar dan lengkap sesuai ketentuan.
		Masih ada temuan audit Pelayanan Publik	Menindaklanjuti temuan audit Pelayanan Publik		Melakukan pemutakhiran subsite jayapura.pom.go.id secara berkala, tidak hanya berita internal namun bisa berupa data lainnya, salah satu contohnya yaitu memperbarui petugas pelayanan publik setiap harinya. b. Melengkapi sarana dan prasarana antara lain CCTV yang menghadap area parkir kendaraan. Selain itu menindaklanjuti pemeliharaan sarana dan prasarana, khususnya di Ruang Menyusui yang mengalami kerusakan.			Temuan audit Pelayanan Publik sudah ditindaklanjuti

12	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Belum maksimalnya koordinasi dengan lintas sektor karena beberapa lintas sektor yang ditemui belum merespon permintaan data UMKM yang didampingi untuk dijadikan acuan dalam menetapkan target pendampingan serta UMKM yang dicalonkan untuk menjadi target pendampingan tidak menunjukkan respon yang baik untuk berkomitmen dalam mengikuti setiap tahapan pendampingan	Memaksimalkan sosialisasi inovasi sarang semut dan SAGU Papua, agar pelaku usaha dapat secara mandiri mengakses informasi yang diinginkan, serta mendapatkan pendampingan jemput bola hingga produknya mendapatkan izin edar. Demikian juga, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor lainnya akan ditingkatkan.		1. Telah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor dalam upaya mengumpulkan data UMKM yang akan didampingi, data yang diperoleh selanjutnya dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dipilih menjadi UMKM yang akan dijadikan target pendampingan UMKM tahun 2024 dan telah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan pendampingan tahun sebelumnya untuk melihat UMKM yang berpotensi untuk dijadikan target pendampingan tahun ini dan UMKM yang proses pendampingannya akan dilanjutkan di tahun ini. 2. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pendampingan kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung (online). 3. Meningkatkan kompetensi petugas dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. 4. Telah dilakukan Koordinasi Pemantapan Tata Hubungan Kerja untuk meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan pelayanan publik melalui program SAGU EMAS PAPUA di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.			Maksimalnya inovasi sarang semut dan SAGU EMAS Papua, agar pelaku usaha dapat secara mandiri mengakses informasi yang diinginkan, serta mendapatkan pendampingan jemput bola hingga produknya mendapatkan izin edar
13	Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan	Komunikasi dan koordinasi pengawasan obat dan makanan belum dapat dilakukan kepada seluruh wilayah pengawasan BBPOM Jayapura, sehubungan dengan situasi dan kondisi daerah.	1. Meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan melalui pertemuan koordinasi dengan lintas sektor terkait 2. Meningkatkan koordinasi terkait penanganan stunting dengan lintas sektor terkait pada wilayah provinsi/Kota/Kabupaten 3. Melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan DAK non Fisik dan melaksanakan movev terhadap pelaksanaan DAK non Fisik		1. Telah melakukan koordinasi dan pengawasan terpadu bersama OPD dengan adanya tim koordinasi pengawasan Obat dan Makanan 2. Telah melakukan pendampingan dan komunikasi utk usulan DAK TA berikut nya atau yg akan datang 3. Telah melakukan koordinasi lintas sektor pendataan lokus stunting Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan program GKPD 2024 di Kota Jayapura 4. Telah melakukan koordinasi terkait stunting dengan lintas sektor terkait dengan adanya tim percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua 5. Melakukan pembinaan pendampingan pelaksanaan DAK non Fisik dan melaksanakan movev terhadap pelaksanaan DAK non Fisik 6. Melakukan movev secara online melalui whatsapp grup DAK Papua dan juga melalui whatsapp masing-masing penanggungjawab DAK			1. Telah dilakukan koordinasi dan pengawasan terpadu bersama OPD pada pemeriksaan sarana 2. Telah dilakukan koordinasi terkait stunting dengan pemerintah Kabupaten Jayapura 3. Telah dilakukan movev pelaksanaan DAK non Fisik Kabupaten Biak, Kepulauan Yapen, Kabupaten Sentani dan Kota Jayapura
14	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Menurunnya minat masyarakat terhadap Obat dan Makanan sebagai bentuk keterlibatan dalam program KIE	Terus melakukan upaya pengembangan strategi KIE yang lebih efektif dan menjangkau secara langsung masyarakat di berbagai pelosok daerah dengan karakteristik wilayah yang berbeda dan media informasi dan komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat dalam menerima dan memahami materi publikasi.		1. Telah dilakukan pengembangan strategi KIE dengan melibatkan kader desa sebagai talent. Dengan harapan lebih luas jangkauan KIE kepada masyarakat melalui program inovasi KASBI. Selain itu metode interaktif dengan peserta ini juga didukung oleh permainan edukasi yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan. 2. Melakukan edukasi Cek Klik dan sosialisasi pemakaian BPOM mobile. serta penambahan topik KIE yang sedang menarik minat masyarakat			1. Telah dilakukan pengembangan strategi KIE dengan melibatkan kader desa sebagai talent. 2. Telah dilaksanakan KASBI di Kabupaten selain Kota Jayapura antara lain Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Supiori
15	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman	1. Belum adanya komitmen Pemda untuk mendukung keberlanjutan program dengan menandatangani Dokumen Komitmen saat kegiatan Advokasi Kelembagaan	1. Meminta komitmen pemda untuk mendukung keberlanjutan program dengan menandatangani Dokumen Komitmen saat		1. Telah dilakukan penandatanganan komitmen dengan Pemda 2. Telah dilakukan bimbingan Tim Keamanan Pangan Sekolah dalam menyusun rencana			1. Sudah dilaksanakan penandatanganan komitmen pada kegiatan Movev 2. Masing - masing Tim Keamanan Pangan Sekolah telah memiliki rencana aksi

		2. Belum dilaksanakan bimbingan Tim Keamanan Pangan Sekolah dalam menyusun rencana aksi keberlanjutan program 3. Belum adanya jenis PIKP agar Kader lebih mudah dalam melakukan sosialisas mandiri 4. Belum adanya pemberdayaan kader/murid sekolah dalam sosialisasi keamanan pangan	- kegiatan Advokasi Kelembagaan 2. Membimbing Tim Keamanan Pangan Sekolah dalam menyusun rencana aksi keberlanjutan program 3. Menambah jenis PIKP berupa flipchart Keamanan Pangan agar Kader lebih mudah dalam melakukan sosialisasi mandiri 4. Memberdayakan kader/murid sekolah sebagai talent konten KIE yang diproduksi oleh Tim Media Sosial BBPOM agar sosialisasi keamanan pangan lebih mudah dipahami dan tersedia setiap saat		- aksi keberlanjutan program 3. Telah diadakan flipchart Keamanan Pangan agar Kader lebih mudah dalam melakukan sosialisasi mandiri 4. Telah diberdayakan kader/murid sekolah sebagai talent konten KIE yang diproduksi oleh Tim Media Sosial BBPOM agar sosialisasi keamanan pangan lebih mudah dipahami dan tersedia setiap saat		3. <i>Flipchart</i> sudah diserahkan kepada Kader KPJAS sekolah yang sudah dilatih 4. Sudah ada konten KIE yang melibatkan kader dan murid sekolah
16	Jumlah Desa Pangan Aman	1. Belum adanya komitmen Pemda untuk mendukung keberlanjutan program dengan menandatangani Dokumen Komitmen saat kegiatan Advokasi Kelembagaan 2. Belum dilaksanakan bimbingan Tim Keamanan Pangan Desa dalam menyusun rencana aksi keberlanjutan program 3. Belum adanya jenis PIKP agar Kader lebih mudah dalam melakukan sosialisas mandiri 4. Belum adanya pemberdayaan tim kader desa dalam sosialisasi keamanan pangan	1. Meminta komitmen pemda untuk mendukung keberlanjutan program dengan menandatangani Dokumen Komitmen saat kegiatan Advokasi Kelembagaan 2. Membimbing Tim Keamanan Pangan Desa dalam menyusun rencana aksi keberlanjutan program 3. Menambah jenis PIKP berupa <i>flipchart</i> Keamanan Pangan agar Kader lebih mudah dalam melakukan sosialisasi mandiri 4. Memberdayakan kader keamanan desa sebagai talent konten KIE yang diproduksi oleh Tim Media Sosial BBPOM agar sosialisasi keamanan pangan lebih mudah dipahami dan tersedia setiap saat		1. Telah dilakukan penandatanganan komitmen dengan Pemda 2. Telah dilakukan bimbingan Tim Keamanan Pangan Desa dalam menyusun rencana aksi keberlanjutan program 3. Telah diadakan <i>flipchart</i> Keamanan Pangan agar Kader lebih mudah dalam melakukan sosialisasi mandiri 4. Telah diberdayakan kader keamanan desa sebagai talent konten KIE yang diproduksi oleh Tim Media Sosial BBPOM agar sosialisasi keamanan pangan lebih mudah dipahami dan tersedia setiap saat		1. Sudah dilaksanakan penandatanganan komitmen pada kegiatan Monev 2. Masing - masing Tim Keamanan Pangan Desa telah memiliki rencana aksi 3. <i>Flipchart</i> sudah diserahkan kepada Kader KPJAS sekolah yang sudah dilatih 4. Sudah ada konten KIE yang melibatkan kader dan murid sekolah
17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1. Belum adanya komitmen Pemda untuk mendukung keberlanjutan program dengan menandatangani Dokumen Komitmen saat kegiatan Advokasi Kelembagaan 2. Belum dilaksanakan bimbingan kepada pengelola pasar dalam menyusun rencana aksi keberlanjutan program 3. Belum adanya pemberdayaan kader/penjual di pasar dalam sosialisasi keamanan pangan 4. Belum relevannya kompetensi petugas pasar dengan latar belakang pendidikan terkait pengujian pangan aman	1. Meminta komitmen pemda untuk mendukung keberlanjutan program dengan menandatangani Dokumen Komitmen saat kegiatan Advokasi Kelembagaan 2. Membimbing petugas pasar dalam menyusun rencana aksi keberlanjutan program 3. Memberdayakan kader/penjual di pasar sebagai talent konten KIE yang diproduksi oleh Tim Media Sosial BBPOM agar sosialisasi keamanan pangan lebih mudah dipahami dan tersedia setiap saat 4. Melakukan pendampingan pelaksanaan dan pengawasan program PABK		1. Telah dilakukan penandatanganan komitmen dengan Pemda 2. Telah dilakukan bimbingan petugas pasar dalam menyusun rencana aksi keberlanjutan program 3. Telah diberdayakan kader/penjual pasar sebagai talent konten KIE yang diproduksi oleh Tim Media Sosial BBPOM agar sosialisasi keamanan pangan lebih mudah dipahami dan tersedia setiap saat 4. Telah dilakukan pendampingan dalam kegiatan sampling dan pengujian		5. Sudah dilaksanakan penandatanganan komitmen pada kegiatan Monev 6. Masing - masing Tim Petugas Pasar telah memiliki rencana aksi 7. Sudah ada konten KIE yang melibatkan kader dan penjual sekolah 8. Sudah ada pendampingan dalam kegiatan sampling dan pengujian
18	Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai standar	Terdapat selisih antara sampel obat yang disampling dan masuk laboratorium dikarenakan untuk sampel komoditi Obat yang pengujiannya dilakukan secara regionalisasi, sampling yang dilakukan pada bulan berjalan akan diuji pada bulan berikutnya	Melakukan komunikasi yang intens dengan UPT lain terkait jumlah sampel yang akan dikirimkan setiap bulannya. Demikian juga, monitoring dan evaluasi pencapaian indikator akan dilakukan secara lebih intens		Sudah dilakukan komunikasi yang intens dengan UPT lain terkait jumlah sampel yang akan dikirimkan setiap bulannya. Demikian juga, monitoring dan evaluasi pencapaian indikator akan dilakukan secara lebih intens		Telah sesuai antara sampel obat yang disampling dan masuk laboratorium dikarenakan untuk sampel komoditi Obat yang pengujiannya dilakukan secara regionalisasi
19	Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai standar	Waktu sampling dan pengiriman sampel yang tidak sesuai dengan Pedoman Sampling dan jumlah sampel pangan yang TMK memberikan kontribusi terbesar untuk sampel makanan yang TMS	Melakukan komunikasi yang intens dengan UPT lain terkait jumlah sampel yang akan dikirimkan setiap		Sudah dilakukan komunikasi yang intens dengan UPT lain terkait jumlah sampel yang akan dikirimkan setiap bulannya. Demikian juga, monitoring dan evaluasi pencapaian indikator akan dilakukan secara lebih intens		Seluruh sampel yang dikirim sudah tepat waktu sehingga pengujian hingga pelaporan SIPT juga dapat selesai tepat waktu

			bulannya. Demikian juga, monitoring dan evaluasi pencapaian indikator akan dilakukan secara lebih intens					
20	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Masih ditemukan pelanggaran kejahatan obat dan makanan serta tidak ada niat perbaikan dari sarana yang melakukan pelanggaran	Komunikasi kelompok substansi pemeriksaan dan kelompok substansi penindakan dalam penerapan asas ultimum remedium (upaya terakhir), dimana hasil pemeriksaan rutin yang telah ditindaklanjuti sesuai SOP, dan sudah diberikan sanksi administratif berulang kali, namun karena tidak ada perbaikan dari sarana tersebut, selanjutnya dilakukan penegakan hukum. Pengawasan, pengamatan penelitian dan pemeriksaan (Wasmalitrik), operasi intelijen, verifikasi data patroli siber juga dilakukan dalam upaya memperoleh perkara selain itu, komunikasi dan koordinasi secara intens dengan unsur unsur CJS (Criminal Justice System).		Telah dilakukan komunikasi kelompok substansi pemeriksaan dan kelompok substansi penindakan dalam penerapan asas ultimum remedium (upaya terakhir). Pengawasan, pengamatan penelitian dan pemeriksaan (Wasmalitrik), operasi intelijen, verifikasi data patroli siber juga dilakukan dalam upaya memperoleh perkara selain itu, komunikasi dan koordinasi secara intens dengan unsur unsur CJS (Criminal Justice System).			Telah terjalin sinergitas antar fungsi penindakan dan pemeriksaan serta target perkara telah tercapai
21	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP	Beberapa alat yang telah direncanakan ditunda pengadaannya hingga blokir anggaran dibuka sehingga memungkinkan tidak memenuhi dalam target standar peralatan	1. Memenuhi ruang lingkup sesuai target 2. Mengadakan pelatihan internal untuk kompetensi yang belum terpenuhi oleh sebagian besar personil pengujian		1. Telah dipenuhinya ruang lingkup sesuai target 2. Telah diadakan pelatihan internal untuk meningkatkan kompetensi personil pengujian			1. Telah dipenuhinya ruang lingkup sesuai target 2. Telah diadakan pelatihan internal untuk meningkatkan kompetensi personil pengujian
22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM Jayapura yang optimal	1. Kurangnya SDM di bagian pengawasan sehingga input data SIPT untuk pengawasan sardis /sarprod tidak dilaksanakan secara real time 2. Untuk tahun 2024, input hasil pengawasan sarana distribusi/sarana produksi juga sudah harus melampirkan Tindak Lanjut hasil pengawasan dimaksud, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama (laporan Tindak Lanjut harus discan terlebih dahulu)	Pengisian SIPT baik pemeriksaan maupun pengujian dilakukan secara real time dan segera melakukan proses terhadap data yang di entri serta monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target secara berkala.		1. Percepatan pengisian SIPT sampling dan pengujian serta pengawasan sarana distribusi dan produksi 2. Berita aktual diupload secara konsisten serta rutin melakukan evaluasi terhadap penggunaan email setiap bulannya			Pengisian SIPT baik pemeriksaan maupun pengujian sudah dilakukan secara real time dan segera melakukan proses terhadap data yang di entri serta monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target secara berkala.
23	Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Hampir seluruh publikasi kegiatan pengawasan dan KIE dilakukan melalui media sosial walaupun masih banyak daerah yang belum dijangkau jaringan internet	1. Peningkatan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan. 2. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dalam menyusun strategi pelaksanaan KIE dapat mengacu pedoman strategi KIE Obat dan Makanan dan mempertimbangkan hasil survei kesadaran pada masing-masing wilayah, baik dari sisi komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat maupun demografi.		1. Menyebarluaskan materi KIE bekerjasama dengan lintas sektor 2. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan berbagai jenis bentuk media KIE			Telah dilaksanakan penyebaran KIE Kata BPOM (tangkal Hoax) melalui videotron Diskominfo Kota Jayapura KASBI bersama Dinas Perindag Kab. Supiori dan Kab. Biak
24	Indeks Kepuasan pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	Terbatasnya kegiatan pelayanan karena petugas lebih mengutamakan pelayanan daring sehingga pelaku usaha harus datang langsung ke kantor	Peningkatan frekuensi desk dan peningkatan kompetensi petugas		Telah dilakukan peningkatan kompetensi petugas dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha. Telah dilakukan juga penambahan kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha			BBPOM Jayapura telah intens melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha

					termasuk Bimtek dan desk			
25	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Terbatasnya publikasi aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang telah dilakukan BBPOM Jayapura	- Melakukan kegiatan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai media terutama yang terkait langsung dengan masyarakat misalnya hasil intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari raya, hasil pengawasan pangan buka puasa/takjil, hasil intensifikasi pengawasan produk Kosmetik ilegal/mengandung bahan berbahaya. - Menginformasikan langkah-langkah kegiatan pengawasan, tindak lanjut kegiatan pengawasan, serta dampak kinerja pengawasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dengan pesan utama bahwa BBPOM di Jayapura melindungi masyarakat di tanah Papua		- Secara konsisten melakukan kegiatan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai media terutama yang terkait langsung dengan masyarakat - Secara konsisten memberitakan kegiatan-kegiatan BBPOM di Jayapura dalam melindungi masyarakat di Provinsi Papua			- Telah adanya publikasi hasil pengawasan intensifikasi pengawasan hari raya melalui RRI, TVRI, media cetak/online - Publikasi kinerja melalui media cetak (iklan Cepos) dan melalui SMS Blast
26	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM Jayapura	Konsistensi melakukan peningkatan kualitas Forum Konsultasi Publik, identifikasi pelanggan yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus, serta melakukan upaya peningkatan kemampuan petugas pelayanan publik dalam hal customer handling	Konsistensi melakukan peningkatan kualitas Forum Konsultasi Publik, identifikasi pelanggan yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus, serta melakukan upaya peningkatan kemampuan petugas pelayanan publik dalam hal customer handling		Telah dilakukan Pelatihan 3 orang petugas layanan pada Pelatihan Peningkatan Standar dan Kinerja Manajemen Pelayanan Publik			Secara konsisten telah dilakukan peningkatan kualitas Forum Konsultasi Publik, identifikasi pelanggan yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus, serta melakukan upaya peningkatan kemampuan petugas pelayanan publik dalam hal customer handling
27	Indeks RB BBPOM Jayapura	- Konsistensi pelaksanaan kegiatan rencana pembangunan ZI sesuai dengan rencana dan rutin melakukan movev rencana aksi pembangunan ZI secara memadai dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan RATL per area perubahan serta menindaklanjuti hasil movev - Pengintegrasian SPBE belum dilakukan menyeluruh - Penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan	- Konsistensi pelaksanaan kegiatan rencana pembangunan ZI sesuai dengan rencana dan rutin melakukan movev rencana aksi pembangunan ZI secara memadai dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan RATL per area perubahan serta menindaklanjuti hasil movev - Pengintegrasian SPBE dilakukan secara menyeluruh - Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan		- Konsistensi pelaksanaan kegiatan rencana pembangunan ZI sesuai dengan rencana dan rutin melakukan movev rencana aksi pembangunan ZI secara memadai dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan RATL per area perubahan serta menindaklanjuti hasil movev - Pengintegrasian SPBE dilakukan secara menyeluruh - Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan			- Pelaksanaan kegiatan rencana pembangunan ZI sesuai dengan rencana dan rutin melakukan movev rencana aksi pembangunan ZI secara memadai dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan RATL per area perubahan serta menindaklanjuti hasil movev sudah dilaksanakan secara konsisten dan rutin - Semua fungsi di BBPOM Jayapura telah mengimplementasikan SPBE Telah dilakukan penyusunan laporan inovasi BBPOM Jayapura secara berkala
28	Nilai AKIP BBPOM Jayapura	- Belum cukup memadainya kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja - Belum terdokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja. - Belum cukup jelas dan lengkapnya informasi dalam laporan kinerja - Belum cukup jelas dan lengkap laporan evaluasi internal - Masih ada target yang belum tercapai tahun berjalan	Menyusun kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten termasuk mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta memanfaatkan data dari sumber data yang dapat diyakini		- Telah tersusunnya kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten termasuk mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta memanfaatkan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya - Telah terdokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat			Pimpinan telah terlibat dalam setiap rapat monitoring dan evaluasi, dan sudah di dokumentasikan serta telah memberikan keputusan atau arahan akan tetapi arahan dan keputusan yang diberikan oleh pimpinan unit kerja tergabung di dalam narasi Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja. Untuk kedepannya keputusan dan arahan pimpinan dari unit kerja akan dibuatkan terpisah dari analisis capaian indikator kinerja

			validitasnya - Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja. - Menyusun laporan kinerja dengan menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja di setiap level sasaran program kegiatan dan penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya - Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi yang jelas terkait sumber saran atau rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti - Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi yang jelas dan lengkap terkait perubahan dan realisasi indikator per sasaran kegiatan pada periode tersebut - Menyusun dan melengkapi laporan evaluasi internal - Mengupayakan kinerja tahun berjalan agar target tercapai dan agar capaian lebih baik dari tahun sebelumnya	- monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja. - Menyusun laporan kinerja dengan menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja di setiap level sasaran program kegiatan dan penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya - Telah tersusunnya laporan kinerja dengan menyajikan informasi yang jelas terkait sumber saran atau rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti, terkait perubahan dan realisasi indikator per sasaran kegiatan pada periode tersebut. - Telah tersusunnya dan lengkapnya laporan evaluasi internal - Telah diupayakan untuk memenuhi target namun ada beberapa target yang belum bisa tercapai			- Telah terdokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja. - Menyusun laporan kinerja dengan menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja di setiap level sasaran program kegiatan dan penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya - Telah tersusunnya laporan kinerja dengan menyajikan informasi yang jelas terkait sumber saran atau rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti, terkait perubahan dan realisasi indikator per sasaran kegiatan pada periode tersebut. - Telah tersusunnya dan lengkapnya laporan evaluasi internal - Telah diupayakan untuk memenuhi target namun ada beberapa target yang belum bisa tercapai
29	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Pengelola arsip belum mengikuti diklat teknis kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI dan belum memenuhinya aspek sarana prasarana kearsipan seperti rak arsip, filling kabinet, termohigrometer, dehumidifier, CCTV, dan pemadam kebakaran.	Peningkatan kompetensi pengelola arsip pada pelatihan teknis kearsipan dan pemenuhan sarana prasarana kearsipan	Pemenuhan sarana prasarana kearsipan berupa rak arsip	Belum dapat dilakukan diklat teknis kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI dikarenakan tidak adanya anggaran	2025	Sudah terdapat rak arsip untuk menunjang pemenuhan sarpras kearsipan
30	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM Jayapura	Masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami unsur-unsur penilaian SKP. Masih terdapat Pejabat Fungsional yang belum memiliki kompetensi pelatihan fungsional, demikian juga untuk Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan untuk Pejabat Struktural Eselon II	Dilakukan sosialisasi dan pendampingan langsung kepada pegawai serta dilakukan pelatihan fungsional bagi Pejabat Fungsional yang belum memiliki kompetensi pelatihan fungsional, demikian juga untuk Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan untuk Pejabat Struktural Eselon II	2 (dua) pejabat fungsional telah mengikuti pelatihan fungsional dasar bagi JF Penata Laksana Barang			2 (dua) pejabat fungsional telah mengikuti pelatihan fungsional dasar bagi JF Penata Laksana Barang
31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM Jayapura	- Masih adanya ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan kegiatan - Pendaftaran kontrak masih melewati batas waktu yang ditentukan - Konsistensi pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala	- mengoptimalkan penyerapan anggaran setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun - memastikan kontrak sudah didaftarkan tepat waktu dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan - Melaksanakan rapat movev kinerja dan anggaran secara berkala	- mengoptimalkan penyerapan anggaran setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun - memastikan kontrak sudah didaftarkan tepat waktu dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan - Melaksanakan rapat movev kinerja dan anggaran secara berkala			- Monev antara rencana dan pelaksanaan dilaksanakan secara berkala - Untuk pendaftaran kontrak sudah tidak ada dalam penilaian IKPA - Lebih intens dilakukan movev kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan diluar dari pembahasan setiap triwulan
32	Nilai Kualitas Pengelolaan	Masih ada pengadaan yang belum selesai	Dilakukan percepatan proses	Sudah dilakukan percepatan proses pengadaan			Seluruh pengadaan telah selesai pada Triwulan IV

	Barang dan Jasa		pengadaan					Tahun 2024
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Belum <i>update</i> -nya DBR di beberapa ruangan	Agar dilakukan <i>update</i> DBR di seluruh ruangan secara berkala		Telah dilakukan <i>update</i> dan monev secara berkala terhadap DBR			DBR di seluruh ruangan sudah <i>diupdate</i> secara berkala
34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pencarian informasi terkait spesifikasi produk dalam negeri dan ketersediaan substitusi PDN untuk produk impor tidak mudah dalam pelaksanaannya karena keterbatasan informasi yang tersedia di E-katalog dan Website Kemenperin. Produk di E-katalog tidak semua melampirkan brosur, penyedia mencantumkan jenis produk PDN tapi setelah ditelusuri ternyata merupakan produk impor, mencantumkan sertifikat TKDN yang tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan. Produk TKDN di Website Kemenperin tidak menyediakan informasi spesifikasi yang cukup dan jelas serta tidak tercantum nomor kontak pabrik/distributor yang dapat dihubungi.	1. Melakukan komunikasi dengan penyedia terkait produk yang PDN 2. Monev terhadap penggunaan PDN		1. Meminta brosur dari penyedia terhadap produk PDN 2. Pemanfaatan informasi terkait produk PDN di aplikasi SIROUM milik Biro Umum BPOM 3. Memanfaatkan <i>google search</i> dalam mencari informasi 4. Melakukan monev dan melaporkan kepada Inspektorat I			1. Telah adanya komunikasi dengan penyedia terkait produk yang PDN 2. Telah selesai dilakukan monev terhadap penggunaan PDN

3.5 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Pada sub bab ini diuraikan pemanfaatan informasi Laporan dalam laporan kinerja sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Adapun pemanfaatan informasi laporan kinerja masing-masing indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Realisasi indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 adalah 94.43% dari target 93.5 sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, realisasi sudah melampaui target tahun 2024. Target indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 berbeda dengan target yang terdapat di dalam RKT 2024, target berubah dari 92.3 menjadi 93.5, karena mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 dan penetapan target berdasarkan perhitungan rata-rata realisasi tahun 2022 dan 2023 sehingga target tahun 2024 ditetapkan 93.5.
2. Realisasi indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 adalah 83,33 dari target 91 sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, realisasi belum mencapai target tahun 2024. Target indikator Persentase makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 adalah 91 berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT), terdapat revidi dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang sudah melampaui usulan target tahun 2024 yaitu 86 menjadi 91, dengan pertimbangan tersebut maka target 2024 ditetapkan 91.
3. Realisasi indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024 adalah 93.51 dari target 93.5 sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, realisasi telah mencapai target Tahun 2024. Realisasi dapat tercapai dengan kriteria capaian sangat baik. Target indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 adalah 93.5 berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 92, Mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 maka target 2024 direkomendasikan 93.5.
4. Realisasi indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024 adalah 96.67 dari target 95.3 sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, realisasi sudah melampaui target Tahun 2024. Target indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 adalah 95.3 berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 88, terdapat evaluasi atau perubahan target dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan

target 2024 dan hasil perhitungan rata-rata realisasi 2022 dan 2023 dengan pertimbangan tersebut maka target 2024 ditetapkan 95.3.

5. Realisasi indikator Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2024 adalah 100 dari target 97 sesuai target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Realisasi sudah melampaui target Tahun 2024. Target indikator Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 adalah 97 berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 90, terdapat evaluasi dari unit pengampu berdasarkan realisasi tahun 2023 dengan pertimbangan tersebut maka target 2024 ditetapkan 97.
6. Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2024 adalah 100 dari target 98 yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Realisasi berhasil dicapai melebihi target dengan kriteria capaian sangat baik. Target indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2024 berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 92, dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang sudah tercapai dan berdasarkan rata-rata realisasi tahun 2022 dan 2023, dengan pertimbangan ini maka ditetapkan target tahun 2024 adalah 98.
7. Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2024 adalah 89.19 dari target 70 sesuai target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Realisasi ini melebihi target Tahun 2024 dengan kriteria capaian sangat baik. Target indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 61, mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 maka target 2024 direkomendasikan 70.
8. Realisasi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024 adalah 100 dari target 99.8 sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Target indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 97. Berdasarkan pertimbangan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 maka target tahun 2024 ditetapkan 99.8.
9. Realisasi indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024 adalah 76 dari target 71.5 sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan

- dengan kriteria sangat baik. Target indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 70, mempertimbangan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 maka target tahun 2024 ditetapkan 71.5.
10. Realisasi indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024 adalah 85.61 dari target 85 sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT).
 11. Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura 4.83 dari target 4.8 sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Target indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 4.5 karena pertimbangan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 maka target tahun 2024 ditetapkan 4.8.
 12. Realisasi indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2024 adalah 70 dari target 81 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam PK dan RKT Tahun 2024. Realisasi belum mencapai target Tahun 2024 dengan kriteria Cukup.
 13. Realisasi indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah 75.47 dari target 95 sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam PK Tahun 2024. Target indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota hanya terdapat di dalam Perjanjian (PK) Kinerja Tahun 2024, karena pada saat penyusunan RKT Tahun 2024 indikator belum ditambahkan.
 14. Realisasi indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 adalah 97.43 dari target 95.8 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja (PK) Tahun 2024. Target indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 96 target diturunkan karena berdasarkan reviu target unit pengampu yang mengacu pada realisasi tahun 2023 maka target tahun 2024 ditetapkan 95.8
 15. Realisasi indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024 adalah 88 dari target 80 sesuai dengan target yang ditetapkan pada PK Tahun

2024 dan Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT). Hal ini menunjukkan bahwa realisasi sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

16. Realisasi indikator Jumlah desa pangan aman adalah 22 dari target 22 sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam PK Tahun 2024 Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT).
17. Realisasi indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Tahun 2024 adalah 22 dari target 22 sesuai dengan target yang ditetapkan pada RAPK Tahun 2024 dan Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT).
18. Realisasi indikator Persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024 adalah 100 dari target 100 sesuai dengan target yang ditetapkan pada PK Tahun 2024 dan Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT). Realisasi ini sudah tercapai dengan kriteria capaian baik.
19. Realisasi indikator Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024 adalah 100 dari target 100 sesuai dengan target yang ditetapkan pada PK Tahun 2024 dan Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT). Realisasi ini sudah tercapai dengan kriteria capaian baik.
20. Realisasi indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 adalah 93,44 dari target 98 sesuai dengan target di dalam PK Tahun 2024. Target indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja adalah 98, berbeda dengan target yang terdapat didalam RKT Tahun 2024 yaitu 82. Berdasarkan dari evaluasi target unit pengampu yang mengacu pada realisasi akhir tahun 2023 maka direkomendasikan untuk menggunakan target sesuai dengan target unit pengampu 98.
21. Realisasi indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2024 diperoleh 86.58 dari target 83.7 dimana realisasi sudah melampaui target dengan kriteria capaian sangat baik. Target indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 87 berdasarkan dari reuiu target unit pengampu yang mengacu pada realisasi akhir tahun 2023 maka direkomendasikan untuk Tahun 2024 menggunakan target sesuai dengan target unit pengampu 83.70.
22. Realisasi indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Tahun 2024 adalah 3 dari target 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT).
23. Realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu sebesar 74,09 dari target 67.5 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Target indikator Indeks

kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 75, karena mempertimbangkan realisasi 2022 dan 2023 maka target akhir tahun 2024 direkomendasikan sebesar 67.5 sesuai dengan kenaikan realisasi tahun sebelumnya.

24. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan pada tahun 2024 diperoleh 96.49 dari target 94.6 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT).
25. Realisasi indikator indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan sebesar 68,7 dari target 73 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Target indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 70.01, karena mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang sudah melebihi usulan target 2024 maka target 2024 direkomendasikan 73.
26. Realisasi indikator Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik sebesar 91,96 dari target 90.5 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Target Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 92, karena berdasarkan hasil revidi dari unit pengampu target Tahun 2024 ditetapkan 90.5.
27. Realisasi indikator Indeks RB adalah 86.90 dari target 91.18. realisasi ini tidak mencapai target tahun 2024. Target Indeks RB berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 90.8, karena berdasarkan hasil revidi dari unit pengampu target Tahun 2024 ditetapkan 91,18.
28. Realisasi indikator Nilai AKIP adalah 76.95 dari target 81.49 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan belum mencapai target Tahun 2024. Target Nilai AKIP berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 87.2, karena berdasarkan hasil revidi dari unit pengampu target Tahun 2024 ditetapkan 81.49.
29. Realisasi indikator Nilai pengelolaan kearsipan adalah 97.56 dan telah melampaui, target Nilai pengelolaan kearsipan Tahun 2024 yaitu 92.79 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Target Nilai Pengelolaan Kearsipan hanya terdapat di dalam Perjanjian (PK) Kinerja Tahun 2024, karena pada saat penyusunan RKT Tahun 2024 indikator belum ditambahkan.

30. Realisasi indikator Indeks profesionalitas ASN tahun 2024 adalah 86.88 dari target 91.08 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Target Indeks profesionalitas ASN berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 85, karena berdasarkan hasil reuiu dari unit pengampu target Tahun 2024 ditetapkan 91.08.
31. Realisasi indikator Nilai kinerja Anggaran UPT tahun 2024 diperoleh 90.31 dari target 89.48 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dimana realisasi ini sudah melebihi target dengan kriteria capaian sangat baik. Target Nilai kinerja Anggaran UPT berbeda dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Tahun 2024 (RKT) yaitu 95.3, karena berdasarkan hasil evaluasi dari unit pengampu target Tahun 2024 ditetapkan 89.48.
32. Realisasi indikator Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa pada tahun 2024 adalah 95 dari target 70 sehingga memenuhi target yang telah ditetapkan. Target Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Tahun 2024 yaitu 70 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Target Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa hanya terdapat di dalam Perjanjian (PK) Kinerja Tahun 2024, karena pada saat penyusunan RKT Tahun 2024 indikator belum ditambahkan.
33. Realisasi indikator Nilai pengelolaan Barang milik negara pada tahun 2024 adalah 98.19 dari target 85 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Target Nilai pengelolaan Barang milik negara Tahun 2024 yaitu 85 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Target Nilai pengelolaan Barang milik negara hanya terdapat di dalam Perjanjian (PK) Kinerja Tahun 2024, karena pada saat penyusunan RKT Tahun 2024 indikator ini belum ditambahkan.
34. Realisasi indikator Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri pada tahun 2024 adalah 63.48 dari target 60 sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Target Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri Tahun 2024 yaitu 60 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri hanya terdapat di dalam Perjanjian (PK) Kinerja Tahun 2024, karena pada saat penyusunan RKT Tahun 2024 indikator ini belum ditambahkan.

Tahun 2024 merupakan Tahun terakhir Renstra periode 2020-2024, pada Tahun 2025 dilakukan penyusunan renstra periode 2025-2029 sehingga Pada Tahun 2025 terdapat perubahan indikator kinerja utama. Namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang masih digunakan pada Renstra periode 2025-2029 dari Renstra Periode sebelumnya. Adapun Indikator kinerja utama yang masih digunakan pada Renstra periode 2025-2029 yaitu:

1. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik nomenklatur indikator berubah menjadi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan target 85.5 pada Tahun 2025, target ditetapkan oleh unit pengampu berdasarkan realisasi N-1
4. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan masuk di dalam Renstra periode 2025-2029, nomenklatur indiktaor berubah menjadi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan target 87.69 pada Tahun 2025, target ditetapkan oleh unit pengampu berdasarkan realisasi N-1.
5. indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), nomenklatur indikator berubah menjadi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan target 10 pada Tahun 2025, target ditetapkan oleh unit pengampu berdasarkan realisasi N-1.
6. Jumlah desa pangan aman masuk di dalam Renstra periode 2025-2029 dengan target 3 pada Tahun 2025, target ditetapkan oleh unit pengampu berdasarkan realisasi N-1
7. Jumlah Pasar aman dari bahan berbahaya nomenklatur indikator berubah menjadi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan target 1 pada Tahun 2025, target ditetapkan oleh unit pengampu berdasarkan realisasi N-1
8. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan nomenklatur indikator berubah menjadi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT , dengan target 85 pada Tahun 2025, target ditetapkan oleh unit pengampu berdasarkan realisasi N-1
9. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan nomenklatur indikator berubah menjadi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium , dengan target 70 pada Tahun 2025, target ditetapkan oleh unit pengampu berdasarkan realisasi N-1
8. Indeks Pelayanan Publik dengan target 4.7 pada Tahun 2025, target ditetapkan oleh unit pengampu berdasarkan realisasi N-1
9. Nilai AKIP nomenklatur indikator berubah menjadi Nilai AKIP UPT BPOM, dengan target 77.17 pada Tahun 2025, target ditetapkan oleh unit pengampu berdasarkan realisasi N-1
10. Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan target 5 pada Tahun 2025, target ditetapkan oleh unit pengampu berdasarkan realisasi N-1

3.6 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember tahun 2024 sebagai berikut :

Pagu Awal (Rp)	Pagu setelah AA dan Blokir Perjadin (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi terhadap Pagu Awal	% Realisasi terhadap Pagu AA dan Blokir Perjadin
30.706.163.000	27,114,222,000	27,006,395,014	87.95	99.60

Adapun capaian anggaran per jenis belanja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada aplikasi MONSAKTI sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	10,626,695,000	10,620,655,148	99.94
2	Belanja Barang	11,674,269,000	11,589,266,637	99.27
3	Belanja Modal	4,813,258,000	4,796,473,229	99.65
TOTAL		27.114.222.000	27.006.395.014	99.60

Sedangkan capaian anggaran per jenis belanja berdasarkan Aplikasi pada OMSPAN sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	10,626,695,000	10,620,655,148	99.94
2	Belanja Barang	15,036,882,000	11,589,266,637	77.07
3	Belanja Modal	5,042,586,000	4,796,473,229	95.12
TOTAL		30.706.163.000	27.006.395.014	87.95

Perbandingan antara realisasi pagu yang dikelola dengan target nasional per jenis belanja sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Target Nasional (%)	Realisasi (%)	Gap (%)
1	Belanja Pegawai	95	99.94	4.94
2	Belanja Barang	90	99.27	9.27
3	Belanja Modal	90	99.65	9.65

Pada tahun 2024, terdapat pemblokiran anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk pada Badan POM. Pemblokiran ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan anggaran. Sampai dengan akhir tahun 2024 masih terdapat anggaran yang diblokir dalam DIPA Balai Besar POM di Jayapura (BBPOM di Jayapura), yang tercatat pada halaman IV A DIPA. Pagu anggaran awal dalam DIPA BBPOM di Jayapura adalah sebesar Rp. 32.006.163.000 (tiga puluh dua milyar enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari APBN yang disahkan dengan DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-063.01.2.432985/2024 tanggal 25 November 2023. Dari alokasi anggaran ini dilakukan revisi *Automatic Adjustment* (blokir anggaran) sebesar Rp.3.374.941.000 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah). Pada tanggal 9 Agustus 2024 dilakukan revisi dalam rangka penyesuaian belanja pegawai sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga pagu anggaran menjadi Rp.27.331.222.000 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh dua rupiah) terhadap pagu anggaran awal menjadi Rp30.706.163.000 (tiga puluh milyar tujuh ratus enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) . Dengan adanya beberapa kebijakan terhadap pemenuhan anggaran kegiatan maka dilakukan revisi antara lain pada tanggal 21 Agustus 2024 dilakukan revisi buka blokir dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran dan target sebesar Rp.138.888.000 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Pada tanggal 18 November 2024, BBPOM Jayapura melakukan revisi *self blocking* Perjalanan Dinas sebesar Rp.355.888.000 (tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah) sesuai arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 sehingga pagu anggaran akhir BBPOM Jayapura sebesar Rp.27.114.222.000 (dua puluh tujuh milyar seratus empat belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Dalam pelaksanaan

anggaran tahun 2024, telah dilakukan sebanyak 3 kali revisi DIPA kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, 6 kali revisi DIPA kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Jayapura, dan 12 kali revisi Pemutakhiran Data POK yang dilakukan dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip belanja berkualitas yaitu efektif, efisien, dan akuntabel.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Jayapura dalam pengelolaan anggaran dan upaya yang akan dilakukan kedepan yaitu:

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
2. Melakukan revisi DIPA dan POK sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan penyerapan anggaran
3. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
4. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya visi dan misi Balai Besar POM di Jayapura dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Adapun pagu anggaran terhadap capaian sasaran strategis terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.52 Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Pagu Awal	Pagu setelah Revisi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	778.332.000	778.332.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	24.590.000	13.870.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	622.124.000	368.988.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	5.031.039.000	3.686.061.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	3.056.606.000	2.213.316.000

6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	800.491.000	800.491.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1.136.227.000	820.367.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	1.407.154.000	1.110.912.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	658.563.000	311.336.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	16.769.310.000	16.598.443.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	421.727.000	412.106.000
Total		30.706.163.000	27.114.222.000

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat realisasi penggunaan anggaran dari setiap sasaran kegiatan.

Tabel 3.53 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	778.332.000	776.485.795	99.76
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	13.870.000	13.690.000	98.70
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	368.988.000	364.889.881	94.01
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai	3.686.061.000	3.648.405.195	98.94

	Besar POM di Jayapura			
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	2.213.316.000	2.200.234.275	99.40
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	800.491.000	797.635.950	99.64
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	820.367.000	808.471.498	98.54
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	1.110.912.000	1.098.813.775	98.90
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	311.336.000	310.038.501	99.58
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	16.598.443.000	16.575.386.254	99.84
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	412.106.000	412.096.974	99.99
TOTAL		27.114.222.000	27.006.395.014	99.60

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2024 adalah sebesar 99,60%.

Tabel 3.54 Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun 2024

No	KRO	Program/Kegiatan Output	Output%	Input%	IE	SE	TE	Kategori
1	AEA	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Jayapura	100	95.53	1.05	1	0.05	Efisien
2	BAH	Keputusan / Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai Besar POM di Jayapura	423.47	99.95	4.24	1	3.24	Tidak Efisien
3	BKB	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	99.60	98.50	1.02	1	0.02	Efisien
4	BMB	Layanan Publikasi Keamanan dan	100	99.90	1.00	1	0.00	Efisien

		Mutu Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Jayapura						
5	CAB	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100	99.93	1.00	1	0.00	Efisien
6	CAN	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	100	100	1.00	1	0.00	Efisien
7	CBV	Prasarana Bidang Kesehatan	100	99.81	1.00	1	0.00	Efisien
8	PDD	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100	99.27	1.01	1	0.00	Efisien
9	QCD	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Jayapura	100	99.09	1.01	1	0.00	Efisien
10	QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100	99.69	1.00	1	0.00	Efisien
11	QDB.002	Desa Pangan Aman	100	98.69	1.01	1	0.01	Efisien
12	QDB.003	Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	100	99.82	1.00	1	0.00	Efisien
13	BDC	KIE Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Jayapura	124.03	99.70	0.97	1	-0.03	Tidak Efisien
14	QIA.001	Sampel Makanan yang diperiksa oleh Balai Besar POM di Jayapura	100	99.63	1.00	1	0.00	Efisien
15	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh Balai Besar POM di Jayapura	100	99.75	1.00	1	0.00	Efisien
16	QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh Balai Besar POM di Jayapura	100	99.59	1.00	1	0.00	Efisien
17	QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Balai Besar POM di Jayapura	95	73.24	0.62	1	-0.38	Tidak Efisien
18	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh Balai Besar POM di Jayapura	110.29	100	1.10	1	0.10	Efisien
19	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh Balai Besar POM di Jayapura	101.74	99.59	1.02	1	0.02	Efisien
20	RAB	Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100	99.55	1.00	1	0.00	Efisien
21	EBA	Layanan Perkantoran	100	99.85	1.00	1	0.00	Efisien

Pada tahun 2024 BBPOM di Jayapura melaksanakan 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 18 (Delapan Belas) kegiatan

dengan kategori Efisien sedangkan 3 (Tiga) lainnya dengan kategori Tidak Efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0.38 hingga 3.24. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Jayapura mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran, pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 3.55 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Output%	Input%	IE	SE	TE	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	99.42	99.79	1.00	1	0.00	Efisien
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	100.39	96.53	1.04	1	0.04	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	102.76	99.48	1.03	1	0.03	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	100	99.60	1.00	1	0.00	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	95.35	98.55	0.97	1	-0.03	Tidak Efisien
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	101.72	99.72	1.00	1	0.00	Efisien
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	109.76	98.70	1.11	1	0.11	Efisien
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	99.24	98.15	1.01	1	0.01	Efisien
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	98.29	99.53	0.99	1	-0.01	Tidak efisien
10	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	95.39	99.58	0.96	1	-0.04	Tidak efisien
11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara akuntabel	114.49	100	1.19	1	0.19	Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 11 sasaran strategis terdapat 3 sasaran strategis yang tidak efisien, hal ini terlihat bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan belum sepenuhnya menunjang tercapainya sasaran strategis secara efektif dan efisien. Sehingga untuk kedepannya perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang tercapainya sasaran strategis dan berfokus pada kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis. Adapun penjelasan untuk tingkat efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura dengan realisasi anggaran sebesar 99.79% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 99.42% dengan hasil TE (0.00). Anggaran ini dipergunakan untuk pengadaan sampel dan penunjangnya berupa anggaran perjalanan. Disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini telah efisien, karena capaian kinerja (output) yang dihasilkan sudah sama dengan capaian anggaran yang dikeluarkan.
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan realisasi anggaran sebesar 96.53% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 100.39% dengan hasil TE (0.04). Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, pengawasan iklan dan rokok, pengawasan dalam rangka *food security*, audit sarana dalam rangka sertifikasi, pemantapan koordinasi dengan stakeholder, monev kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan publik, UMKM yang didampingi beserta FGD untuk kader pendampingan. Disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini telah efisien, karena capaian kinerja (output) yang dihasilkan sudah melebihi capaian anggaran yang dikeluarkan.
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan realisasi anggaran sebesar 99.48% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 102.76% dengan hasil TE (0.03). Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE dan intervensi PJAS, Desa dan Pasar. Disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini telah efisien, karena capaian kinerja (output) yang dihasilkan sudah melebihi capaian anggaran yang dikeluarkan.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan realisasi anggaran sebesar 99.60% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan hasil TE (0.00). Anggaran ini dipergunakan untuk pengujian laboratorium sampel Obat dan Makanan serta perkuatan regionalisasi laboratorium dalam rangka sampling dan pengujian. Disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis

ini telah efisien, karena capaian kinerja (output) yang dihasilkan sudah melebihi capaian anggaran yang dikeluarkan.

5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan realisasi anggaran sebesar 98.55% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 95.35% dengan hasil TE (-0.03). Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasi intelijen, rapat pembahasan penyidikan, operasi penindakan, dan pemberkasan perkara. Disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini tidak efisien, karena capaian kinerja (output) yang dihasilkan tidak sama dengan atau melebihi capaian anggaran yang dikeluarkan karena terdapat Automatic Adjustment (AA) pada pagu awal
6. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan realisasi anggaran sebesar 99.72% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 101.72% dengan hasil TE (0.00). Anggaran ini dipergunakan untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan alat laboratorium, suku cadang, alat gelas, pemeliharaan alat, dan peningkatan kompetensi penguji. Disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini telah efisien, karena capaian kinerja (output) yang dihasilkan sudah melebihi capaian anggaran yang dikeluarkan.
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan realisasi anggaran sebesar 98.70% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 109.76% dengan hasil TE (0.11). Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pemberian informasi, pameran, intensifikasi pengawasan keamanan pangan, workshop informasi dan komunikasi. Disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini telah efisien, karena capaian kinerja (output) yang dihasilkan sudah melebihi capaian anggaran yang dikeluarkan.
8. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan realisasi anggaran sebesar 98.15% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 99.24% dengan hasil TE (0.01). Anggaran ini dipergunakan untuk sosialisasi, bimbingan teknis dan desk registrasi sarana OMKA, penyebaran informasi, koordinasi/advokasi/pembinaan konsultasi pengawasan. Disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini telah efisien, karena capaian kinerja (output) yang dihasilkan sudah melebihi capaian anggaran yang dikeluarkan.
9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal dengan realisasi anggaran sebesar 99.53% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar

98.29% dengan hasil TE (-0.01). Anggaran ini dipergunakan untuk pertemuan-pertemuan koordinasi/advokasi dalam rangka RB dan SAKIP, rapat kerja dan evaluasi, dan peningkatan mutu ISO 9001 : 2025. Disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini tidak efisien, karena capaian kinerja (output) yang dihasilkan tidak sama dengan atau melebihi capaian anggaran yang dikeluarkan.

10. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal dengan realisasi anggaran sebesar 99.58% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 95.39% dengan hasil TE (-0.04). Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan kepegawaian dan peningkatan kompetensi kepegawaian. Disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini tidak efisien, karena capaian kinerja (output) yang dihasilkan tidak sama dengan atau melebihi capaian anggaran yang dikeluarkan.
11. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel dengan realisasi anggaran sebesar 100% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 114.49% dengan hasil TE (0.19). Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan dan operasional perkantoran. Disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini telah efisien, karena capaian kinerja (output) yang dihasilkan sudah melebihi capaian anggaran yang dikeluarkan.

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jayapura antara lain:

1. Mengalokasi anggaran dengan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) secara efektif dan efisien
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan oleh masing-masing fungsi dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan reviu terhadap DIPA TA 2024 secara berkala dan segera melakukan revisi apabila terdapat perubahan pelaksanaan program/kegiatan.
4. Melakukan monitoring evaluasi terhadap kinerja dan anggaran secara berkala.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis tahun 2024.

Pada Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari 11 Sasaran Strategis dengan 34 Indikator Kinerja Utama. Adapun hasil capaian sasaran strategis diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. BBPOM di Jayapura telah mencapai target dengan **4 (Empat)** Sasaran Kegiatan dengan kriteria **sangat baik**, antara lain Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke wilayah kerja UPT. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel. **1 (satu)** sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah wilayah kerja UPT. **6 (Enam)** Sasaran kegiatan dengan kriteria **Cukup**, antara lain Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal.
2. Realisasi pelaksanaan anggaran BBPOM di Jayapura tahun 2024 adalah **99.60%** yaitu sebesar **Rp.27.006.395.014,-** dari total Pagu DIPA Tahun 2024 sebesar **Rp.30.706.163.000,-**
3. Capaian indikator kinerja terendah dengan kriteria **Cukup** adalah Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura, Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura, Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura.

4. Capaian indikator kinerja dengan kriteria **Baik** adalah adalah Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah Desa Pangan Aman, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.
5. Capaian indikator kinerja dengan kriteria **sangat baik** Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura, Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura, Nilai Pengelolaan Kearsipan, Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri.
6. Capaian indikator kinerja tertinggi adalah pada Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**
7. BBPOM di Jayapura terus berupaya dalam melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran kinerja pada akhir tahun 2024.

4.2. SARAN

Pada tahun 2024 dari 34 indikator kinerja yang dievaluasi, masih terdapat 8 (delapan) indikator yang belum mencapai target tahun 2024, terkait hal tersebut akan dilakukan langkah langkah sebagai berikut:

1. Persentase Makanan yang memenuhi syarat belum mencapai target karena masih tinggi nya jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat sebagian besar disebabkan oleh TMK Penandaan, TMK Penandaan pada komoditi pangan disebabkan oleh ketidaksesuaian antara label yang digunakan pada produk dengan label yang disetujui pada saat pendaftaran. Sementara itu, TMS hasil uji disebabkan oleh TMS hasil uji mikrobiologi dan TMS hasil uji kimia.

terkait kendala tersebut Upaya yang dapat dilakukan yaitu:

- Melakukan evaluasi penandaan sampel makanan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan hasil evaluasi pelaporan penandaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
 - Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sarana produksi makanan yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kaidah CPPOB atau CPPB-IRT sehingga produk yang dihasilkan adalah produk yang bermutu dan aman
2. Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik belum mencapai target karena dalam proses pendampingan UMKM terdapat kendala yaitu belum ada badan usaha yang mengelola sarana produksi yang sudah dibangun, Bangunan tempat produksi belum memenuhi kaidah CPPOB, Pelaku usaha tidak menunjukkan komitmen untuk mengikuti setiap tahapan pendampingan, tidak merespon saran dan permintaan perbaikan dari petugas, Pelaku usaha tidak lagi melanjutkan kegiatan produksi. Terhadap kendala dan permasalahan tersebut telah dilakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, antara lain:
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait kendala bangunan tempat produksi yang dialami pelaku usaha. Komunikasi dan koordinasi dilakukan terutama dengan lintas sektor yang memiliki kewenangan dan sumber daya untuk mengatasi kendala tersebut.
 - Memberikan pemahaman kepada UMKM terkait tujuan kegiatan pendampingan yang pada dasarnya adalah untuk kepentingan kemajuan usaha mereka.
3. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota belum mencapai target karena komunikasi dan koordinasi pengawasan obat dan makanan belum dapat dilakukan kepada seluruh wilayah pengawasan BBPOM Jayapura, sehubungan dengan situasi dan kondisi daerah. terkait kendala tersebut Upaya yang dilakukan yaitu :
- Meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan melalui pertemuan koordinasi dengan lintas sektor terkait,
 - Meningkatkan koordinasi terkait penanganan stunting dengan lintas sektor terkait pada wilayah Kabupaten/Kota.
4. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan belum mencapai target disebabkan oleh 1 perkara yang diperoleh dari hasil investigasi statusnya dari tahapan SPDP sampai dengan Tahap II lebih dari 3 bulan dan menjadi perkara *carry over*

di tahun 2025, karena jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut berada di luar kota dan atas informasi dari Jaksa bahwa pertanggal 15 Desember 2024 Pengadilan Negeri Jayapura sudah tidak menerima pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga direncanakan dilakukan Tahap II pada bulan Januari 2025. Upaya yang dilakukan terkait kendala tersebut yaitu:

- Melakukan komunikasi yang intens dengan jaksa penuntut umum yang menangani perkara
 - Kolaborasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan: Meningkatkan sinergi dengan Polri (Direktorat Intelkam Polda Papua, Direktorat Kriminal khusus Polda Papua) dan Kejaksaan Negeri Jayapura dan Kejaksaan Tinggi Papua agar penegakan hukum lebih efektif, terutama dalam proses penyelidikan dan penuntutan.
5. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan belum mencapai target karena hampir seluruh publikasi kegiatan pengawasan dan KIE dilakukan melalui media sosial walaupun masih banyak daerah yang belum dijangkau jaringan internet. Upaya yang dilakukan terkait kendala tersebut yaitu:
- menambah ragam publikasi melalui media lain (videotron, talk show radio/televisi).
 - Melakukan publikasi kegiatan pengawasan dan KIE melalui media sosial dan *subsite* secara rutin
 - Membuat konten publikasi/edukasi bersama kader/komunitas yang diintervensi program keamanan pangan
 - Melakukan publikasi konten melalui iklan di radio (Radio Bahana Sangkakala)
6. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura belum mencapai target Tahun 2024 upaya yang dilakukan yaitu:
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai mutasi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja unit dan mendokumentasikan data dukung atau tools penilaian yang relevan
 - Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
 - Mendokumentasikan keterlibatan serta arahan atau masukan pimpinan dalam monitoring dan evaluasi kinerja secara memadai.

- Mereviu relevansi kebijakan pemberian *reward* dan *punishment* dengan kondisi unit kerja serta menerapkan kebijakan tersebut secara berkelanjutan dan mendokumentasikannya secara memadai.
 - Mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat melalui berbagai media baik *offline* maupun *online*, menyusun laporan survei kepuasan masyarakat serta rencana tindak lanjut sesuai dengan periode survei yang dilakukan dan memonitor progres rencana tindak lanjut yang telah disusun tersebut.
 - Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai saran
 - Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
7. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura belum mencapai target karena berdasarkan hasil desk evaluasi SAKIP Tahun 2024 masih terdapat data dukung Komponen/Sub Komponen/Kriteria yang belum sesuai. Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian nilai AKIP yaitu rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggung jawab kegiatan sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat.
8. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura belum mencapai target disebabkan oleh hasil evaluasi terhadap hasil pengukuran IP ASN dengan penurunan nilai, dikarenakan antara lain masih ada pegawai yang belum mengikuti diklat fungsional/diklat teknis. Dalam upaya pencapaian target selanjutnya, maka hal yang direkomendasikan yaitu memberikan penugasan kepada jabatan pegawai untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional/diklat teknis serta mengikuti seminar/workshop/sejenisnya minimal 20 Jam Pelajaran.

LAMPIRAN

Kertas Kerja Tahun 2024

1. Sampling dan pengujian Obat

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Jumlah sampling Desember	Desember										Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
						TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji						
						TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*					
1	Obat	Random	Jayapura	336	336	0	0	0	0	336	336	333	3	3	0	336		
										0	0			0	0	0		
			TOTAL	336	336	0	0	0	336	336	333	3	3	0	336			
			Jayapura	80	80	0	0	0	11	80	80	80	0	0	80			
									0	0			0	0	0			
		Targeted							0	0			0	0	0			
			TOTAL	80	80	0	0	0	11	80	80	80	0	0	80			
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	416	416	0	0	0	11	416	416	413	3	3	0	416		
2	Obat Tradisional	Random	Jayapura	163	163	0	0	0	6	163	163	150	13	13	0	163		
									0	0			0	0	0			
			TOTAL	163	163	0	0	0	6	163	163	150	13	13	0	163		
			Jayapura	70	70	0	0	0	0	70	70	63	7	7	0	70		
									0	0			0	0	0			
		Targeted							0	0			0	0	0			
			TOTAL	70	70	0	0	0	0	70	70	63	7	7	0	70		
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	233	233	0	0	0	6	233	233	213	20	20	0	233		
3	Obat Kuasi	Random	Jayapura	14	14	0	0	0	0	14	14	13	1	1	0	14		
									0	0			0	0	0			
			TOTAL	14	14	0	0	0	0	14	14	13	1	1	0	14		
			Jayapura	6	6	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	6		
									0	0			0	0	0			
		Targeted							0	0			0	0	0			
			TOTAL	6	6	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	6		
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	20	20	0	0	0	0	20	20	19	1	1	0	20		
4	Suplemen	Random	Jayapura	56	56	0	0	0	0	56	56	55	1	1	0	56		
								91.40	0	0			0	0	0			
			TOTAL	56	56	0	0	0	91.398	56	56	55	1	1	0	56		
			Jayapura	24	24	0	0	0	0	24	24	23	1	1	0	24		
									0	0			0	0	0			
		Targeted							0	0			0	0	0			
			TOTAL	24	24	0	0	0	0	24	24	23	1	1	0	24		
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	80	80	0	0	0	91.398	80	80	78	2	2	0	80		
5	Kosmetik	Random	Jayapura	434	434	0	0	0	35	434	434	396	38	38	0	434		
								0	0			0	0	0				
		TOTAL	434	434	0	0	0	35	434	434	396	38	38	0	434			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			
									0	0			0	0	0			

2. Sampling dan pengujian Makanan

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Desember										Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
					Jumlah sampling Desember	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					
						TIE/Illegal/Palsu	kedalu arsa	rusak				MS	TMS*				
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																	
1	Pangan	Random	Jayapura	420	420	0	0	0	46	420	420	350	70	70	0	420	
									0	0			0	0	0		
			TOTAL	420	420	0	0	0	46	420	420	350	70	70	0	420	
		Targeted	Jayapura	120	120				0	120	120	116	4	4	0	120	
									0	0			0	0	0		
									0	0			0	0	0		
			TOTAL	120	120	0	0	0	0	120	120	116	4	4	0	120	
TOTAL BAHAN				540	540	0	0	0	46	540	540	466	74	74	0	540	
2	Fortifikasi	Targeted	Jayapura	60	60				0	60	60	60	0	0	0	60	
									0	0			0	0	0		
			TOTAL	60	60	0	0	0	0	60	60	60	0	0	0	60	
	TOTAL PANGAN	Random	420	420	0	0	0	46	420	420	350	70	70	0	420		
		Targeted	180	180	0	0	0	0	180	180	176	4	4	0	180		
		TOTAL	600	600	0	0	0	46	600	600	526	74	74	0	600		

3. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Desember		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Jayapura	72	72	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0	
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	1	1	
		Kosmetik	Jayapura	25	25	
		Pangan	Jayapura	50	50	
		Total	148	148	100.00	
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Jayapura	0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	18	18	
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	
		Kosmetik	Jayapura	16	16	
		Pangan	Jayapura	1	1	
			Total	35	35	100.00
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Jayapura	0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0	
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	
		Kosmetik	Jayapura	0	0	
		Pangan	Jayapura	1	1	
			Total	1	1	100.00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Jayapura	0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0	
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	
		Kosmetik	Jayapura	0	0	
		Pangan	Jayapura	4	4	
			Total	4	4	100.00
TOTAL			total	188	188	100.00

4. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Komponen Keputusan/Rekomen dasi	Komoditi	UPT	Desember		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Jayapura	42	72	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0	
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	1	1	
		Kosmetik	Jayapura	25	25	
		Pangan	Jayapura	48	50	
			Total	116	148	78.38
2	Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Jayapura	1	1	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0	
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	
		Kosmetik	Jayapura	0	0	
		Pangan	Jayapura	0	0	
			Jayapura	1	1	100.00
TOTAL			Jayapura	117	149	89.19

5. Sertifikasi

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Desember		
				Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Jayapura			
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Jayapura			
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Jayapura	18	18	100.00
			Jayapura			
			Jayapura			
4	Hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi IP CPPOB terhadap produsen pangan olahan	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	Jayapura	7	7	100.00
5	Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	Jayapura	2	2	100.00
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Jayapura	55	55	
			Jayapura			
TOTAL				82	82	100.00

6. Sarana Distribusi

No	Sarana Distribusi	UPT	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	Desember		
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Jayapura	10	10	6	4
2	Apotek	Jayapura	165	165	146	19
3	Toko Obat	Jayapura	11	13	7	6
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi	Jayapura	17	16	13	3
5	Rumah Sakit (RS)	Jayapura	20	20	17	3
6	Puskesmas	Jayapura	58	58	55	3
7	Klinik	Jayapura	21	21	20	1
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Jayapura	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Jayapura	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Jayapura	15	24	17	7
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Jayapura	5	4	3	1
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Jayapura	178	184	145	39
13	Klinik Kecantikan	Jayapura	12	12	9	3
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Jayapura	292	293	264	29
TOTAL			804	820	702	118

7. Sarana Produksi

No	Sarana Produksi	UPT	Desember		
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Jayapura	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	Jayapura	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab	Jayapura	0	0	0
			0		
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Jayapura	0	0	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Jayapura	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jayapura	0		0
7	Usaha Mikro Obat Tradisional	Jayapura	1	0	1
8	Industri Farmasi (IF) yang	Jayapura	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi	Jayapura	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang	Jayapura	0	0	0
11	Industri Kosmetik	Jayapura	0	0	0
12	Industri Farmasi/Industri Obat	Jayapura	0	0	0
13	Industri Pangan	Jayapura	25	18	7
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Jayapura	49	39	10
Jayapura			75	57	18

8. UMKM

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	Progres s.d. bulan
								Des
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	0	0	
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM	20%	30%	Maret-April			
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan	40%	70%	Maret-Oktober			
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-			
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			
								0
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang	10%	10%	Januari	2	2	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor	40%	50%	Februari-Maret			40
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-			40
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputy 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November			10
Total Progres								100
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	20	20	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			30
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			35
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-			15
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			
Total Progres								90
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						22	22	95.00

9. PJAS

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS Tahun N	Progres s.d. bulan (KUMULATIF)											
					Januari	s.d Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1 Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20.00	Jan - April			0.00	6.50	13.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2 Sosialisasi keamanan pangan	10.00	Maret - April			0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
3 Bimbingan teknis keamanan pangan untuk	15.00	April - Juni			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
4 Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi	10.00	April - Nov			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan	15.00	Juli - Okt			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
- Pembentukan Tim Keamanan Pangan																
- Intervensi Keamanan Pangan kepada																
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20.00	Agustus - Nov			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	20.00	20.00
7 Pengawasan	10.00	Agt - Des			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	6.60	10.00
Total skor (Tahun N)	100.00		0	0	0.00	6.50	13.50	20.00	26.60	55.00	55.00	65.00	70.00	90.10	96.60	100.00

10. DESA

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa Tahun N	Progres (%)											
					Januari	Februari	sd Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1 Adokasi Kelembagaan Desa	20.00	Jan-april			0.00	6.50	13.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2 Pengadaan paket informasi keamanan	5.00	Jan-Juni			0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan	15.00	April - Juli			0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
4 Bimtek Komunitas sekaligus survei pre	15.00	Mei - Okt			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
5 Fasilitasi Keamanan Pangan	10.00	Juni - Nov			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
6 Intensifikasi Pengawasan Keamanan	10.00	Mei-Nov			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	5.00	5.00	5.00	8.30	10.00	10.00
7 Monitoring dan Evaluasi	10.00	Nov - Des			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	10.00	10.00
8 Lomba Desa Pangan Aman	5.00	Desember			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
9 Pengawasan	10.00	Juni - Des			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	10.00	10.00
Total	100.00		0	0	0.00	6.50	13.50	25.00	40.00	53.30	60.00	62.00	70.00	83.20	95.00	100.00

11. PASAR

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar Tahun N	Progres (Capaian DJA)											
					Januari	Februari	sd Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1 Adokasi	20.00	Jan - Apr			0.00	6.50	13.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2 Survei Pasar	5.00	Jan - Apr			1.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi	15.00	Apr - Mei			0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
4 Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap	15.00	Apr - Mei			0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
5 Penyuluhan	10.00	Juni - Juli			0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
6 Kampanye	10.00	Juni - Juli			0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
7 Monev Tahap 2 (Sampling dan	15.00	Sept - Okt			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	15.00	15.00	15.00	15.00
8 Pengawasan	10.00	Feb-Okt			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	10.00	10.00	10.00
Total	100.00		0	0	1.00	8.50	15.50	25.00	45.00	59.00	75.00	87.00	96.60	100.00	100.00	100.00

12. Sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Desember						
Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun (disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling)	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1373	1373	Benar	1373	1373	Benar	100.00

13. Sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Januari	Desember						
Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun (disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling)	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
600	600	600	Benar	600	600	Benar	100.00

14. Perkara

Tahapan	S.D. DESEMBER										
	Target		Realisasi		Koefisie n Tahun Berjalan	Koefisie n Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara bulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	4	2			1.00		0.15	15.00%	93.44%	100.00%	93.44
Tahap I					1.00	0.33	0.4	40.00%			
P21			1	2	1.00	0.33	0.3	30.00%			
Tahap II			3		0.75	0.00	0.15	8.44%			
Total	4	2	4	2							

15. Pengukuran kinerja program/kegiatan

KRO		Indikator Kinerja	Output %			Input %			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
AEA	001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100	Rp 123,767,000	Rp 118,229,961	95.53	1.05	0.05	100 %	Efisien
BAH	001	Pelayanan Publik Lainnya	98	415	423.47	Rp 173,086,000	Rp 172,994,004	99.95	4.24	3.24	75 %	Tidak Efisien
BDC	001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	258	250	96.90	Rp 72,725,000	Rp 72,506,500	99.70	0.97	-0.03	75 %	Tidak Efisien
BKB	001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1.00	100	Rp 801,826,000	Rp 789,773,609	98.50	1.02	0.02	100 %	Efisien
BMB	001	Komunikasi Publik	36	36	100	Rp 155,226,000	Rp 155,074,480	99.90	1.00	0.00	100 %	Efisien
CAB	002	Sarana Bidang kesehatan	1	1.00	100	Rp 211,327,000	Rp 211,182,898	99.93	1.00	0.00	100 %	Efisien
CAN	001	Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	19	19	100	Rp 245,105,000	Rp 245,097,199	100.00	1.00	0.00	100 %	Efisien
CBV	962	Prasarana bidang kesehatan	1	1.0	100	Rp 1,189,668,000	Rp 1,187,362,496	99.81	1.00	0.00	100 %	Efisien
PDD	001	Standarisasi lembaga	1	1.00	100	Rp 924,844,000	Rp 918,088,015	99.27	1.01	0.01	100 %	Efisien
QCD	U57	Perkara Hukum badan usaha	4	4	100	Rp 696,600,000	Rp 690,241,537	99.09	1.01	0.01	100 %	Efisien
QDB	001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	88	88	100	Rp 867,781,000	Rp 865,129,162	99.69	1.00	0.00	100 %	Efisien
	002	Desa Pangan Aman	22	22	100	Rp 746,274,000	Rp 736,495,133	98.69	1.01	0.01	100 %	Efisien
	003	Pasar aman dari bahan berbahaya	22	22	100	Rp 683,150,000	Rp 681,894,500	99.82	1.00	0.00	100 %	Efisien
QIA	001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	540	540	100	Rp 538,944,000	Rp 536,923,418	99.63	1.00	0.00	100 %	Efisien

KRO		Indikator Kinerja	Output %			Input %			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
	005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1,373	1,373	100	Rp 972,662,000	Rp 970,257,831	99.75	1.00	0.00	100 %	Efisien
	008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	60	60	100	Rp 67,217,000	Rp 66,940,496	99.59	1.00	0.00	100 %	Efisien
QDG	001	Fasilitasi dan pembinaan UMKM	22	10	45	Rp 81,892,000	Rp 59,973,900	73.24	0.62	-0.38	75 %	Tidak Efisien
QIC	001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	68	75	110.29	Rp 125,179,000	Rp 125,179,000	100.00	1.10	0.10	100 %	Efisien
	004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	806	820	101.74	Rp 856,998,000	Rp 853,457,164	99.59	1.02	0.02	100 %	Efisien
RAB	001	Sarana Bidang Kesehatan	1	1	100	Rp 3,167,158,000	Rp 3,152,830,636	99.55	1.00	0.00	100 %	Efisien
EBA	994	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	1.00	100	Rp14,412,793,000	Rp 14,391,849,617	99.85	1.00	0.00	100 %	Efisien

16. Pengukuran Tingkat efisiensi indikator kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5	94.43	100.99	391,975,000	390,736,158	99.68	1.01	0.01	100 %
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	83.33	91.57	99,252,000	99,232,455	99.98	0.92	-0.08	75 %
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93.5	93.51	100.01	103,500,000	103,251,700	99.76	1.00	0.00	100 %
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.3	96.67	101.44	116,388,000	116,324,986	99.95	1.01	0.01	100 %
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97	100	103.09	67,217,000	66,940,496	99.59	1.04	0.04	100 %
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	100	102.04	132,592,000	132,485,586	99.92	1.02	0.02	100 %
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	89.19	127.41	1,020,000	1,020,000	100.00	1.27	0.27	95 %
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.8	100	100.20	7,650,000	7,650,000	100.00	1.00	0.00	100 %
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.5	76.00	106.29	125,179,000	125,179,000	100.00	1.06	0.06	100 %
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	85.61	100.72	506,560,000	506,232,000	99.94	1.01	0.01	100 %
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.8	4.83	100.63	2,533,198,000	2.518.689.209	99.43	1.01	0.01	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
		Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81	70.00	86.42	81,892,000	59,973,900	73.24	1.18	0.18	100 %
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	75.47	79.44	297,970,000	297,175,500	99.73	0.80	-0.20	75 %
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.80	97.43	101.07	214,081,000	213,890,980	99.91	1.02	0.02	100 %
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	80	88	110.00	867,781,000	865,129,162	99.69	1.10	0.10	100 %
		Jumlah desa pangan aman	22	22	100.00	616,764,000	607,585,133	98.51	1.02	0.02	100 %
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	22	22	100.00	514,690,000	513,629,000	99.79	1.00	0.00	100 %
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100.00	100.00	477,187,000	476,269,973	99.81	1.00	0.00	100 %
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100.00	100.00	323,304,000	321,365,977	99.40	1.01	0.01	100 %
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	93.44	95.35	820,367,000	808,471,498	98.55	0.97	-0.03	75 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83.7	86.58	103.44	4,142,354,000	4,121,238,597	99.49	1.04	0.04	100 %
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	3	3	100.00	12,456,089,000	12.456.089.000	99.98	1.00	0.00	100 %
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	67.5	74.09	109.76	13,870,000	13,690,000	98.70	1.11	0.11	100 %
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94.6	96.49	102.00	179,564,000	176,458,257	98.27	1.04	0.04	100 %
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73	68.7	94.11	23,988,000	23,087,620	96.25	0.98	-0.02	75 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura	90.5	91.96	101.61	165,436,000	165,344,004	99.94	1.02	0.02	100 %
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	91.18	86.9	95.31	873,311,000	861.226.968	98.62	0.97	-0.03	75 %
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	81.49	76.95	94.43	40,943,000	40,942,477	100.00	0.94	-0.06	75 %
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	92.79	97.56	105.14	196,658,000	196,644,330	99.99	1.05	0.05	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	91.08	86.88	95.39	311,336,000	310,038,501	99.58	0.96	-0.04	75 %
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	89.48	90.31	100.93	13,246,000	13,245,650	100.00	1.01	0.01	100 %
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	95	135.71	11,181,000	11,180,516	100.00	1.36	0.36	95 %
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	85	98.19	115.52	26,086,000	26,084,977	100.00	1.16	0.16	100 %
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	63.48	105.80	361,593,000	361,585,831	100.00	1.06	0.06	100 %



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMANTO

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Jayapura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura , 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di
Jayapura



HERMANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan



TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI JAYAPURA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93.5
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.3
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.8
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.5
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4.8
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,8
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88
		03 - Jumlah desa pangan aman	22
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	22
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83,7
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	67,5
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	90,5
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	91,18
		03 - Nilai AKIP UPT	81,49
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	92,79

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	91.08
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.48
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	85
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 30,706,163,000 (Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	15,894,468,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	14,811,695,000

Jayapura, 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di
Jayapura



HERMANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan



TARUNA IKRAR

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI BESAR POM DI JAYAPURA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	391,970,273
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	125,065,712
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	103,504,728
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	134,313,288
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	67,217,000
2.	02 - Meningkatnya	01 - Persentase keputusan/rekomendasi	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	23,440,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan													
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	32,320,000
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	12,750,000
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	125,179,000
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	741,514,000
		06 - Indeks Pelayanan Publik							4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2,886,135,600
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	4	10	12	20	30	45	52	60	70	80	90	81	154,646,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota			22	22	22	22	30	40	75	76	77	95	498,882,000
3.	03 - Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan			95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	270,356,000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		6	20	30	46	55	55	65	80	85	90	88	1,024,565,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	11	25	30	40	53.5	60	62	70	80	90	22	1,424,564,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.5	9	25	48	60	63	70	75	80	85	90	22	589,731,000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2.5	9.5	22	31	41.5	52.5	61	70.5	79	86.5	93.5	100	477,187,000
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	10	21.5	31.5	43	55.5	66.5	77	83.5	87.5	94.5	100	323,304,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														
5.	05 - Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	11.67	21.5	23	36	38.89	42	49	52.78	60.71	69.64	79.38	98	1,136,227,000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												83.7	4,541,224,000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal				3	3	3	3	3	3	3	3	3	12,394,167,000
7.	07 - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												67.5	13,870,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	08 - Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												94.6	207,769,000
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												73	86,064,000
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												90.5	294,699,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT												91.18	1,032,737,000
		03 - Nilai AKIP UPT												81.49	40,943,000
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan												92.79	190,832,400
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT												91.08	620,127,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	5	40									89.48	113,456,000
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa												70	11,181,000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara												85	51,453,000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri												60	564,769,000
Total															30,706,163,000

Jayapura, 03 October 2024

Kepala Balai Besar POM di Jayapura
Hermanto



BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura – Papua
Telp. (0967) 5186777, Fax. (0967) 5186333

 @bpom.jayapura  @bpom.jayapura

 Balai Besar POM di Jayapura  Balai Besar POM di Jayapura

 082217727111  www.jayapura.pom.go.id